



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG




RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF	
KABAG	
SUBKOOB	
STAF	

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

KABAG	
SUBKOOR	
STAF	M

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG  
dan  
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)

KABAS	
SUBKOOR	4
STAF	M




- tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
  7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
  8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.
  9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada akhir periode perencanaan sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun.
  10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  11. Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
  12. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan.
  13. Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja.
  14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II  
RPJMD

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:
  - a. penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
  - b. penyusunan RKPD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan visi, misi, dan program pembangunan Bupati.

PARAF	
KABAG	
SUBKOOR	
STAF	

Bagian Kedua  
Sistematika

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
  - BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
  - BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
  - BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
  - BAB V : PENUTUP
- (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.




BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Tindak lanjut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. perubahan Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan/atau
  - b. penyusunan RPJMD periode berikutnya berdasarkan hasil evaluasi RPJMD.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam hal masa jabatan Bupati berakhir dan RPJMD untuk periode selanjutnya belum ditetapkan, maka untuk kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD tahun berkenaan, Pemerintah Daerah tetap menyusun Rancangan RKPD tahun berkenaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan mempedomani RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini, serta memperhatikan RPJPD, rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

KABAG	
SUBKOOB	
STAF	

- (2) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini maka penyebutan Perangkat Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perangkat Daerah.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
pada tanggal 26 Agustus 2025

  
**BUPATI REJANG LEBONG,**  
*Muhammad Fikri*  
**MUHAMMAD FIKRI**

Diundangkan di Curup  
pada tanggal 26 Agustus 2025

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**  
*Yusran Fauzi*  
**YUSRAN FAUZI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 184

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU: (1/18/2025).

# PERDA RPJMD 2025-2029



## PERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
TAHUN 2025



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan setiap daerah, namun tetap sejalan dengan kebijakan nasional. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya lokal, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah. Hal ini memerlukan perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Instrumen utama dalam perencanaan ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku lima tahun. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menjadi pedoman teknis sehingga dapat menjamin keselarasan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional, memastikan keterpaduan antar-perangkat daerah, serta memenuhi ketentuan waktu, prosedur, dan substansi yang telah ditetapkan. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 yang merupakan respon terhadap dinamika pembangunan nasional dan daerah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kabupaten Rejang Lebong dalam lima tahun ke depan, disusun dengan juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen ini menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, dengan mempertimbangkan potensi lokal, tantangan, dan isu-isu strategis yang berkembang. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang holistik, integratif, dan spasial, sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif.

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mencakup empat aspek utama: teknokratis, partisipatif, politis, serta kombinasi *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan teknokratis menekankan penggunaan data dan analisis ilmiah untuk memastikan keputusan yang akurat dan berbasis bukti. Sementara itu, pendekatan partisipatif melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil. Pendekatan politik mempertimbangkan dinamika politik lokal dan

nasional, sedangkan kombinasi *top-down dan bottom-up* memastikan bahwa arahan dari pemerintah pusat dapat diselaraskan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Prinsip-prinsip perencanaan yang diusung dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 meliputi tematik, holistik, integratif dan spasial. Prinsip tematik menetapkan tema prioritas yang menjadi fokus pembangunan dalam periode tertentu. Prinsip holistik menjamin bahwa program pembangunan dirancang secara komprehensif, mencakup seluruh aspek dari hulu hingga hilir. Prinsip integratif menciptakan sinergi antar-pemangku kepentingan dan sumber pendanaan, sementara prinsip spasial memastikan bahwa perencanaan memperhatikan keterkaitan antar-wilayah dan kesatuan geografis. Dengan pendekatan dan prinsip tersebut, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 diharapkan dapat menjadi panduan strategis untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dokumen ini tidak hanya menjadi acuan bagi pemerintah daerah, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Melalui perencanaan yang matang dan partisipatif, Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah yang berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi pembangunan nasional.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 juga selaras dengan Asta Cita yang merupakan Prioritas Pembangunan Nasional. Asta Cita, yang terdiri dari delapan agenda prioritas pembangunan nasional, mencakup pembangunan manusia, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks ini, RPJMD Rejang Lebong mengintegrasikan agenda-agenda tersebut ke dalam rencana pembangunan daerah. Misalnya, dalam hal pembangunan manusia, RPJMD Rejang Lebong menekankan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, yang sejalan dengan prioritas nasional untuk mengurangi kesenjangan akses dan kualitas layanan dasar. Program-program seperti peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat, menjadi fokus utama.

Selain itu, RPJMD Rejang Lebong juga mengakomodasi prioritas pembangunan nasional dalam bidang infrastruktur. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih, yang sejalan dengan program nasional untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat integrasi dengan wilayah lain di Provinsi Bengkulu dan sekitarnya. Dalam bidang ekonomi, RPJMD Rejang Lebong mendorong pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan pariwisata, yang sejalan dengan prioritas nasional untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Di samping memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, Kabupaten Rejang Lebong juga menghadapi sejumlah tantangan pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih jauh di bawah rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih intensif dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Selain itu, infrastruktur transportasi dan logistik masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan nasional yang menghubungkan dengan provinsi lain, masih memerlukan perbaikan untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Selain itu juga isu lingkungan juga menjadi tantangan serius. Deforestasi dan alih fungsi lahan, penurunan daya dan kapasitas lingkungan, tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya hutan. Oleh karena itu, pembangunan di Rejang Lebong perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan, termasuk melalui penerapan praktik pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan. RPJMD Rejang Lebong 2025-2029 mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ini, sejalan dengan prioritas nasional untuk mencapai target pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim. Di sisi lain, Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi pariwisata yang besar, terutama wisata alam dan budaya yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun, pengembangan pariwisata masih terkendala oleh kurangnya infrastruktur pendukung, seperti akses transportasi yang memadai dan fasilitas akomodasi yang berkualitas. RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 juga mengakomodasi pengembangan pariwisata berkelanjutan, yang sejalan dengan prioritas nasional untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Selain itu juga mengintegrasikan program-program peningkatan kapasitas teknologi dan inovasi untuk mendorong transformasi digital di berbagai sektor Pembangunan dan layanan masyarakat, dalam hal ini termasuk implementasi *e-government*, pengembangan kepariwisataan dan revitalisasi UMKM dan BUMD dengan memanfaatkan teknologi informasi dan manajemen modern.

Sebagai pengantar menuju isi dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029, bab ini memberikan gambaran umum tentang konteks pembangunan daerah, pendekatan dan prinsip-prinsip perencanaan dalam penyusunan RPJMD. Di samping itu disajikan peraturan perundangan yang melandasinya serta kaitan antar dokumen perencanaan dan keselarasannya dengan substansi RPJMD Rejang Lebong. Bab-bab selanjutnya akan menguraikan secara lebih rinci tentang kondisi sosial-ekonomi-budaya dan keuangan daerah, isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan; visi, misi, tujuan, strategi, dan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan, dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, dan keselarasan dengan kebijakan nasional.

## 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
21. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Nomor .....);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80 Tahun 2012);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2024 Nomor 182);

### **1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan mengacu dan mempertimbangkan dokumen perencanaan nasional, provinsi, serta daerah sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang erat dan

saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. RPJMD memuat visi dan misi kepala daerah terpilih yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah (PD), program lintas PD, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta dokumen perencanaan pembangunan pemerintah pusat dapat dilihat pada Gambar 1.1. Keterkaitan ini diharapkan dapat menciptakan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, sehingga terwujud harmonisasi dalam pelaksanaan pembangunan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong harus berpedoman pada RPJPD Kabupaten Rejang Lebong dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta RPJMD Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong akan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan. Renstra ini dilengkapi dengan indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun.

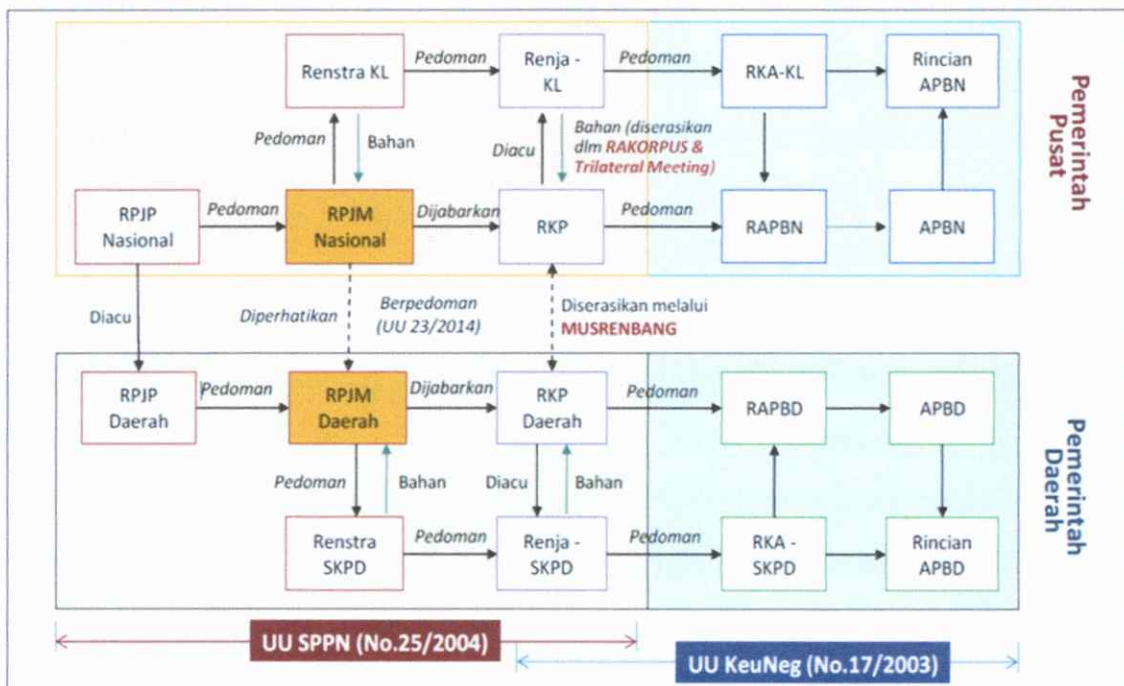
Lebih lanjut, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong akan dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yaitu rencana tahunan daerah yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dokumen Renja ini menjadi dasar bagi Perangkat Daerah dalam mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, yang kemudian dirangkum menjadi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD selanjutnya ditindaklanjuti menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan akhirnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Dengan demikian, RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar bagi rencana jangka pendek hingga penganggaran.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW memberikan acuan mengenai struktur dan pola ruang yang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan. Hal ini bertujuan agar kebijakan dan sasaran dalam RPJMD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi Bengkulu dan RTRW Kabupaten Rejang Lebong. Keselarasan ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Selain memperhatikan RTRW, penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong juga harus mempertimbangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup di Kabupaten Rejang Lebong secara efektif. KLHS juga memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Dengan memperhatikan keterkaitan antara RPJMD, RPJPD, RPJMN, RPJM Provinsi, RTRW, dan KLHS, penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang terintegrasi dan komprehensif. Integrasi ini memastikan bahwa pembangunan daerah dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.



Sumber: Analisa terhadap Permendagri Nomor 86 tahun 2017 dan perundang-undangan lainnya  
**Gambar 1. 1 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan**

Hubungan antara dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1.3.1 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 adalah “Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan”. Visi ini mencerminkan komitmen Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan pembangunan yang maju, mandiri, berbasis nilai-nilai religius, dan berkelanjutan. Visi ini mendukung visi presiden tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 20245”. Visi ini selaras

dengan delapan misi presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita pembangunan nasional, khususnya dalam:

- 1) Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, dengan mengedepankan kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan.
- 2) Mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan, dengan meneguhkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai landasan pembangunan.
- 3) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 dan hubungannya dengan Delapan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029 adalah:

#### **1. Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan Efektif didukung Sumber Daya Manusia yang Berakhlak dan Profesional**

- 1) Hubungan dengan Asta Cita: Misi ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 2) Hubungan dengan Agenda Pembangunan Nasional: Misi ini mendukung Agenda Ke-1 RPJMN 2025-2029, yaitu "Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia" dan Agenda Ke-7 yaitu "Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan" yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.
- 3) Implementasi: Misi ini diwujudkan melalui program-program seperti peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), penerapan sistem elektronik dalam pelayanan publik dan penguatan pengawasan internal untuk mencegah korupsi.

#### **2. Meningkatkan Pertumbuhan dan Daya Saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah**

- 1) Hubungan dengan Asta Cita: Misi ini sejalan dengan upaya mewujudkan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti agrowisata dan sektor unggulan lainnya.
- 2) Hubungan dengan Agenda Pembangunan Nasional: Misi ini mendukung Agenda Ke-3 RPJMN 2025-2029, yaitu "Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi", yang fokus pada pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan peningkatan nilai tambah produk daerah.

- 3) Implementasi: Misi ini diwujudkan melalui program pengembangan agrowisata dan peningkatan potensi sektor unggulan daerah yaitu pertanian dan pariwisata.
- 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.**
- 1) Hubungan dengan Asta Cita: Misi ini sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan, dengan memastikan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar bagi seluruh masyarakat.
  - 2) Hubungan dengan Agenda Pembangunan Nasional: Misi ini mendukung Agenda Ke-4 RPJMN 2025-2029, yaitu "Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas" dan Agenda Ke-6 yaitu "Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi", yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi, pendidikan berkualitas yang merata dan kesehatan untuk semua.
  - 3) Implementasi: Misi ini diwujudkan melalui program Pembangunan sarana prasarana dan kualitas pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, dan listrik di daerah terpencil.
- 4. Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah**
- 1) Hubungan dengan Asta Cita: Misi ini sejalan dengan upaya mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan serta berdaya saing, dengan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan meningkatkan transformasi digital dan inovasi daerah.
  - 2) Hubungan dengan Agenda Pembangunan Nasional: Misi ini mendukung Agenda Ke-2 RPJMN 2025-2029, yaitu "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru" dan Agenda Ke-5 yaitu "Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri", yang bertujuan untuk membangun sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal, terwujudnya pengembangan ekonomi digital dan meningkatkan inovasi dan produktivitas melalui pemanfaatan teknologi digital serta daya saing industri.

3) Implementasi: Misi ini diwujudkan melalui program pelestarian budaya lokal, pemanfaatan teknologi dalam sistem perekonomian dan meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan mengembangkan potensi lokal Berbasis Sumber Daya dengan mengedepankan transformasi digital untuk peningkatan daya saing daerah.

**5. Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.**

- 1) Hubungan dengan Asta Cita: Misi ini sejalan dengan upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, sebagai bagian dari komitmen global dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- 2) Hubungan dengan Agenda Pembangunan Nasional: Misi ini mendukung Agenda Ke-2 RPJMN 2025-2029, yaitu "Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru " dan Agenda Ke-8 yaitu "Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur", yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta ekonomi hijau.
- 3) Implementasi: Misi ini diwujudkan melalui program pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran lingkungan, dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dengan demikian visi dan misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 memiliki hubungan yang erat dan substantif dengan Asta Cita dalam RPJMN 2025-2029. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah di Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya bertujuan untuk memajukan daerah secara internal, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan sinergi antara pembangunan daerah dan nasional, serta memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi, berkelanjutan dan inklusif.

**Tabel 1. 1**  
**Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029**  
**dengan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029**

No.	Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	Asta Cita (Misi Pembangunan) RPJMN Tahun 2025-2029
1.	MISI1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional	PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia  PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
2.	MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
3.	MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.	PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas  PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi
4.	MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah.	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru  PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
5.	MISI 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.	PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru  PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

### 1.3.2 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RTRW Nasional

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 memperhatikan RTRW Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan RPJMD, terhadap ketentuan rencana struktur ruang, pola ruang dan arahan pemanfaatan ruang RTRW Nasional. RTRW menjadi acuan bagi kebijakan RPJMD yang akan mempengaruhi penataan ruang pada Kabupaten Rejang Lebong. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang perlu diperhatikan karena berkaitan dengan Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pada strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, terdapat strategi mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah Pulau Sumatera dengan luas paling sedikit 40 persen dari luas pulau tersebut sesuai dengan kondisi, karakter, dan fungsi ekosistemnya serta tersebar secara proporsional.

b. Rencana Struktur Ruang

Rencana sistem jaringan sumber daya air berupa wilayah sungai yang terkait dengan Kabupaten Rejang Lebong adalah Rencana Tahapan Pengembangan II – IV/A. Rencana tersebut berupa Perwujudan Sistem Jaringan SDA pada Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau yang mana Wilayah Sungai yang masuk ke dalam Wilayah Sungai Kabupaten Rejang Lebong adalah Wilayah Sungai Musi dan Lemau.

c. Rencana Pola Ruang

Rencana Kawasan Lindung Nasional yang terkait dengan Kabupaten Rejang Lebong adalah:

1. Rencana Tahapan Pengembangan II/B/3 berupa Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional Cagar Alam pada Cagar Alam Talang Ulu I
2. Rencana Tahapan Pengembangan II/B/3 berupa Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional Cagar Alam pada Cagar Alam Talang Ulu II
3. Rencana Tahapan Pengembangan II/A/4 berupa Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Lindung Nasional Taman Nasional pada Taman Nasional Kerinci Seblat
4. Rencana Tahapan Pengembangan II/B/6 berupa Pengembangan Pengelolaan Kawasan Lindung Nasional Taman Wisata Alam pada Taman Wisata Alam Bukit Kaba.

d. Penetapan Kawasan Strategis Nasional

Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan Rencana Tahapan Pengembangan II/B/I berupa Rehabilitasi/revitalisasi Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup.

### 1.3.3 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029 juga memperhatikan RPJPD Provinsi Bengkulu. Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Bengkulu adalah “Bengkulu Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Terdapat keselarasan antara visi pembangunan Provinsi Bengkulu dengan visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong. Makna kata sejahtera RPJPD Provinsi Bengkulu sudah tersirat dalam makna maju dan sejahtera dalam visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, yaitu masyarakat yang aman sentosa dan makmur serta terlepas dari segala macam kesukaran. Sementara itu berkelanjutan memiliki makna menjaga dan melestarikan lingkungan serta mendukung pembangunan yang ramah lingkungan.

Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Keadilan ini harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf hidupnya dan memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat dan melaksanakan hak politiknya, mengamankan dan mempertahankan negara, perlindungan dan kesamaan di depan hukum, transparansi, akuntabilitas dan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender dan daerah.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 juga memperhatikan keterkaitan dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045. Konsistensi ini dapat dilihat dari keselarasan antara visi dalam RPJPD Provinsi Bengkulu dengan visi dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 2**  
**Keselarasan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029**  
**dengan RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045**

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045
	<b>VISI</b> Mewujudkan Rejang Lebong Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan	<b>VISI</b> Bengkulu Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan
1.	<b>MISI1:</b> Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional	<b>MISI 1:</b> Mewujudkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang berdaya saing  <b>Misi 3:</b> Menciptakan transformasi kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045
2.	MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	MISI 2: Mewujudkan transformasi ekonomi secara inklusif berbasis sumberdaya alam melalui hilirisasi produk unggulan daerah dan ekonomi kreatif
3.	MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.	MISI 6: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
4.	MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah	MISI 7: Meningkatkan pembangunan infrastruktur ekonomi yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.  Misi 4: Menciptakan atmosfir pembangunan yang kondusif melalui perwujudan keamanan daerah tangguh, dan demokrasi yang berkeadilan
5.	MISI 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.	MISI 5: Ketahanan sosial budaya dan ekologi  MISI 7: Mewujudkan sinergi dan kesinambungan pembangunan

#### 1.3.4 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 memperhatikan RTRW Provinsi Bengkulu. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan RPJMD, terhadap ketentuan rencana struktur ruang dan pola ruang RTRW Provinsi Bengkulu. RTRW menjadi acuan bagi kebijakan RPJMD yang akan mempengaruhi penataan ruang pada Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan terkait langsung dengan Kabupaten Rejang Lebong. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

a. Rencana struktur ruang

Arahan rencana struktur ruang khususnya rencana sistem perkotaan menetapkan Kota Curup sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Kota Padang sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi pemantapan jaringan jalan arteri primer yang melewati Batas Kota Curup – Jalan Thamrin – Jalan Merdeka – Jalan A. Yani - Curup, pengembangan jaringan jalan bebas hambatan yang melewati Curup,

optimalisasi dan pengembangan Terminal Simpang Nangka, serta pengembangan jalur jaringan kereta api yang melewati Kota Padang. Rencana sistem jaringan energi meliputi peningkatan kapasitas PLTA Tes dan PLTA Musi. Pengembangan jaringan sumber daya air meliputi pengembangan jaringan irigasi yang diutamakan untuk mengaliri area pertanian potensial, pengelolaan wilayah sungai lintas provinsi termasuk DAS Musi.

b. Rencana pola ruang

Rencana pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dengan luas kurang lebih 90.800 hektar, Cagar Alam Danau Menghijau dengan luas kurang lebih 2.882 hektar, Cagar Alam Talang Ulu 1 dengan luas kurang lebih 1 hektar, Cagar Alam Talang Ulu 2 dengan luas kurang lebih 1 hektar, Taman Nasional Kerinci Sebelat dengan luas kurang lebih 340.575 hektar, Taman Wisata Alam Bukit Kaba dengan luas kurang lebih 13.490 hektar, serta kawasan lindung geologi tanah longsor dan gunung berapi.

Rencana pengembangan kawasan budidaya meliputi kawasan peruntukan pangan, kawasan peruntukan hortikultura, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan permukiman berkepadatan tinggi (Kota Curup), kawasan peruntukan industri, serta kawasan peruntukan pariwisata yang terdiri dari wisata alam dan wisata buatan yaitu Danau Mas Harun Bastari dan Suban Air Panas di Curup.

### **1.3.5 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029**

Pembangunan Provinsi Bengkulu memiliki visi “Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan” sesuai yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029. Visi pembangunan Provinsi Bengkulu ini diturunkan ke dalam empat misi pembangunan, yaitu 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius, 2) Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah, 3) Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, demokratis dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, terutama kesehatan, pendidikan, lapangan kerja dan rasa aman, dan 4) Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.

Provinsi Bengkulu memiliki tujuh prioritas pembangunan daerah yang diikuti dengan program-program prioritas. Prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu terdiri dari 1) Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah

yang transparan, bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius; 2) Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan Makmur; 3) Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah; 4) Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas; 5) Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam jaringan ekonomi lokal; 6) Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk unggulan; 7) Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis dalam pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta berketahanan iklim.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 juga memperhatikan keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029. Konsistensi ini dapat dilihat dari keselarasan antara visi dalam RPJMD Provinsi Bengkulu dengan visi dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana yang dijabarkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1. 3**  
**Keselarasan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029**  
**dengan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029**

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029
	<b>VISI :</b> Mewujudkan Rejang Lebong Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan	<b>VISI:</b> Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera, dan Berkelanjutan
1.	<b>MISI1:</b> Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional	<b>MISI 1:</b> Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, autable dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, professional serta religius
2.	<b>MISI 2 :</b> Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	<b>MISI 4:</b> Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan
3.	<b>MISI 3 :</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.	<b>MISI 2:</b> Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat  <b>MISI 3 :</b> Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis, dengan memastikan

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029
		terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman.
4.	MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah.	MISI 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan
5.	MISI 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.	MISI 4: Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan.

### 1.3.6 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045

RPJMD 2025-2029 merupakan penjabaran dari tahapan keempat pelaksanaan RPJPD Rejang Lebong 2025-2045. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2045 sudah dirumuskan visi Rejang Lebong sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Rejang Lebong adalah “Rejang Lebong Unggul, Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Berkelanjutan”. Sementara itu, visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan”.

Untuk menjabarkan visi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2045 terdapat 8 misi utama. Dari kedelapan misi utama dalam RPJPD Kabupaten Rejang Lebong terdapat kaitan yang erat dengan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan secara eksplisit misi pada RPJMD merupakan turunan dari misi yang ada pada RPJPD seperti yang terdapat pada tabel berikut.

**Tabel 1. 4**  
**Keselarasan antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045**

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045
	<b>VISI</b> Mewujudkan Rejang Lebong Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan	<b>VISI</b> Rejang Lebong Unggul, Maju dan Sejahtera melalui Pembangunan Berkelanjutan
1.	MISI 1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional	MISI 1: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia unggul dan berdaya saing

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	RPJPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045
		Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola yang baik ( <i>good governance</i> ) melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
2.	MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi berbasis agrobisnis dan agrowisata
3.	MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.	Misi 7: Mewujudkan konektivitas wilayah yang baik melalui penyediaan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan
4.	MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah	Misi 5 : Mewujudkan ketahanan sosial dan budaya serta ketahanan ekologi
5.	MISI 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.	Misi 8: Menerapkan kesinambungan Pembangunan  Misi 6: Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan

### 1.3.7 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 memperhatikan RTRW Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan RPJMD, terhadap ketentuan rencana struktur ruang, pola ruang dan arahan pemanfaatan ruang RTRW Kabupaten Rejang Lebong. RTRW menjadi acuan bagi kebijakan RPJMD yang akan mempengaruhi penataan ruang pada Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan arahan dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong 2012-2032, yang berusaha dicapai adalah pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Pembangunan berusaha dilaksanakan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan atau dengan kata lain dengan memperhatikan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.

#### a. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Rejang Lebong mengatur tentang pusat-pusat kegiatan yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah. Pusat kegiatan

terwujud sebagai sistem perkotaan yang terdiri dari PKW, PKL, PPK dan PPL. PWK telah ditetapkan dalam RTRW yaitu Kota Curup, sedangkan PKL pada Kabupaten Rejang Lebong adalah Kota Padang.

b. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang Kabupaten Rejang Lebong mengatur tentang pola ruang kawasan lindung dan budidaya dengan memperhatikan kawasan yang telah ditetapkan oleh nasional dan provinsi.

**1.3.8 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 2025-2029**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029 juga mencakup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Keterkaitan RPJMD dengan KLHS ini dimaksudkan agar pembangunan dapat memperhatikan dampak sesuai dengan isu prioritas pada KLHS.

**Tabel 1. 5**  
**Keselarasn antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan KLHS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029**

No.	RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029	KLHS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029
1.	MISI1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional	ISU PRIORITAS : Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang baik
2.	MISI 2 : Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	ISU PRIORITAS : Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengembangan ekowisata, serta peningkatan daya dukung lingkungan terhadap sektor pertanian dan perkebunan.
3.	MISI 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.	ISU PRIORITAS : Peningkatan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial
4.	MISI 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdayasaing dengan mengutamakan Transformasi Digital yang didukung generasi muda	ISU PRIORITAS : Peningkatan stabilitas sosial melalui pemberdayaan UMKM berbasis teknologi dan pelestarian budaya lokal dalam pembangunan berkelanjutan
5.	MISI 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.	ISU PRIORITAS : Meningkatkan pembangunan ekonomi hijau dengan mengutamakan keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam

Sumber: KLHS Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029, diolah

### 1.3.9 Hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan panduan strategis pembangunan daerah selama lima tahun yang berperan sebagai rujukan utama dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah. Dokumen ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan berbagai rencana di tingkat nasional, provinsi, maupun sektoral, sehingga tercipta sinergi dan kesinambungan pembangunan. Integrasi ini juga menjadi langkah penting untuk mencegah duplikasi program, memaksimalkan sumber daya, dan memastikan tujuan pembangunan daerah selaras dengan arah pembangunan nasional.

Keterpaduan tersebut diwujudkan melalui sinkronisasi RPJMD dengan beberapa dokumen kunci, antara lain:

1. Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

RPJMD memastikan bahwa kebijakan daerah mendukung pencapaian 17 tujuan/*goals Sustainable Development Goals (SDG's)* melalui pengintegrasian indikator dan target pembangunan berkelanjutan dalam seluruh program strategis daerah, yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, dan tata kelola pemerintahan.

2. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG).

RPJMD menjadi dokumen dalam keterpaduan kebijakan antara rencana strategis daerah dengan program teknis di bidang pangan dan gizi. Juga menjadi instrumen untuk menjamin ketersediaan pangan, pemerataan distribusi, dan perbaikan gizi masyarakat secara berkelanjutan, selaras dengan tujuan nasional di bidang pangan dan gizi.

3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD).

RPJMD mengarusutamakan target dan strategi RPKD dalam kebijakan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan secara terukur melalui program lintas sektor yang berkelanjutan. Selain itu dapat mengarahkan pemerintah daerah untuk menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai fokus utama dalam setiap tahap perencanaan dan penganggaran, sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

4. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

RPJMD mensinergikan arah kebijakan dan target GDPK yang termuat pada peta jalan GDPK dan rencana aksi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas penduduk dan pemanfaatan bonus demografi untuk pembangunan berkelanjutan.

#### 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan instrumen perencanaan strategis yang dirancang dengan maksud untuk menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam kerangka tujuan, sasaran, dan kebijakan pembangunan yang terukur. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap isu-isu strategis daerah, serta memuat langkah-langkah sistematis dan terstruktur untuk mencapai target pembangunan melalui program-program prioritas yang dilaksanakan secara bertahap selama lima tahun.

Secara spesifik, tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dapat dirinci sebagai berikut:

1. Implementasi Visi dan Misi Kepala Daerah:

RPJMD berfungsi sebagai dokumen operasional yang mentransformasikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong ke dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh upaya pembangunan selaras dengan prioritas kepemimpinan daerah.

2. Pedoman Perencanaan Strategis bagi Perangkat Daerah :

RPJMD menjadi acuan utama bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dokumen ini memandu perumusan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas RPJMD, sekaligus meningkatkan kinerja pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

3. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Pembangunan :

RPJMD dirancang untuk memperkuat keterkaitan, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi pembangunan antara perangkat daerah, serta antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya.

4. Acuan bagi Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*):

RPJMD berperan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, dalam mendukung pencapaian target kinerja program prioritas. Dokumen ini juga menjadi dasar untuk mengalokasikan sumber pendanaan guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

5. Indikator Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintahan:

RPJMD berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong. Melalui dokumen ini, pencapaian kinerja pembangunan dapat dievaluasi secara objektif, transparan, dan akuntabel.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 berisi:

### **BAB I . PENDAHULUAN**

#### **1.1. LATAR BELAKANG**

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

#### **1.2. DASAR HUKUM**

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

#### **1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA**

Menjelaskan hubungan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya.

#### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong bagi daerah.

#### **1.5. SISTEMATIKA PENULISAN**

Memuat sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029.

### **BAB II. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Bagian ini menyajikan analisis mendalam dan sistematis mengenai kondisi umum daerah, yang mencakup aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Analisis ini menjadi landasan fundamental untuk memahami konteks pembangunan daerah serta merumuskan kebijakan dan program yang efektif, terarah, dan berkelanjutan.

#### **2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

##### **2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Bagian ini menguraikan secara rinci kondisi geografis Kabupaten Rejang Lebong, meliputi topografi, iklim, potensi pengembangan wilayah, serta identifikasi area rawan bencana. Selain itu, dipaparkan pula analisis demografis yang mencakup struktur, distribusi, dan dinamika kependudukan. Data seperti kepadatan penduduk, komposisi usia, dan tren migrasi menjadi dasar untuk merancang kebijakan pembangunan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah. Bagian ini membahas kondisi kesejahteraan melalui tiga dimensi utama:

1. **Pemerataan Ekonomi:** Analisis mendalam mengenai tingkat kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang adil.
2. **Kesejahteraan Sosial:** Evaluasi aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial yang berkualitas.
3. **Seni, Budaya, dan Olahraga:** Peran sektor budaya dan olahraga dalam meningkatkan kualitas hidup dan identitas masyarakat.

### 2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan faktor krusial dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagian ini menganalisis empat pilar utama daya saing:

1. **Kemampuan Ekonomi Daerah:** Potensi sektor unggulan dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. **Fasilitas Wilayah/Infrastruktur:** Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung ekonomi, seperti transportasi, energi, dan komunikasi.
3. **Iklm Berinvestasi:** Kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim investasi yang kondusif.
4. **Sumber Daya Manusia:** Kualitas tenaga kerja, tingkat produktivitas, dan upaya pengembangan kapasitas manusia.

### 2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Bagian ini mengkaji dua jenis layanan:

1. **Layanan Wajib:** Pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah.
2. **Layanan Pilihan:** Pelayanan tambahan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan spesifik daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

### 2.1.5. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah

Di sini disajikan permasalahan yang melingkupi BUMD, langkah-langkah yang telah diambil untuk menyelesaikan berbagai problematika yang melingkupinya, serta rencana tindak revitalisasi BUMD.

## **2.2. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**

Sub bagian ini menguraikan kondisi keuangan daerah, asumsi perencanaan pembangunan, dan kebijakan pengelolaan keuangan untuk lima tahun mendatang. Struktur keuangan daerah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **2.2.1. Realisasi Keuangan Daerah 2020-2024**

Di sini menyajikan evaluasi komprehensif kinerja keuangan daerah selama lima tahun terakhir, mencakup pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta analisis Neraca Daerah. Tren pertumbuhan pendapatan dan belanja daerah menjadi dasar untuk proyeksi keuangan yang realistis dan berkelanjutan.

### **2.2.2. Implikasi Kebijakan**

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu meliputi proporsi penggunaan anggaran dan hasil pembiayaan. Bagian ini juga mengidentifikasi tantangan dan pelajaran yang dapat dijadikan acuan untuk perbaikan kebijakan keuangan di masa mendatang.

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Analisis ini mencakup sumber pendapatan, alokasi belanja, dan strategi pembiayaan untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan mendukung prioritas pembangunan.

## **2.3. Permasalahan dan Isu Strategis**

Sub bagian ini mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang menjadi dasar perumusan visi, misi, dan kebijakan pembangunan. Isu-isu strategis disusun berdasarkan analisis mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan pembangunan.

### **2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II dan laporan KLHS RPJMD ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

### **2.3.2. Isu Strategis Daerah**

Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung.

## **BAB III. VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

### **3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

#### **3.1.1. Visi dan Misi**

Menjelaskan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 2025–2029.

### **3.1.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur.

## **3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah**

### **3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Bagian ini menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah.

### **3.2.2. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029**

Dalam bab ini termuat program prioritas pembangunan yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan prioritas dan sumber daya yang tersedia. Program pembangunan daerah dilengkapi beserta indikator kinerja, target, dan pagu indikatif anggaran. Program-program tersebut disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, dengan penjelasan peran masing-masing perangkat daerah sebagai penanggung jawab.

## **BAB IV. PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

### **4.1. Program Perangkat Daerah**

Bagian ini menyajikan Program Perangkat Daerah dan dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

Sub bab ini berisi indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD), Indikator ini menjadi alat evaluasi pencapaian visi, misi, Tujuan dan sasaran serta kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam periode RPJMD 2025-2029.

## **BAB V. PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya periode RPJMD 2025–2029. Hal ini mencakup mekanisme evaluasi, pelaporan, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.

## **BAB III**

### **VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **3.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**

##### **3.1.1 VISI DAN MISI**

Kabupaten Rejang Lebong, sebagai salah satu daerah yang kaya akan potensi alam, budaya, dan sumber daya manusia di Provinsi Bengkulu, telah menetapkan Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2025–2029. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi visi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD 2025-2029 adalah "**Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan**".

Visi ini menjadi landasan utama dalam mengarahkan pembangunan daerah yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, juga mencerminkan komitmen kuat Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing. Adapun penjelasan masing-masing elemen visi adalah sebagai berikut:

##### **1. Maju:**

Mempunyai pengertian bahwa pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu ini, selalu dilandasi keinginan dan komitmen bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan yang lebih baik dari sisi perekonomian, sosial, budaya, infrastruktur, dalam mewujudkan akselerasi pembangunan ke arah yang lebih baik dengan semakin meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing sehingga tercapai kesejahteraan seluruh masyarakat.

##### **2. Mandiri:**

Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang selalu berpikir positif, produktif, punya etos dan semangat kerja yang tinggi, dan mampu berusaha dengan mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara berkelanjutan berdaya guna dan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraannya.

##### **3. Berakhlak:**

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong berakhlak yang religius memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif, bijaksana yang tercermin dalam perilaku menjunjung tinggi kesucian agama yang dianut serta menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila.

#### 4. Berkelanjutan:

Semangat untuk membangun Kabupaten Rejang Lebong yang bersinergi dan keberlanjutan pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan yang berorientasi *green economic* sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dapat terjaga.

Visi Kabupaten Rejang Lebong merepresentasikan komitmen kolektif yang terintegrasi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan secara merata, dengan fokus pada optimalisasi potensi lokal melalui pendekatan multidimensi. Tekad ini diwujudkan melalui akselerasi pembangunan infrastruktur permukiman dan konektivitas wilayah, serta penguatan sarana prasarana fisik strategis yang berbasis pada karakteristik geografis dan sosio ekonomi daerah. Prioritas utama tertuju pada peningkatan kemandirian ekonomi melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai motor penggerak, diiringi eksplorasi sektor ekonomi potensial inklusif seperti agrowisata dan ekonomi kreatif berbasis digital. Sinergi antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi ini diharapkan menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan inklusif serta mengurangi disparitas antarsektor.

Untuk memberikan panduan konkret dan rinci yang berfokus pada tindakan, strategi dan pendekatan dalam upaya perwujudan Visi RPJMD maka ditetapkan 5 misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 sebagai upaya perwujudan visi, sebagai berikut :

- Misi 1 : Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional.
- Misi 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah.
- Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.
- Misi 4 : Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah.
- Misi 5 : Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing.

Adapun Penjabaran untuk masing-masing misi diatas adalah sebagai berikut :

##### **MISI PERTAMA:**

Dalam melaksanakan Misi ini, penekanannya adalah reformasi birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dimana Bupati Rejang Lebong akan mengelolah tata pemerintahan yang baik harus dilaksanakan oleh birokrat-birokrat yang handal, dapat dipercaya dan didukung oleh sumber daya manusia yang ahli sesuai dengan bidang dan ahlinya. Sumberdaya manusia

dan aparatur sipil juga harus berakhlak dan berintegritas serta etos kerja yang tinggi mengutamakan profesionalitas dan kerjasama saling mendukung untuk keberhasilan bersama.

**MISI KEDUA:**

Dalam melaksanakan Misi kedua ini, penekanannya adalah Bagaimana memajukan daerah sehingga mampu bersaing dengan daerah lain. Dalam hal ini pertumbuhan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ke depan berbasis pada perluasan wawasan pengetahuan, pengalaman rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan ramah lingkungan. Selanjutnya pertumbuhan daerah juga memperhatikan semua potensi dan daya dukung daerah yang dapat dimanfaatkan di kabupaten Rejang Lebong. Seperti potensi pertambangan, tanah yang subur, pemandangan alam yang indah dan lain sebagainya.

**MISI KETIGA:**

Dalam melaksanakan Misi ketiga ini, penekanannya adalah pembangunan sarana dan prasarana fisik daerah. Pemerataan pembangunan infrastruktur daerah terus ditingkat disetiap kecamatan yang ada di kabupaten Rejang Lebong, pemerataan pembangunan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah, memperkecil kesenjangan antarwilayah. Selanjutnya pemantapan dan pemerataan kualitas pelayanan dasar meliputi : pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

**MISI KEEMPAT:**

Untuk melaksanakan Misi keempat ini, penekanannya adalah stabilitas perekonomian dan daya saing daerah dengan melibatkan semua unsur dan SDM yang ada terutama generasi muda (Gen Z). Dengan stabilitas yang terjaga dan kemandirian serta daya saing yang tinggi sehingga pertumbuhan berbasis pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta ekonomi kreatif dapat terus meningkat. Dalam melaksanakan usaha dan bisnis memanfaatkan transformasi digital yaitu proses yang diterapkan secara kolektif untuk mengintegrasikan teknologi digital disemua bidang bisnis dan tetap memperhatikan wawasan lingkungan hijau.

**MISI KELIMA:**

Untuk melaksanakan Misi yang kelima ini, penekanannya adalah kontinuitas dan keberlanjutan sebagai suatu mata rantai yang harus tetap dijaga keberlangsungannya. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan dan kecukupan ekonomi. Dalam prosesnya dilakukan pelestarian aset berupa pembangunan sumber daya alam dengan pengelolaan yang ramah lingkungan berbasis ekonomi hijau untuk yang mendukung kehidupan bermasyarakat serta sosiokultural sesuai dengan karakteristik daerah.

### 3.1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Rejang Lebong periode 2025–2029 harus diuraikan secara terstruktur dan terukur ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Proses ini menjadi kunci utama dalam merancang program-program strategis yang efektif dan terarah. Tujuan menggambarkan kondisi ideal yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan, mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Perumusan tujuan dilakukan melalui analisis mendalam terhadap potensi daerah, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan masyarakat, dengan tetap mempertimbangkan keselarasan terhadap prioritas nasional dan regional. Di sisi lain, sasaran dirancang sebagai indikator kinerja yang konkret, yang menunjukkan sejauh mana tujuan tersebut telah tercapai. Sasaran ini merupakan hasil dari *outcome* program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, sehingga mencerminkan dampak nyata dari setiap kegiatan pembangunan. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar mendukung terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya untuk memastikan keterpaduan, konsistensi, dan keterukuran antar elemen perencanaan tersebut, maka hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel berikut ini. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman serta menjadi acuan dalam penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan yang lebih operasional.

**Tabel 3.1.**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029**

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN						KET (11)
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	
<b>Visi : Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan</b>										
<b>Misi 1</b>										
Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional.	T1 : Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang berkualitas	S1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	B (65.68)	B (66.94)	B (67.57)	B (68.21)	B (69.47)	B (70.10)	
			11 : Nilai SAKIP	B (63.75)	B (66.52)	B (69.29)	BB (72.07)	BB (74.84)	BB (77.61)	
			12 : Indeks Profesionalitas ASN	61.81	64.9	68.15	71.56	75.14	78.89	
			13 : Indeks SPBE	3.39	3.47	3.55	3.63	3.71	3.79	
			14 : Predikat Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			11 : Indeks Kepuasan Masyarakat	84.68	85.47	86.27	87.06	87.86	88.66	
<b>Misi 2</b>										
Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	T2 : Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi	4.5-4.8	4.8-5.0	5.0-6.5	5.11-6.8	5.23-7.0	5.3-7.2	

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN						KET (11)
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	
		S2.1 : Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan pariwisata	11 : Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	32.89	33.26	33.63	34.00	34.37	34.74	
			12: Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	
		S2.2 : Meningkatkan investasi daerah	1.1. Nilai Investasi Daerah (Miliar Rupiah)	100.890	106.232	111.858	117.781	124.018	130.586	
		S3.3 : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	1.1. Tingkat Kemiskinan	14.14-14.51	13.77-14.14	13.41-13.77	13.04-13.41	12.67-13.04	12.30-12.67	
			1.2. Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah)	50.66	56.96	59.49	62.15	64.95	68.53	
			1.3. Rasio Gini	0.279-0.292	0.279-0.291	0.279-0.290	0.279-0.289	0.279-0.288	0.278-0.286	
		S3.4 : Menurunnya angka pengangguran	1.1. Tingkat Pengangguran Terbuka	2.30-2.40	2.28-2.39	2.26-2.38	2.22-2.36	2.20-2.35	2.18-2.33	

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN						KET (11)
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)	
Misi 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Pelayanan Infrastruktur Daerah	T3.1 : Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar	S3.1 : Meningkatkan Pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata	Indeks Pembangunan Manusia	72.55-73.27	73.07-73.84	73.59-74.41	74.12-74.97	74.64-75.54	75.17-76.11	
			11 : Rata-rata lama sekolah	8.96-9.14	9.14-9.32	9.32-9.50	9.50-9.68	9.68-9.87	9.87-10.05	
			12 : Harapan Lama Sekolah	14.28-14.40	14.40-14.51	14.51-14.63	14.63-14.74	14.74-14.86	14.86-14.98	
		S3.2 : Meningkatkan Kesehatan yang merata dan berkualitas	11: Umur Harapan Hidup	69.68	69.91	70.14	70.37	70.6	70.83	
	T3.2 : Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Daerah		Indeks Infrastruktur Wilayah	20.94	24.94	28.94	32.94	36.94	40.94	
		S3.3 : Meningkatkan infrastrukturnya wilayah yang memadai dan merata	11 : Indeks Infrastruktur Wilayah	20.94	24.94	28.94	32.94	36.94	40.94	

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	INDIKATOR (4)	TARGET TAHUN						KET (11)	
				2025 (5)	2026 (6)	2027 (7)	2028 (8)	2029 (9)	2030 (10)		
<b>Misi 4</b> Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah	T4.1 : Meningkatnya Stabilitas Keamanan daerah	S4.1: Menurunnya angka kriminalitas daerah	T4 : 1. Angka Kriminalitas	10	10	10	10	10	10	9	
			11: Angka Kriminalitas	10	10	10	10	10	9		
	T4.2 : Terwujudnya peningkatan daya saing daerah	S4.1 : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan melalui UMKM dan Ekonomi Kreatif	T4.2 : Indeks Daya Saing Daerah	3.69	3.73	3.78	3.82	3.87	3.91		
			11 : Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	17.17	17.26	17.35	17.44	17.54	17.63		
<b>Misi 5</b> Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	T5 : Meningkatnya Ekonomi Hijau dan keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan	S5.1 : Terwujudnya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Kualitas Lingkungan	T5 : Indeks Ekonomi Hijau	58.49	58.93	59.36	59.795	60.23	60.67		
			11 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72.01	72.22	72.43	72.64	72.86	73.07		
			12 : Persentase Penurunan Emisi GRK	20.37	24.31	28.25	32.19	36.13	40.07		

Tujuan dan Sasaran Pembangunan dapat dijelaskan secara lebih terstruktur sebagai berikut :

**Misi 1: Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional**

Misi 1 menjadi fondasi krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Tujuan utama misi ini adalah **Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang berkualitas**, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Tujuan ini menekankan pentingnya birokrasi yang efisien, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang cepat dan responsif. Hal ini memerlukan penguatan kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Tujuan ini selaras dengan Asta Cita, khususnya: (1) mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (2) membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas; serta (4) meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui penguatan SDM aparatur. Tata kelola yang berkualitas menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sasaran konkret misi ini terbagi menjadi dua dimensi: (1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan, yang diukur melalui Nilai SAKIP, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks SPBE serta Predikat Opini BPK; (2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, yang diukur menggunakan indikator indeks kepuasan masyarakat.

**Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah**

Misi 2 berfokus pada penguatan kemandirian ekonomi (**Mandiri**) melalui optimalisasi sektor unggulan seperti pertanian organik, agrowisata, dan UMKM berbasis kearifan lokal. Tujuan utamanya adalah **Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah**, dengan indikator Pertumbuhan ekonomi. Tujuan ini menekankan pentingnya pengembangan sektor-sektor strategis yang menjadi kekuatan ekonomi lokal, seperti pertanian, pariwisata, industri kecil menengah, dan ekonomi kreatif, guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan nilai tambah dari sektor-sektor unggulan tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini selaras dengan Asta Cita 6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dengan menggerakkan sektor strategis yang dimiliki oleh daerah untuk menopang perekonomian nasional dari tingkat local.

Sasaran strategis misi ini mencakup: (1) Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan pariwisata, yang diukur melalui kontribusi PDRB sektor pertanian dan kontribusi PDRB sektor pariwisata; (2) Meningkatnya investasi daerah, indikator yang digunakan yaitu nilai investasi

daerah; (3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, diukur berdasarkan indikator tingkat kemiskinan, pendapatan per-kapita serta rasio gini; (4) Menurunnya angka pengangguran, yang diukur menggunakan indikator tingkat pengangguran terbuka.

### **Misi 3: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah**

Misi 3 bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pembangunan antarwilayah melalui peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan layanan publik. Tujuan utama misi ini adalah **Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar**, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, dan fasilitas dasar lainnya secara merata dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal dan perdesaan, sebagai prasyarat terciptanya masyarakat yang maju (**Maju**) dan berkeadilan (**Berakhlak**). Ketersediaan pelayanan dasar yang merata akan mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kesenjangan antardaerah. Tujuan ini sejalan dengan Asta Cita 3, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sasaran prioritas meliputi: (1) Meningkatnya pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata, dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) serta Harapan Lama Sekolah (HLS); (2) Meningkatnya Kesehatan yang merata dan berkualitas, yang diukur berdasarkan indikator Umur Harapan Hidup (UHH);

Tujuan kedua adalah **Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Daerah**, dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah. Pemerataan infrastruktur bukan hanya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan penting dalam mempercepat distribusi layanan publik dan mendukung pemerataan pembangunan antarkecamatan dan antarwilayah. Dengan infrastruktur yang memadai dan merata, mobilitas masyarakat dan barang dapat meningkat, mendorong efisiensi ekonomi, serta memperkuat keterpaduan wilayah. Tujuan ini sesuai dengan Asta Cita 5, yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Sasaran dari tujuan ini adalah Meningkatkan infrastruktur wilayah yang memadai dan merata, indikator yang digunakan yaitu Indeks Infrastruktur Wilayah.

### **Misi 4: Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah**

Misi 4 dirancang untuk memadukan modernisasi (**Maju**) dengan pelestarian identitas budaya (**Berakhlak**), sekaligus menjamin stabilitas sosial. Tujuan utamanya adalah **Meningkatnya Stabilitas Keamanan daerah**, dengan indikator Indeks Kriminalitas.

Keamanan dan ketertiban wilayah merupakan fondasi bagi seluruh proses pembangunan. Keamanan yang terjaga akan menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, dan memungkinkan aktivitas ekonomi serta sosial berjalan dengan lancar. Di samping itu, pelestarian budaya lokal sebagai kekuatan identitas daerah menjadi bagian penting dalam memperkuat stabilitas sosial dan ketahanan masyarakat. Tujuan ini selaras dengan Asta Cita 1, yaitu mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, serta mendukung ketahanan nasional dari tingkat lokal. Sasaran terukur meliputi: (1) Menurunnya angka kriminalitas daerah, yang diukur menggunakan Angka kriminalitas.

Tujuan kedua adalah **Terwujudnya peningkatan daya saing daerah** dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah. Daya saing daerah menjadi sangat penting dalam menghadapi persaingan global dan arus digitalisasi. Untuk itu, daerah harus mampu memanfaatkan potensi lokal, teknologi, dan kreativitas masyarakatnya guna menghasilkan produk dan layanan yang memiliki nilai tambah dan kompetitif. Dengan demikian, peningkatan daya saing daerah tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong kemandirian daerah dalam jangka panjang. Tujuan ini sejalan dengan Asta Cita 7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Sasaran dari tujuan ini adalah (1) Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan melalui UMKM dan ekonomi kreatif, diukur berdasarkan indikator Kontribusi sektor perdagangan terhadap PRDB; (2) Meningkatnya transformasi digital dan inovasi daerah, dengan indikator Indeks Inovasi Daerah.

#### **Misi 5: Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing**

Misi 5 menjadi puncak integrasi seluruh dimensi visi, dengan fokus pada keberlanjutan ekologis (**Berkelanjutan**) dan kemandirian energi (**Mandiri**). Tujuan utamanya adalah **Meningkatnya Ekonomi Hijau dan keseimbangan Lingkungan yang berkelanjutan**, dengan indikator Indeks Ekonomi Hijau. Tujuan ini mengandung makna bahwa pembangunan daerah harus memperhatikan kelestarian lingkungan, efisiensi sumber daya alam, dan pengendalian terhadap dampak negatif lingkungan. Konsep ekonomi hijau mendorong integrasi antara pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan, seperti melalui pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah terpadu, dan pelestarian hutan serta keanekaragaman hayati. Tujuan ini selaras dengan Asta Cita 8, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa, yang mencakup pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta mendorong masyarakat untuk hidup selaras dengan alam. Sasaran utama misi ini yaitu: (1)

Terwujudnya pengurangan Gas Rumah Kaca dan peningkatan kualitas lingkungan, keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta Persentase penurunan emisi GRK.

Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Keselarasan hubungan antara visi RPJMN, visi RPJMD Provinsi Bengkulu dengan visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Keselarasn Visi RPJMN 2025-2029, Visi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan Visi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029**

VISI RPJMN 2025-2029	VISI RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029	VISI RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029
<p><b>"Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"</b></p> <p>Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita setara negara-negara maju yang disertai kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, negara yang berdaulat dan berperan penting di dunia internasional, negara yang memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta negara yang berkomitmen menerapkan prinsip Pembangunan berkelanjutan.</p>	<p><b>"Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maju</b> : Provinsi Bengkulu telah mencapai tingkat pendapatan perkapita yang signifikan dalam GNI perkapita, kontribusi PDN Maritim, kontribusi PDB manufaktur dan berbagai aspek termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta kualitas hidup masyarakat</li> <li>• <b>Religius</b>: Setiap warga Bengkulu memiliki sikap dan prilaku yang taat terhadap nilai-nilai agama, toleran dan hidup rukun.</li> <li>• <b>Sejahtera</b>: Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak secara ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang baik sehingga warga Bengkulu dapat hidup layak secara fisik maupun non fisik.</li> <li>• <b>Berkelanjutan</b>: Upaya yang terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menciptakan warga provinsi Bengkulu yang bahagia.</li> </ul>	<p><b>"Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maju</b>: pembangunan Kabupaten Rejang Lebong selalu dilandasi keinginan dan komitmen bersama untuk menciptakan pertumbuhan dan perkembangan masa depan yang lebih baik sehingga tercapai kesejahteraan seluruh masyarakat.</li> <li>• <b>Mandiri</b>: Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang selalu berpikir positif, produktif, punya etos dan semangat kerja yang tinggi.</li> <li>• <b>Berakhlak</b>: memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana.</li> <li>• <b>Berkelanjutan</b>: bersinergi dan keberlanjutan untuk menjaga kesinambungan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan yang berorientasi <i>green economic</i> sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dapat terjaga.</li> </ul>

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Rejang Lebong yang telah disinkronkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Bengkulu serta RPJMN Tahun 2025-2029, maka penjabaran Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong adalah :

**Tabel 3.3**  
**Keselarasn Misi RPJMN 2025-2029, Misi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan Misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025-2029**

<b>MISI RPJMN 2025-2029</b>	<b>MISI RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029</b>	<b>MISI RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029</b>
<p><b>Prioritas Nasional 7 :</b> Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan</p> <p><b>Prioritas Nasional 1:</b> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)</p>	<p><b>Misi 1:</b> Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, akuntabel dengan membangun sumber daya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi, berbudaya, profesional serta religius</p>	<p><b>Misi 1:</b> Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional</p>
<p><b>Prioritas Nasional 3:</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>	<p><b>Misi 2:</b> Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat</p>	<p><b>Misi 2:</b> Meningkatkan Pertumbuhan dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah</p> <p><b>MISI 3 :</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah.</p>
<p><b>Prioritas Nasional 4:</b> Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan pemuda generasi Z), dan penyandang disabilitas</p>	<p><b>Misi 3:</b> Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dan demokratis, dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan rasa aman</p>	<p><b>Misi 3:</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah</p>

<b>MISI RPJMN 2025-2029</b>	<b>MISI RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029</b>	<b>MISI RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029</b>
<p><b>Prioritas Nasional 6 :</b> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p>		
<p><b>Prioritas Nasional 2</b> Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> <p><b>Prioritas Nasional 5:</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p>	<p><b>Misi 4:</b> Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan</p>	<p><b>Misi 4:</b> Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan mengutamakan Transformasi Digital dan inovasi daerah.</p>
<p><b>Prioritas Nasional 2:</b> Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> <p><b>Prioritas Nasional 8:</b> Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur</p>	<p><b>Misi 4:</b> Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan</p>	<p><b>Misi 5 :</b> Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing</p>

### 3.2. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

#### 3.2.1. STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang memuat langkah-langkah atau upaya sistematis yang akan dilakukan untuk merespons dinamika lingkungan, guna mencapai tujuan dan/atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi pembangunan yang dirumuskan harus mampu menjawab tantangan pembangunan daerah serta mengoptimalkan potensi lokal secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, strategi menjadi jembatan antara kebijakan makro dengan program dan kegiatan konkret yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah. Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029, dalam rangka mewujudkan visi **“Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan”**, disusun secara sistematis, terukur, dan responsif terhadap isu-isu strategis daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Tabel strategi ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga peta jalan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Melalui pendekatan *Sakato Plan*, sinergi antarprogram—seperti integrasi digitalisasi birokrasi dengan transformasi UMKM, atau pembangunan infrastruktur dengan pengembangan agrowisata—dijadikan fondasi untuk mencapai target 2029. Keselarasan dengan RPJMN 2025–2029 memperkuat kontribusi daerah terhadap tujuan nasional. Pemantauan evaluasi berkala dan alokasi anggaran berbasis kinerja akan menjadi kunci untuk memastikan implementasi yang efektif, sehingga visi pembangunan tidak hanya tertuang dalam tabel, tetapi terwujud sebagai warisan pembangunan yang bermakna bagi generasi mendatang. Adapun strategi pembangunan untuk masing-masing misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut

**Tabel 3. 4**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029**

No (1)	Visi/Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
<b>Visi : Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak, dan Berkelanjutan</b>				
1	Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang berkualitas	S1.1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	1. Menyusun roadmap reformasi birokrasi dan regulasi pendukung 2. Menyiapkan infrastruktur aplikasi layanan publik dan sistem merit ASN 3. Meluncurkan aplikasi pelayanan publik terintegrasi (Implementasi

No (1)	Visi/Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
	yang berakhlak dan Profesional			e-government terdiri dari e-SAKIP, e-LKPj, e-LKPD) 4. Pelatihan integritas dan etika aparatur, sertifikasi kompetensi, dan survei etika internal berkala 5. Penyempurnaan sistem aplikasi dan layanan publik digital
			S1.2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Melakukan pemetaan kebutuhan pelatihan ASN dan sertifikasi kompetensi; 2. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi integritas ASN secara bertahap; 3. Meningkatkan jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensi dan integritas; 4. Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat melalui survey dan perbaikan layanan; 5. Mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam perbaikan SOP layanan publik.
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	S2.1 : Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan pariwisata	1. Pembentukan cluster agrowisata terintegrasi 2. Pendampingan wirausaha dan ekonomi kreatif dibidang pariwisata dan pertanian 3. Fasilitasi akses pasar digital Kampanye <i>brand-building destinasi, digital marketing</i> , dan pengembangan fasilitas wisata ramah lingkungan.
			S2.2. : Meningkatnya investasi daerah	Penyusunan regulasi insentif dan kelembagaan ekonomi daerah, Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pendukung investasi (jalan usaha tani, irigasi, listrik desa), Penyederhanaan proses perizinan usaha melalui MPP dan OSS daerah serta Promosi potensi investasi melalui pameran lokal, media sosial kabupaten, dan katalog digital potensi daerah.
			S3.3 : Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat	1. Perluasan cakupan layanan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial

No (1)	Visi/Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
				<p>2. Peningkatan akses terhadap layanan kesejahteraan sosial melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat.</p> <p>3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan masyarakat, pengembangan kewirausahaan sosial dan pemberdayaan perempuan dalam ekonomi</p> <p>4. Peningkatan program bantuan sosial melalui perluasan program bantuan untuk keluarga miskin, perlindungan jaminan kesehatan dan pemberian bantuan alat untuk penyandang disabilitas.</p>
			S3.4 : Menurunnya angka pengangguran	<p>1. Peningkatan keterampilan dan pendidikan penduduk usia kerja melalui pelatihan keterampilan spesifik dan sertifikasi, penyuluhan dan <i>job matcing</i> serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja dengan dukungan operasional yang baik.</p> <p>2. Peningkatan pemberdayaan sektor pertanian melalui diversifikasi pangan dan pengembangan budidaya potensial. Kerjasama dalam peningkatan infrastruktur dan fasilitas untuk penyerapan tenaga kerja lokal</p> <p>3. Perluasan jaringan informasi lapangan kerja.</p>
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah	T3.1 : Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar	S3.1 : Meningkatnya Pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata	<p>1. Pemetaan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah kabupaten;</p> <p>2. Penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar dan menengah di wilayah pedesaan;</p> <p>3. Peningkatan kualitas guru (pelatihan, sertifikasi, distribusi merata);</p>

No (1)	Visi/Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
				<p>4. Penguatan program pendidikan nonformal dan kejar paket untuk menurunkan angka putus sekolah;</p> <p>5. Integrasi sistem pendidikan digital &amp; evaluasi sistem pemerataan akses pendidikan.</p>
			S3.2 : Meningkatnya Kesehatan yang merata dan berkualitas	<p>1. Pemetaan dan peningkatan layanan dasar kesehatan (puskesmas, posyandu, tenaga medis);</p> <p>2. Program intervensi gizi dan sanitasi untuk penurunan stunting dan penyakit menular;</p> <p>3. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak serta lansia;</p> <p>4. Digitalisasi layanan kesehatan dan integrasi sistem rujukan serta rekam medis elektronik;</p> <p>5. Perluasan jangkauan layanan BPJS daerah dan penguatan kesehatan promotif-preventif.</p>
		T3.2 : Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Daerah	S3.3 : Meningkatnya infrastruktur wilayah yang memadai dan merata	Percepatan pembangunan jalan dan jembatan, program listrik rumah tangga, sanitasi dan air bersih.
4.	Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah	T4.1 : Meningkatnya Stabilitas Keamanan daerah	S4 1: Menurunnya angka kriminalitas daerah	Pemetaan wilayah rawan kriminalitas dan peningkatan sinergi antar perangkat daerah dan aparat keamanan, peningkatan sarana dan prasarana keamanan (CCTV, penerangan, dan patroli terintegrasi), serta penguatan sistem pelaporan masyarakat berbasis teknologi dan evaluasi berkala kebijakan keamanan.
		T4.2 : Terwujudnya peningkatan daya saing daerah	S4.1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan melalui UMKM dan Ekonomi Kreatif	Pemetaan potensi dan kendala pelaku UMKM serta sektor ekonomi kreatif di kabupaten, Fasilitasi perizinan, pelatihan manajemen usaha, dan akses pembiayaan UMKM, Digitalisasi UMKM, pelatihan e-commerce, dan platform marketplace lokal

No (1)	Visi/Misi (2)	Tujuan (3)	Sasaran (4)	Strategi (5)
			S4.2 : Meningkatnya transformasi Digital dan Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan akses teknologi informasi</li> <li>2. Penguatan sistem inovasi daerah termasuk dukungan terhadap riset dan pengembangan berbasis potensi lokal.</li> <li>3. Mendorong inovasi dalam pelayanan dan kebijakan publik</li> </ol>
5.	Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	T5 : Meningkatkan Ekonomi Hijau dan keseimbangan Lingkungan yang berkelanjutan	S5.1 : Terwujudnya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Kualitas Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan Tata Kelola Lingkungan Hidup</li> <li>2. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi lahan kritis dan kawasan hutan, serta perlindungan kawasan konservasi dan ekosistem penting.</li> <li>3. Pengelolaan sampah terpadu dan kampanye <i>net-zero</i>.</li> </ol>

### 3.2.2. STRATEGI PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

#### 3.2.2.1 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Dalam konteks ini, Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi instrumen krusial untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat secara merata, selaras dengan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan pemenuhan kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM, artinya sejak dari proses awal perencanaan program di daerah, harus memberikan prioritas kepada program-program pelayanan dasar dalam konteks SPM untuk memastikan SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat untuk menerima pelayanan dasar dalam tingkatan minimal. Selanjutnya akan diuraikan strategi integrasi SPM ke dalam perencanaan pembangunan daerah, mulai dari kerangka hukum hingga implementasi teknis.

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 mentransformasi SPM menjadi program konkret dengan output yang jelas dan terukur. Pada sektor pendidikan, mewujudkan target rasio guru-siswa yang ideal melalui rekrutmen guru honorer dan pelatihan kompetensi. Di bidang kesehatan, peningkatan cakupan imunisasi dasar dengan penguatan digitalisasi pelayanan Posyandu yang sistematis. Kemudian di sektor infrastruktur, Pembangunan jaringan pipa air bersih, misalnya, tidak hanya mengejar target akses 90% rumah tangga, tetapi

juga mempertimbangkan keberlanjutannya. Sementara itu, program perumahan layak huni bagi masyarakat miskin dirancang berbasis database yang ada untuk memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran.

Integrasi SPM dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya berdampak lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SPM dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 bukan sekadar daftar target, melainkan untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, tidak merasakan keadilan dalam akses layanan dasar.

### 3.2.2.2 Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

*Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda transformatif global yang diadopsi oleh 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia, melalui Resolusi PBB A/RES/70/1 (2015). Di Indonesia, TPB/SDGs diinternalisasi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Roadmap TPB/SDGs 2030, yang menyelaraskan target global dengan prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem (target 0% pada 2024) dan transisi energi ( porsi EBT 23% pada 2025). Regulasi ini diperkuat oleh RPJPN Tahun 2025-2045 yang menetapkan SDG's sebagai *mainstream* kebijakan pembangunan, dengan indikator kinerja terukur seperti penurunan indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) dari 1,84 (2023) menjadi 1,2 (2030).

Untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun strategi pencapaian target SDGs dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 sesuai dengan 17 tujuan SDGs yang dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. 5**  
**Strategi Pencapaian SDG's dalam RPJMD 2025-2029**

Tujuan SDGs	Strategi Pencapaian Target SDGs dalam RPJMD Rejang Lebong
<b>SDG 1: Tanpa Kemiskinan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperluas program pemberdayaan UMKM dengan pelatihan keterampilan dan akses permodalan.</li> <li>Mengembangkan agrowisata berbasis komunitas untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.</li> </ol>
<b>SDG 2: Tanpa Kelaparan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan produktivitas pertanian melalui teknologi ramah lingkungan.</li> <li>Membangun sistem distribusi pangan yang efisien untuk mengurangi ketergantungan impor.</li> </ol>
<b>SDG 3: Kesehatan dan Kesejahteraan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memperluas cakupan layanan kesehatan dasar ke daerah terpencil.</li> <li>Meningkatkan program sanitasi dan air bersih untuk mengurangi penyakit berbasis lingkungan.</li> </ol>
<b>SDG 4: Pendidikan Berkualitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Membangun sarana pendidikan di wilayah terpencil dan meningkatkan kualitas guru.</li> <li>Mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pembelajaran.</li> </ol>

<b>Tujuan SDGs</b>	<b>Strategi Pencapaian Target SDGs dalam RPJMD Rejang Lebong</b>
<b>SDG 5: Kesetaraan Gender</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan pelatihan khusus perempuan dalam pengelolaan UMKM.</li> <li>2. Mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.</li> </ol>
<b>SDG 7: Energi Bersih</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan energi mikrohidro dan tenaga surya untuk daerah terisolasi.</li> <li>2. Mendorong penggunaan energi terbarukan di fasilitas publik.</li> </ol>
<b>SDG 8: Pekerjaan Layak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata.</li> <li>2. Menyelenggarakan pelatihan vokasional berbasis kebutuhan pasar.</li> </ol>
<b>SDG 9: Infrastruktur dan Inovasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun infrastruktur jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas.</li> <li>2. Mendorong inovasi teknologi dalam pengelolaan UMKM dan pertanian.</li> </ol>
<b>SDG 11: Kota Berkelanjutan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengelolaan limbah padat dan cair berbasis masyarakat.</li> <li>2. Mengembangkan ruang terbuka hijau di perkotaan dan pedesaan.</li> </ol>
<b>SDG 13: Penanganan Iklim</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan program penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis</li> <li>2. Mengintegrasikan kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan.</li> </ol>
<b>SDG 16: Lembaga yang Kuat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat transparansi anggaran melalui platform digital.</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam pelayanan publik berbasis integritas.</li> </ol>
<b>SDG 17: Kemitraan Global</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk pendanaan infrastruktur.</li> <li>2. Berkolaborasi dengan perguruan tinggi dalam riset pembangunan berkelanjutan.</li> </ol>

### **3.2.2.3 Pengarusutamaan Gender**

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi kunci untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh tahapan perencanaan dan implementasi program mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan diarahkan untuk menurunkan ketimpangan capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, memperkuat agency dan mendorong peran aktif perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta membangun tata kelola pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender yang efektif dan berkelanjutan, melalui (a) peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan; (b) penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan; (c) peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan; (d) pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan; serta (e) penguatan tata kelola dan pelembagaan pengarusutamaan gender dalam proses pembangunan .

Pada Kabupaten Rejang Lebong, PUG tidak hanya menjadi komitmen normatif, tetapi juga diwujudkan melalui program-program konkret dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Berdasarkan data BPS Kabupaten Rejang Lebong (2024), Indeks Pembangunan Gender (IPG) berada pada angka 94.31, sementara Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mencapai 64,53. Beberapa isu krusial yang menghambat kesetaraan gender meliputi:

1. Partisipasi Politik: Hanya 20% kursi legislatif diduduki Perempuan (data BPS).
2. Kesenjangan Ekonomi dari segi Pendapatan di sektor informal antara Perempuan dan laki-laki.
3. Kesenjangan Akses Pendidikan dari segi Angka partisipasi sekolah, perempuan di wilayah pedesaan lebih rendah dibanding laki-laki.

Tantangan ini memerlukan intervensi sistematis, yang diintegrasikan ke dalam program pembangunan di RPJMD 2025–2029. Berikut strategi Pengarusutamaan Gender yang terkait dengan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah:

1. Penguatan Kebijakan dan Regulasi.
2. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender.
3. Peningkatan Kapasitas dan Kesadaran Gender.
4. Peningkatan Partisipasi Perempuan.

#### **3.2.2.4 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Kabupaten Rejang Lebong, masih menghadapi tantangan multidimensi dalam hal aksesibilitas, partisipasi sosial, dan perlindungan hak. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, negara wajib menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka, termasuk pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan aksesibilitas fisik/non-fisik. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Inklusi Disabilitas, yang menekankan pendekatan berbasis hak (*rights-based appro*).

Strategi pemenuhan hak penyandang disabilitas dengan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah:

1. Pemetaan dan pendataan terpadu.
2. Penguatan ketrampilan dan pelatihan vokasional.
3. Dukungan aksesibilitas dan alat bantu.
4. Peningkatan aksesibilitas sekolah.
5. Bantuan pendidikan dan beasiswa.
6. Kampanye sosialisasi dan kesadaran.

Implementasi strategi diharapkan menurunkan angka pengangguran penyandang disabilitas di Kabupaten Rejang Lebong dan meningkatkan partisipasi pendidikan formal. Pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi investasi sosial untuk membangun masyarakat inklusif.

#### **3.2.2.5 Pengarusutamaan Hak Anak**

Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) merupakan strategi sistematis untuk memastikan integrasi hak anak dalam seluruh tahap pembangunan, mulai dari penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Implementasi PUHA di Kabupaten Rejang Lebong bukan hanya kewajiban regulasi, tetapi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi unggul. Dengan memadukan pendekatan regulasi, teknologi, dan partisipasi Masyarakat.

Strategi Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 antara lain:

1. Penguatan Sistem Perlindungan Anak.
2. Pendidikan Inklusif dan Partisipatif.
3. Pencegahan Perkawinan Anak.
4. Infrastruktur dan Layanan Kesehatan.
5. Dukungan Regulasi dan Anggaran

#### **3.2.2.6 Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon**

Kabupaten Rejang Lebong, sebagai daerah dengan tutupan hutan mencapai 65% (BPS, 2023), memiliki peran strategis dalam mendukung target nasional melalui integrasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam RPJMD 2025–2029. Berikut strategi konkret PRK yang diintegrasikan dengan program prioritas:

1. Pengelolaan Limbah Terpadu
2. Pemulihan Lahan Berkelanjutan
3. Pengembangan Industri Hijau

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2025–2029 telah mengadopsi pendekatan PRK secara holistik, tidak hanya sebagai upaya mitigasi iklim, tetapi juga sebagai strategi pembangunan ekonomi berkelanjutan, dengan sinergi antar program prioritas, dukungan regulasi, dan komitmen anggaran.

#### **3.2.2.7 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah**

Kemiskinan di Kabupaten Rejang Lebong tercatat sebesar 14,65% pada 2024 (BPS), dengan 22% rumah tangga mengalami kerentanan multidimensi, termasuk akses terbatas ke pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan

penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Berbagai kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan telah diluncurkan pemerintah. Guna mendukung efektivitas koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dibentuk kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan.

Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Dalam kerangka kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mengembangkan infrastruktur.
2. Meningkatkan akses dan kualitas kesehatan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
4. Fasilitasi bantuan untuk menurunkan beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan.
5. Fasilitasi bantuan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui program ekonomi produktif.
6. Updating verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional/ DTSEN).

### **3.2.3. ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Dengan demikian, tema pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong, meliputi:

1. Akselerasi infrastuktur dasar dan infrastuktur strategis.
2. Penguatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, pengembangan agrowisata dan budaya lokal.
3. Integrasi pengembangan SDM dan sistem keamanan terpadu.
4. Akselerasi transformasi digital dan ekonomi kreatif.
5. Integrasi ekonomi hijau dalam pembangunan daerah dan pemerataan Indeks Pembangunan Manusia antar wilayah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2025-2029) disajikan pada Gambar berikut ini.



Gambar 3. 1  
Tema/Fokus Pembangunan Lima Tahunan  
Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penahapan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2026-2030 adalah :

**Tabel 3. 6**  
**Penahapan Pembangunan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029**

<b>TAHAP I (2026)</b>	<b>TAHAP II (2027)</b>	<b>TAHAP III (2028)</b>	<b>TAHAP IV (2029)</b>	<b>TAHAP V (2030)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
Membangun dasar kelembagaan dan infrastruktur reformasi birokrasi melalui <i>roadmap</i> reformasi birokrasi	Membangun kapasitas pelayanan publik melalui penerapan sistem digitalisasi layanan sektor prioritas serta partisipasi masyarakat	Meningkatkan cakupan dan kualitas sistem pelayanan publik	Mengoptimalkan implementasi sistem pelayanan publik serta kualitas tata kelola pemerintahan	Memperkuat sistem manajemen kinerja berbasis hasil serta keberlanjutan reformasi birokrasi
Memetakan dan menyusun fondasi pengembangan Agrowisata dan UMKM Unggulan	Meningkatkan infrastruktur pendukung serta digitasilisasi ekonomi lokal	Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dan sertifikasi produk unggulan dan destinasi wisata	Memperkuat daya saing produk serta memperluas ekspansi pemasaran produk	Menyusun kebijakan keberlanjutan ekonomi dan daya saing berbasis agrowisata dan UMKM yang berkelanjutan

TAHAP 1 (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menyusun perencanaan strategis yang berbasis kebutuhan infrastruktur dasar	Membangun infrastruktur dasar dan digitalisasi pelayanan dasar	Memperluas cakupan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah tertinggal serta memperkuat kualitas infrastruktur dasar	Menjamin fungsionalitas dan keberlanjutan infrastruktur yang dibangun	Mengkonsolidasi capaian pembangunan serta evaluasi dampak pelayanan dasar
Menyiapkan peta jalan penguatan stabilitas keamanan lokal dan identifikasi potensi budaya lokal serta sektor ekonomi kreatif yang mendukung pengembangan UMKM	Mengembangkan infrastruktur dan sarana pendukung pelestarian budaya lokal serta peningkatan keamanan berbasis partisipasi masyarakat	Mendorong sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan event budaya dan ekonomi kreatif, serta peningkatan kapasitas pelaku UMKM berbasis kearifan lokal	Memperkuat branding dan pemasaran produk ekonomi kreatif serta budaya lokal yang berorientasi ekspor dan pariwisata	Menyusun kebijakan dan regulasi keberlanjutan stabilitas keamanan, pelestarian budaya, dan pengembangan UMKM serta ekonomi kreatif secara inklusif dan berkelanjutan
Menyusun peta jalan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau berbasis potensi lokal	Penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup serta penerapan energi terbarukan	Mendorong kolaborasi multipihak dalam konservasi lingkungan	Penguatan tata kelola sumber daya alam dan pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular	Penetapan kebijakan jangka panjang pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau yang inklusif

### 3.2.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025: Akselerasi infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada akselerasi pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis sebagai upaya untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, meningkatkan konektivitas wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini diarahkan untuk mengatasi ketimpangan infrastruktur antarwilayah, memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, serta memperkuat dukungan infrastruktur terhadap sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, pariwisata, dan UMKM. Pembangunan infrastruktur dasar meliputi peningkatan kualitas dan cakupan layanan jalan desa, air bersih, sanitasi, listrik, dan perumahan layak huni, khususnya di wilayah

perdesaan dan daerah terpencil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan antarwilayah.

Sementara itu, pengembangan infrastruktur strategis diarahkan untuk menunjang konektivitas ekonomi dan membuka akses terhadap kawasan pertanian produktif, destinasi wisata unggulan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Termasuk di dalamnya pembangunan jalan penghubung antarkecamatan, revitalisasi pasar tradisional, serta penguatan infrastruktur pendukung logistik dan transportasi. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti sistem informasi pengelolaan jalan dan perencanaan berbasis digital, serta membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta melalui skema pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan arah kebijakan ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Rejang Lebong dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat transformasi ekonomi lokal, serta menciptakan pertumbuhan wilayah yang lebih merata dan berdaya saing.

### **3.2.3.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2026: Penguatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, pengembangan agrowisata dan budaya lokal**

Pada tahun 2026, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong difokuskan pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan potensi agrowisata dan pelestarian budaya lokal sebagai pilar utama penggerak pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi sumber daya alam dan kearifan lokal yang kuat, khususnya di sektor pertanian, perkebunan, dan budaya. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengoptimalkan potensi tersebut melalui strategi pemberdayaan masyarakat, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta penguatan kelembagaan ekonomi rakyat seperti koperasi, BUMDes, kelompok tani, dan UMKM.

Pengembangan agrowisata menjadi fokus penting dalam arah kebijakan ini. Sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata tidak hanya membuka peluang usaha baru bagi masyarakat desa, tetapi juga mendorong diversifikasi ekonomi daerah. Pengembangan kawasan agrowisata yang terpadu dengan infrastruktur pendukung serta promosi digital diharapkan mampu menarik wisatawan sekaligus mengangkat produk lokal ke pasar yang lebih luas.

Selain itu, pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya lokal, baik dalam bentuk seni, tradisi, maupun situs sejarah, menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah. Budaya tidak hanya dijaga sebagai identitas daerah, tetapi juga didorong sebagai aset ekonomi kreatif yang memiliki nilai jual dan daya tarik wisata. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini

akan melibatkan masyarakat secara aktif melalui program pelatihan, pendampingan, akses permodalan, serta penguatan kapasitas SDM lokal. Pendekatan pembangunan berbasis komunitas akan menjadi fondasi utama dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk membangun ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berbasis potensi lokal, sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan.

### **3.2.3.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2027: Integrasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Keamanan Terpadu**

Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan arah kebijakan pembangunan yang berfokus pada integrasi pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penguatan sistem keamanan daerah secara terpadu. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan tangguh, sekaligus menjamin stabilitas sosial sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Pembangunan SDM diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan keterampilan kerja, serta pengembangan karakter dan etika sosial masyarakat. Fokus diberikan pada upaya peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pengembangan pendidikan vokasi, serta perluasan pelatihan berbasis kompetensi untuk mendorong kemandirian dan daya saing tenaga kerja lokal. Selain itu, pemberdayaan pemuda, perempuan, dan kelompok rentan menjadi prioritas dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Di sisi lain, penguatan sistem keamanan terpadu dilaksanakan dengan mendorong kolaborasi antara unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam pemantauan wilayah, pengembangan sistem keamanan lingkungan (siskamling digital), serta peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan keamanan menjadi bagian dari strategi ini.

Integrasi antara pembangunan SDM dan keamanan diarahkan untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif, bebas dari konflik, kejahatan, maupun radikalisme, sekaligus membentuk masyarakat yang sadar hukum, disiplin, dan partisipatif. Upaya ini juga sejalan dengan visi Kabupaten Rejang Lebong untuk menjadi daerah yang maju secara sosial-ekonomi dengan landasan ketahanan sosial yang kuat. Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong bertekad membangun pondasi masyarakat yang unggul secara kompetensi, serta menciptakan sistem keamanan daerah yang responsif, adaptif, dan berbasis teknologi demi mendukung seluruh sektor pembangunan.

#### **3.2.3.4 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2028: Akselerasi Transformasi Digital dan Ekonomi Kreatif**

Pada tahun 2028, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong difokuskan pada percepatan transformasi digital di berbagai sektor serta penguatan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan efisiensi layanan publik, daya saing ekonomi daerah, serta pemberdayaan generasi muda dalam menghadapi era digital dan ekonomi berbasis inovasi.

Transformasi digital menjadi strategi utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis digital (e-government), memperluas infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) hingga ke desa-desa, serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Upaya ini juga mencakup penguatan kapasitas ASN dan perangkat desa dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan yang lebih cepat dan akurat.

Sejalan dengan itu, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada penguatan sektor-sektor berbasis ide, inovasi, dan budaya lokal. Kabupaten Rejang Lebong memiliki potensi besar dalam subsektor seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, serta digital content (desain grafis, fotografi, animasi). Dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui fasilitasi inkubasi usaha, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan digital, dan promosi melalui platform online.

Integrasi transformasi digital dengan pengembangan ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem inovatif yang membuka peluang kerja baru, khususnya bagi generasi muda. Digitalisasi UMKM, penyediaan marketplace lokal, dan pembentukan pusat kreatif di daerah akan menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi berbasis digital dan budaya. Dengan arah kebijakan ini, Kabupaten Rejang Lebong berupaya menciptakan iklim ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, memberdayakan talenta lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, modern, dan berkelanjutan.

#### **3.2.3.5 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2029: Integrasi Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Daerah dan Pemerataan IPM Antar Wilayah**

Pada tahun 2029, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan arah kebijakan pembangunan yang mengedepankan integrasi prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan daerah, serta mendorong pemerataan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah sebagai bagian dari upaya menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Penguatan ekonomi hijau dilakukan dengan mempromosikan pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, dan rendah emisi karbon. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan sektor pertanian ramah lingkungan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pemanfaatan energi terbarukan, serta konservasi kawasan hutan dan sumber daya air. Ekonomi hijau juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru yang mendukung transisi ke arah pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah mendorong partisipasi aktif masyarakat, pelaku usaha, dan generasi muda dalam inisiatif hijau, seperti kewirausahaan hijau (green entrepreneurship), ekowisata, dan edukasi lingkungan hidup. Kebijakan ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring lingkungan, perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan, serta penguatan regulasi daerah yang mendukung investasi hijau.

Di sisi lain, peningkatan dan pemerataan IPM antarwilayah menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa setiap masyarakat di seluruh kecamatan, baik di pusat maupun daerah terpencil, mendapatkan akses setara terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak. Strategi yang diambil meliputi peningkatan kualitas layanan dasar, pembangunan infrastruktur sosial secara merata, serta intervensi khusus di wilayah dengan capaian IPM yang masih rendah.

Integrasi antara ekonomi hijau dan pemerataan pembangunan manusia tidak hanya menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan Kabupaten Rejang Lebong dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketimpangan wilayah. Dengan arah kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen menciptakan pembangunan yang selaras antara kemajuan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

### **3.2.3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Berdasarkan Tata Ruang dan Wilayah.**

Berdasarkan Draft Akhir Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2042, terdapat program utama Pembangunan kewilayahan Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut :

#### **1. Rencana Stuktur Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong**

##### **1.1. Rencana Sistem Perkotaan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong**

Sistem perkotaan kewenangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong adalah penetapan PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan, dan PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Berdasarkan hasil analisa pusat-pusat pertumbuhan wilayah dalam revisi RTRW Kabupaten Rejang Lebong terjadi perubahan struktur ruang dengan mempertimbangkan kelengkapan sarana prasarana, aksesibilitas dan mobiltas, pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Kecamatan Curup yang berfungsi sebagai pusat perekonomian wilayah di Kabupaten Rejang Lebong. Wilayah yang masuk dalam PKW adalah: Pasar Baru (Kecamatan Curup), Batu Galing (Kecamatan Curup Tengah), Lubuk Ubar (Kecamatan Curup Selatan), Talang Ulu (Kecamatan Curup Timur), Tunas Harapan (Kecamatan Curup Utara).
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota pusat pelayanan tersier yang dikembangkan untuk melayani satu atau lebih kecamatan. Pusat pelayanan tersier ini terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien sebagai sentra pelayanan kegiatan lokal. Berdasarkan RTRW Provinsi dan kajian analisa pusat pusat pertumbuhan wilayah, PKL di kabupaten Rejang Lebong PKL adalah sebagai berikut: PKL Kota Padang, PKL Karang Jaya (Kecamatan Selupu Rejang).
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa desa juga berfungsi sebagai Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) adalah beberapa Ibu Kota Kecamatan, yaitu: Padang Ulak Tanding (Kecamatan Padang Ulak Tanding), Beringin Tiga (Kecamatan Sindang Kelingi), Babakan Baru (Kecamatan Bermani Ulu Raya), Bengko (Kecamatan Sindang Dataran), Lubuk Alai (Kecamatan Sindang Beliti Ulu), Lubuk Belimbing (Kecamatan Sindang Beliti Ilir), Kampung Melayu (Kecamatan Bermani Ulu), Kepala Curup (Kecamatan Binduriang).
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Rejang Lebong, yaitu: Bangun Jaya (Bermani Ulu Raya), Air Pikat (Bermani Ulu), Sentral Baru (Bermani Ulu), Air Lanang (Curup Selatan), Belumai I (Padang Ulak tanding), Blitar (Sindang Kelingi), Tanjung Agung (Sindang Beliti Ulu).

## **1.2. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong**

### **A. Sistem Jaringan Jalan**

#### **a) Jaringan Jalan Nasional**

**Jaringan Arteri Primer (JAP)** meliputi Jalan Thamrin dengan panjang 0,90 km (JAP), Jalan Merdeka dengan panjang 1,40 km (JAP), Jalan A.Yani dengan panjang 0,96 km (JAP), Jalan Curup - Simpang Nangka dengan panjang 5,20 km (JAP), Simpang Nangka - Perbatasan Sumsel dengan panjang 43,27 km (JAP), Jalan Arteri Primer (JAP) yang melintasi wilayah Kabupaten Rejang Lebong ini merupakan bagian dari Jalan Lintas Barat Sumatera), yang menghubungkan Kota Bengkulu dengan Kota Lubuk Linggau (Provinsi Sumatera Selatan)

**Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)** yang ada di Kabupaten Rejang Lebong yaitu SP.Taba Mulan - SP Nangka dengan panjang 12,46 km

**Jalan Bebas Hambatan** yang ada di Kabupaten Rejang Lebong adalah Jalan Bebas Hambatan Lubuk Linggau-Curup - Bengkulu. Jalan Bebas Hambatan diarahkan adanya pintu tol di wilayah Rejang Lebong. Jalur yang terdekat dengan Jalan Arteri Primer ada di wilayah Kecamatan Binduriang

b) Jaringan Jalan Provinsi

Di wilayah Kabupaten Rejang Lebong panjang jalan provinsi 118.550 Km dengan rincian sebagai berikut:

**Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3)** yang berlokasi pada ruas Jalan Curup-Air Dingin sepanjang 21.3 km

**Jalan Jalan Lokal Primer** yaitu ruas Jalan Bukit Kaba sepanjang 6.90 km, Ruas Jalan Beringin III - Bengko sepanjang 22 km, Ruas Jalan Air lanang - Desa Apur Sepanjang 13.2 km, Ruas Jalan Palak Curup - SP III karang Baru sepanjang 19.7 km dan Ruas Jalan PUT-Kota Padang-Derati-Tanjung Enim sepanjang 35.4 km.

**Rencana Pengembangan Jalan Provinsi** menjadi **Jalan Kolektor** berada di wilayah Kabupaten Rejang Lebong yaitu rute PGE Lebong - Transad- Sentral Baru - Barumanis - Air Pikat - Tebat Tenong dalam - Tanjung Dalam- Air Lanang- Bengkulu Tengah. Rencana jalan provinsi ini sepanjang sekitar 28 Km

c) Jaringan Jalan Kabupaten

**Rencana peningkatan Jalan Lingkar Utara dalam Kota Curup** menjadi **Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4)** yang berlokasi di ruas Jalan Simpang Nanka - Seguring - Kota Pagu - Tanjung Berigin - Pahlawan (11.04 Km).

**Rencana peningkatan Jalan Lokal Primer** menjadi **Jalan Kolektor Sekunder (JKS)** yang berlokasi pada ruas jalan Simpang Pungguk Lalang - Air Lanang (7.43 Km), ruas Jalan Lawang Agung - Air Nau - Air Rusa - Jalan Kolektor Empat Suku Menanti (14.21 Km), ruas Jalan Bengko (PPK) - Warung Pojok -Sinar Gunung (14.77 km), ruas Jalan Sentral Baru - Kampung Sajad - Air Mundu - Baru Manis - Air Pikat - Tebat Tenong Dalam - Tebat Pulau - Dusun Sawah - Batu Panco - Perbo - Tunas Harapan (21.38 Km) dan ruas jalan Simpang Karang Jaya (PKW) - Air Dingin (8.68 Km).

**Rencana peningkatan Jalan Lain / Lokal Sekunder** menjadi **Jalan Lokal Primer** berlokasi pada ruas Jalan Tebat Pulau - Tanjung Dalam (7.83 km), ruas Jalan Jalan Kolektor Primer -Ruas Jalan Tebat Pulau Menuju Tanjung Dalam (3.06 Km), ruas Jalan Simpang Pusat Kecamatan Curup Utara (0.7 Km), ruas Jalan Pusat Kecamatan Curup Utara - Jalan Lokal Primer (0,25 Km), ruas Jalan Tunas Harapan (PKW) - Pusat Kecamatan Bermani Ulu (1.46 Km) dan ruas Jalan Sinar Gunung --> Air Nau (1.17 km)

**Rencana peningkatan Jalan Lokal Primer menjadi Jalan Kolektor Sekunder yang berlokasi di ruas jalan Air Bang - Air Merah - Teladan - Durian Depun (7.42 Km).**

d) **Jalan Desa**

Dengan telah terhubungkannya semua pusat kegiatan/pusat pelayanan (PKW, PPK, dan PPL) dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong oleh Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten, maka untuk Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong tidak ditetapkan Jalan Desa yang akan ikut membentuk struktur ruang wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

**B. Terminal**

a) **Terminal Penumpang**

Pengembang terminal di Kabupaten Rejang Lebong :

- 1) Terminal penumpang, yang terdiri atas: Terminal tipe A terdapat di Simpang Nangka, Terminal tipe C terdapat di Tabarenah.
- 2) Terminal barang terdapat di Simpang Nangka

b) **Jembatan Timbang**

Jembatan Timbang di dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan RTRW Provinsi Bengkulu berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding. Jembatan timbang tersebut terletak di tepi jalan nasional.

**C. Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian**

Sistem jaringan transportasi perkeretaapian meliputi :

- a) Jaringan Jalan Rel Kereta Api yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan - Bengkulu melalui Kota Padang.
- b) Pengembangan dan pemeliharaan Stasiun Kereta Api di Kota Padang. Stasiun kereta api yang dikembangkan sesuai dengan RTRW provinsi adalah: Stasiun Kereta Api Kota Padang dan Stasiun Kereta Api Kepala Curup

**1.3. Rencana Sistem Jaringan Energi Kabupaten Rejang Lebong**

Kawasan prioritas pengembangan/peningkatan pelayanan sistem prasarana energi listrik Kabupaten Rejang Lebong adalah:

- 1) Pusat-pusat aktifitas di sepanjang jalur Jalan provinsi.
- 2) Pusat-pusat Pengembangan Wilayah.
- 3) Sub-sub Pusat Pengembangan Wilayah.
- 4) Kawasan Permukiman. Kawasan Industri, Perdagangan dan Jasa dan kawasan strategis lainnya.
- 5) Daerah-daerah desa terpencil yang belum masuk aliran listrik

#### **A. Infrastruktur Pembangkitan Tenaga Listrik**

Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan termuat dalam Revisi RTRW Provinsi Bengkulu terdiri atas:

- a) penyediaan energi listrik di Kabupaten Rejang Lebong disediakan oleh PLTA Musi dengan kapasitas 210 MW dan PLTA Tes dengan kapasitas 17.2 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kepala Curup. Rencana pengembangan prasarana pembangkit listrik selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan adalah memanfaatkan potensi sumber energi PLTA Musi dan PLTA Tes;
- b) Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang terletak di Hulu Lais, Bukit Daun, Bermani Ulu Raya, Rejang Lebong

#### **B. Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik**

Rencana pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik atau transmisi tenaga listrik yang terkait atau melewati wilayah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah ditetapkan dalam Revisi RTRW Provinsi meliputi pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang jalur SUTT sebagai berikut:

- a) Jalur Bermani Ulu Raya - Curup dengan kapasitas 70 kilo volt (KV)
- b) Jalur Curup - Kepahiang dengan kapasitas 70 kilo volt (KV)
- c) Jalur Curup - Padang Ulak Tanding dengan kapasitas 150 kilo volt (KV)

#### **C. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik**

Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong direncanakan akan menjangkau seluruh kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di Kabupaten Rejang Lebong, baik untuk penggunaan domestik (rumah tangga), fasilitas sosial, maupun niaga atau komersial; dengan saluran yang meliputi: saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan rendah (SUTR), saluran kabel tegangan menengah (SKTM), dan/atau saluran lainnya

##### **1.4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi Kabupaten Rejang Lebong**

Pengembangan jaringan tetap telepon di Kabupaten Rejang Lebong berupa pengembangan jaringan bergerak:

- a) Pengembangan jaringan nirkabel berupa layanan berbasis internet untuk kepentingan pelayanan umum menjangkau PKW, PPK, dan PPL; Masih banyak desa-desa yang belum mendapatkan jaringan internet, baru 47 desa terlayani internet masih 109 desa yang perlu mendapatkan layanan internet
- b) Pengembangan menara telepon seluler atau Base Transciever Station (BTS) bersama tersebar di kecamatan. Titik BTS yang ada di Kabupaten Rejang Lebong 92 unit, tetapi yang telah berjalan 54 titik BTS. Sehingga ke depan perlu pembangunan BTS yang sudah diarahakan lokasinya. Untuk lebih jelasnya jaringan BTS.

## **1.5. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Rejang Lebong**

### **A. Sistem Wilayah Sungai**

Sesuai dengan Revisi RTRW Provinsi Bengkulu Sistem jaringan wilayah sungai di Kabupaten Rejang Lebong yaitu pengelolaan Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyu Asin (Wilayah Sungai Lintas Provinsi-Kewenangan Pemerintah Pusat) yang mencakup wilayah aliran Sungai DAS Musi, DAS Lemau, DAS Palik dan DAS Ketahun.

### **B. Sistem Jaringan Irigasi**

Sistem jaringan irigasi berdasarkan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 meliputi:

- a) Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah provinsi, meliputi daerah irigasi Air Musi Kejalo dengan luasan ± 1.180 ha; dan daerah irigasi Air Daup seluas 9 Ha.
- b) Sistem jaringan irigasi kewenangan pemerintah kabupaten, meliputi 86 daerah irigasi dengan luasan total ± 8.173 ha

### **C. Sistem Pengendali Banjir**

Banjir sering terjadi di wilayah kabupaten Rejang Lebong, hal ini disebabkan sudah terjadi kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai bagian hulu, sehingga perlu pengendalian pemanfaatan ruang di daerah hulu sungai. Terutama sungai hulu sungai musu, hulu sungai air putih dan hulu sungai air duku, dimana aliran sungai-sungai tersebut melintasi permukiman penduduk.

### **D. Sistem Pengelolaan Air Baku Untuk Air Bersih**

Rencana pengelolaan sumber air baku di Kabupaten Rejang Lebong diantaranya :

1. Kecamatan Curup dengan Lokasi Sungai Air Musi, Mata Air Embun, Mata Air Simpang macang dan Mata Air Desa Air Merah.
2. Kecamatan Bermani Ulu dengan Lokasi MA Air Mundu. MA Nipis-1, MA Nipis-2, MA Nipis-3.
3. Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan Lokasi MA Lawang Agung.
4. Kecamatan Kota Padang dengan Lokasi Sungai Sange.
5. Kecamatan Sindang Kelingi dengan Lokasi Sungai Kelingi dan MA Cahaya Negeri.
6. Kecamatan Selupu Rejang dengan Lokasi Sungai Lirik Kecil/Bukit Kelam.

## **1.6. Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan**

### **A. Prasarana Air Minum**

Sistem penyediaan air minum bagi masyarakat dapat dikembangkan menjadi dua pendekatan utama, yaitu Sistem Perpipaan dan Sistem Non Perpipaan. Sistem Perpipaan diklasifikasikan lagi menjadi dua, yaitu: yang dikelola PDAM dan Non PDAM. Di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, SPAM Perpipaan yang di kelola PDAM memiliki sembilan unit sistem yaitu: Unit Kota Curup, Padang Ulak Tanding, Blitar, Selupu Rejang, Kota Padang, BTN Depag, Batu Ampar, Kampung Delima, dan Kampung Melayu. Akan tetapi karena

terkait dengan Nomenklatur dan Kewenangan penanganan, pembahasan SPAM dibagi menjadi SPAM Ibukota Kabupaten dan SPAM Ibukota Kecamatan.

SPAM Kabupaten dibagi menjadi 5 wilayah pelayanan (zone) yaitu Wilayah Pelayanan I yang melayani sebagian Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya; Wilayah Pelayanan II yang melayani ibukota Kabupaten Rejang Lebong, daerah tersebut berbatasan dengan atau sebagian dengan kecamatan lainnya; Wilayah Pelayanan III yang melayani Sindang Kelingi, sindang dataran dan sebagian Selupu Rejang dan Binduriang; Wilayah Pelayanan IV yang melayani Sebagian Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Beliti Ulu, Kecamatan Binduriang dan Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Wilayah Pelayanan V yang melayani sebagian Kecamatan Sindang Beliti Ilir dan Kecamatan Kota Padang.

#### **B. Prasarana Pengelolaan Persampahan**

Pengembangan sistem pengelolaan prasarana persampahan di Kabupaten Rejang Lebong meliputi:

- a) Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota  
Optimalisasi TPA Jambu Keling, Rencana Pembangunan TPA di wilayah Padang Ulak Tanding atau Binduriang, Pengadaan sarana pengangkutan sampah
- b) Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan  
Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara dengan sistem 3R (Reduce - Reuse - Recycle) yang berlokasi di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

#### **C. Prasarana Pengelolaan Limbah**

Pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah air limbah di Kabupaten Rejang Lebong meliputi:

- a) Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat skala Kota diarahakan di kawasan Kota Curup
- b) Sistem Pengolahan Limbah Domestik Setempat Skala Kota Peningkatan dan optimalisasi IPLT Tasik Malaya
- c) Sistem Pengolahan Limbah Domestik Terpusat Skala Kawasan untuk pembangunan IPAL Komunal di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

#### **D. Prasarana Pengelolaan Drainase**

Rencana pengembangan prasarana drainase sebagai diantaranya Pengendalian pola aliran sesuai dengan kondisi topografi, Pengembangan jaringan drainase primer mengikuti jaringan jalan Arteri Primer dan drainase sekunder mengikuti jaringan jalan kolektor, Identifikasi kebutuhan pembuatan saluran sudetan untuk membenahi pola aliran, Normalisasi sungai - sungai dan saluran drainase, Pengendalian fungsi bantaran sungai meliputi penetapan garis sempadan sungai dan saluran, Pembangunan tandon air ataupun

sumur resapan untuk mendukung sistem prasarana drainase, Penataan sistem penyaluran air hujan, Pembagian daerah pelayanan drainase serta optimasi sistem drainase dalam bentuk penyusunan Master Plan Drainase Wilayah Perkotaan.

#### **E. Prasarana Jalur Evakuasi Bencana**

Jalur evaluasi meliputi rencana titik lokasi terdiri dari lokasi **titik kumpul** yang berada di setiap kelurahan untuk mempermudah proses evakuasi dan lokasi **ruang evakuasi** berada jauh dari pusat bencana seperti ruang luar di sekitar Lubuk Belimbing, Lubuk Alai. Beringin Tiga, Kota Curup dan Kawasan TNKS. Jalur Evaluasi selanjutnya adalah rencana jalur evakuasi mengikuti jalur jalan utama eksisting yang telah ada menuju lokasi ruang evakuasi.

## **2. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong**

### **2.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung**

#### **2.1.1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya**

##### **1) Kawasan Hutan Lindung**

Pengembangan kawasan ini diarahkan pada fungsi perlindungan wilayah atau yang memiliki keterkaitan kuat dengan fungsi hidrologis sebagai kawasan konservasi serta resapan air. Di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, secara aktual fungsi sebagai kawasan resapan air ini dilakukan oleh kawasan lindung (Hutan Lindung dan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan hutan berfungsi lindung lainnya). Kawasan Hutan Lindung (HL), yang didelineasikan dengan luas kurang lebih 19.949,78 Ha yang sebarannya terletak di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Bermani Ulu Raya (1,91 Ha), Kecamatan Bermani Ulu (3.402,51 Ha), Kecamatan Curup Selatan (546,40 Ha), Kecamatan Kota Padang (6.074,43 Ha), Kecamatan Sindang Beliti Ilir (6.693,02 Ha), Kecamatan Sindang Beliti Ulu (3.061,49 Ha) dan Kecamatan Sindang dataran (170,03 Ha).

##### **2) Kawasan Resapan Air**

Kawasan Resapan Air di Kabupaten Rejang Lebong diindikasikan secara normatif yaitu kawasan kawasan hutan, yang meliputi baik hutan yang merupakan kawasan lindung (Hutan Lindung, Taman Nasional, Suaka Margasatwa,) maupun kawasan budidaya (yang meliputi Hutan Produksi dan Hutan Rakyat). Selain itu, dengan karakternya yang bervegetasi, maka secara normatif kawasan budidaya bervegetasi (perkebunan yang terdiri atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar) juga berfungsi sebagai resapan air.

### **2.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyediaan tata air dan kelancaran serta ketertiban pengaturan dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Luas wilayah sempadan sungai di Kabupaten Rejang Lebong 7.279,12 Ha. Wilayah sempadan sungai tersebar di setiap kecamatan. Rencana penetapan kawasan sekitar Danau/Situ/Waduk di Kabupaten Rejang Lebong adalah seluas 60,14 hektar dengan sebaran sebagai berikut Danau Mas Harun Bestari di Kecamatan Selupu Rejang, Danau Talang Kering Kecamatan Bermani Ulu dan Danau Air Panas Sindang Jati di Kecamatan Sindang Kelingi.

### **2.1.3. Kawasan Konservasi**

#### **A. Kawasan Suaka Alam**

Kawasan Suaka Alam yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong Kawasan Cagar Alam yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong meliputi Cagar Alam Talang Ulu 1 dan Cagar Alam Talang Ulu 2. Luas Cagar Alam 0,60 Ha.

#### **B. Kawasan Pelestarian Alam**

Kawasan Pelestarian Alam di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari :

- a) Taman Nasional Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) di Kabupaten Rejang Lebong seluas 28. 868,3Ha. Taman Nasional Kerinci Sebelat tersebar di Kecamatan Bermani Ulu raya, Curup Utara, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Padang Ulak Tanding (PUT)
- b) Taman Wisata Alam Bukit Kaba seluas 4.450,88 hektar yang berada di Sindang Dataran, Selupu Rejang dan Curup Tengah

### **2.1.4. Kawasan Rawan Bencana**

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam, bencana gempa bumi, longsor dan lain-lain. Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan potensi bencana alam diantaranya :

- a) Kawasan rawan tanah longsor yang tersebar di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir dan Kota Padang serta pada tebing-tebing sepanjang jalan negara di wilayah Kecamatan Selupu Rejang, sindang Kelingi dan Binduriang. Disamping itu, potensi terjadinya gerakan tanah juga terdapat di wilayah Kecamatan Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya, yaitu pada tebing-tebing relatif terjal yang ada di lembah-lembah sungai dan sepanjang jalan raya. Kegiatan penambangan bahan galian (pasir dan batu) di Kecamatan Curup Selatan dan Curup Utara juga beresiko tinggi terhadap terjadinya gerakan tanah bila tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian secara intensif

- b) Kawasan rawan banjir yang tersebar di Kecamatan Padang UlakTanding, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Kota Padang, selupu Rejang dan Bermani Ulu

#### **2.1.5 Kawasan Cagar Budaya**

Cagar Budaya, yang tidak didelineasikan dalam peta pola ruang tetapi diindikasikan letak sebarannya, yaitu meliputi:

- a) Situs Suban Air Panas yang berada di Kecamatan Curup Timur.
- b) Situs Batu Dewa, Situs Batu Panco, Situs Batu Perbo dan Situs Tabarenah yang berada di Kecamatan Curup Utara
- c) Situs Karang Baru dan Situs Bukit Kute Giri yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding.
- d) Situs Budaya Punyung Butew Cawang Lekat di Kecamatan Curup Timur

#### **2.1.6. Kawasan Lindung Geologi**

Penetapan kawasan lindung geologi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi tanah dan batuan yang terkandung di dalam perut bumi yang menjamin keberlangsungan fungsi lingkungan di atasnya. Kawasan lindung geologi meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap tanah dan batuan. Kawasan lindung geologi meliputi kawasan rawan gunung api dan gerakan tanah. Kawasan rawan gunung api Bukit Kaba yang tersebar di Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir dan Kota Padang

#### **2.1.7. Kawasan Lindung Lainnya**

Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Rejang Lebong bertujuan sebagai perlindungan terhadap taman wisata alam yang dapat berfungsi sebagai Pengembangan Pendidikan dan Pariwisata.

### **2.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Budidaya**

#### **2.2.1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi**

Kawasan peruntukan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong, adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas Bukit Basa yang berada di sekitar Curup Utara seluas kurang lebih 125, 36 hektar. Direkomendasi HPT Bukit Basah menjadi APL tetapi sampai Tahun 2020 belum ada rekomendasi menjadi APL oleh kementerian kehutanan

#### **2.2.2. Kawasan Hutan Rakyat (Hutan Adat)**

Di Kabupaten Rejang Lebong terdapat rencana hutan adat, tetapi kawasan hutan adat belum mendapat penetapan dari kementerian kehutanan.

### 2.2.3. Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas: kawasan pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman buah-buahan dan kawasan Perkebunan.

#### A. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

##### 1. Tanaman Pangan (LP2B)

Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri tanaman pangan lahan basah (padi), tanaman Hortikultura dan buah-buahan. Kawasan pertanian tanaman pangan lahan basah sebagian potensial untuk ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) Lahan Pangan berkelanjutan (LP2B) tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di kabupateng Rejang Lebong seluas 12821,27 Ha.

Luas lahan LP2B di Kabupaten Rejang Lebong tersebut meliputi lahan pertanian lahan kering (tegalan/ladang) dan lahan sawah. Luas lahan LP2B yang sudah teridentifikasi seluas 5.554,43 Ha. LP2B terluas di Kecamatan Bermani Ulu Raya seluas 1.186, 5 Ha, Bermani Ulu 700, 4 Ha, Curup Utara 951,6 Ha, Curup Selatan 523,7 Ha dan Selupu Rejang 504, 9 ha. Sedangkan luas Kecamatan lainnya kurang dari 500 Ha. Selain itu ada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang potensial yang terletak dalam kawasan pertanian tanaman pangan. Sebagai tanaman selingan di lahan LP2B petani menanam tanaman palwija sebagai selingan.

##### 2. Tanaman pertanian Holtikultura

Rencana pengembangan Komoditas Tanaman holtikultura di Kabupaten Rejang berdasarkan hasil analisa potensial dikembangkan di Kecamatan Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang dataran, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Rencana Luas kawasan pengembangan holtikultura seluas 4.462,34 Ha. Terdapat beberapa komoditas unggulan tanaman palawija dan holtikultura yang akan dikembangkan oleh pemerintah kabupaten Rejang lebong. Komoditas tersebut antara lain:

- a) Komoditas tanaman jagung diarahkan di kecamatan Bermani Ulu, Curup Utara, Sindang Kelingi, Curup Selatan, Sindang Dataran, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Beliti Ilir, Padang Ulak tanding, Kota Padang, Curup Tengah dan Curup Timur
- b) Komoditas tanaman cabai ditetapkan lima kawasan sebagai kawasan pengembangan cabai di Kabupaten Rejang Lebong yaitu: Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang dataran, Bermani Ulu dan Curup Timur

- c) Komoditas tanaman bawang merah di arahkan 5 kecamatan yaitu: Selupu Rejang, Sindang kelingi, Sindang dataran, Bermani Ulu, dan Bermani Ulu raya
  - d) Komoditas tanaman obat dan rempah di Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti ilir, Binduriang, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang
3. Tanaman Florikultura Kabupaten Rejang Lebong potensial dikembangkan tanaman Florikultura. Tanaman florikultura merupakan suatu kelompok jenis tanaman hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan keindahan, keasrian dan kenyamanan di dalam ruang tertutup dan/atau terbuka. Budidaya tanaman florikultura adalah semua kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pasca panen florikultura. Arah pengembangan tanaman florikultura di Kecamatan Selupu Rejang dan Sindang Kelingi
4. Tanaman Buah-buahan Rencana pengembangan tanaman buah-buahan berdasarkan kajian analisa diarahkan di Kecamatan Bermani Ulu Raya, Bermani Ulu, Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Sindang Dataran. Rencana pengembangan komoditas tanaman buah-buahan sekitar 2. 665,18 Ha. Arah pengembangan Komoditas unggulan yang akan dikembangkan di Kabupaten Rejang Lebong membentuk kawasan komoditas antara lain:
- a) Kawasan Komoditas Tanaman Jeruk diarahkan di Kecamatan Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Selupu Rejang, Sindang Kelingi dan Sindang Dataran
  - b) Kawasan Komoditas Tanaman Apel di Kecamatan Sindang Dataran dan sekitarnya
  - c) Kawasan Komoditas Tanaman Durian di Kecamatan PU.Tanding, Kota Padang, Sindang Beliti Ulu dan Sindang Beliti Ilir
  - d) Kawasan Komoditas Tanaman Alpukat di arahkan di Kecamatan Padang Ulak Tanding dan Bermani Ulu
  - e) Kawasan Komoditas Tanaman Manggis di arahkan di Kecamatan Sindang Kelingi dan Kota Padang
  - f) Kawasan Komoditas Tanaman Pisang Ambon di Kecamatan Curup Timur, Curup selatan, Curup Utara, Curup Tengah.

Berdasarkan potensi dan arah pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan maka perlu diarahkan pembentukan kawasan agropolitan baru di Kecamatan Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya.

#### **2.2.4. Kawasan Perkebunan**

Kabupaten Rejang Lebong sangat potensial pengembangan perkebunan. Rencana luas lahan tanaman perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong seluas 47.046,37 Ha. Komoditas unggulan tanaman perkebunan adalah kopi, aren, karet dan sawit. Adapun arahan pengembangan kawasan komoditas unggulan sebagai berikut:

- a) Komoditas Tanaman Kopi di Kabupaten Rejang Lebong diarahkan di kecamatan Sindang Dataran, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, Binduriang, Curup Utara dan Curup Selatan
- b) Komoditas Tanaman Aren di arahkan di Kecamatan Sindang Kelingi, Sindang dataran, Selupu Rejang, Binduriang, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya
- c) Komoditas Tanaman Karet dan Kelapa Sawit diarahkan di Kecamatan Padang Ulak tanding, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu dan Kota Padang.

Berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.347.VII Tahun 2017 tentang penetapan lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan Perkebunan Kopi Kabupaten Rejang lebong. Lokasi Kampung Kopi di Kabupaten Rejang lebong sesuai dengan SK Bupati adalah sebagai berikut:

- a) Desa IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran (Pusat Kawasan)
- b) Desa Bengko Kecamatan Sindang dataran
- c) Desa Air Rusa Kecamatan Sindang Dataran
- d) Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi
- e) Desa Air Dingin Kecamatan Sindang Kelingi

Dengan adanya Kampung Kopi selain peningkatan produktivitas tanaman, kegiatan Agro wisata dapat berkembang sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

#### **2.2.5. Kawasan Peternakan**

Kawasan yang diperuntukan bagi peternakan dan atau padang penggembalaan ternak untuk berbagai jenis hewan ternak. Berbagai jenis ternak telah dikembangkan oleh masyarakat, yang terdiri dari ternak besar dan ternak kecil. Jenis ternak besar yang dikembangkan umumnya adalah kerbau dan sapi. Sedangkan jenis ternak kecil yang dikembangkan antara lain kambing, domba, dan unggas. Pengembangan peternakan di Kabupaten Rejang Lebong terintegrasi dengan pengembangan pertanian lainnya. Limbah pertanian yang dihasilkan oleh kegiatan budidaya tanaman perkebunan dan tanaman hortikultura dapat difungsikan sebagai Hijauan Pakan Ternak (HPT). Biji bijian produksi pertanian juga dapat dijadikan untuk pakan unggas.

#### **2.2.6. Kawasan Perikanan**

Jenis kegiatan perikanan yang dikembangkan di Kabupaten Rejang Lebong berupa kolam air deras, kolam air tenang, kolam terpal/fiber dan jaring apung. Berdasarkan analisis pengembangan perikanan potensial di Kecamatan:

- a) Kolam air deras potensi di Kecamatan Binduriang dan Kota Padang
- b) Kolam air tenang di Kecamatan Curup, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah Kota Padang, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya dan Padang Ulak Tanding
- c) Kolam Terpal potensi di Kecamatan Curup, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, Padang Ulak tanding dan Selupu Rejang
- d) Jaring Apung potensi di Kecamatan Curup Utara

Berdasarkan kondisi eksisting dan sarana penunjang maka pengembangan kawasan perikanan di arahkan di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Binduriang dan Kota Padang dengan pusat di Desa Blumai. Untuk mengoptimalkan kegiatan perikanan diarahkan dibentuk Kawasan Minapolitan di Kecamatan Padang Ulak Tanding dengan pusat di Desa Blumai.

#### **2.2.7. Kawasan Pertambangan**

- a) Pertambangan mineral.

Pertambangan mineral salah satunya adalah tambang batuan. Berdasarkan peta wilayah usaha pertambangan (WUP) untuk pertambangan mineral batuan hampir disetiap kecamatan potensi tambang mineral batuan. Arahkan kawasan pertambangan mineral batuan di Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut Kecamatan Bermani Ulu Raya, Bermani Ulu, Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Selupu Rejang, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Kelingi, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kecamatan Kota Padang, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kecamatan Sindang Beliti Ulu dan Kecamatan Sindang Dataran.

- b) Pertambangan Batubara.

Berdasarkan peta wilayah usaha pertambangan (WUP) untuk pertambangan batubara dan RTRW Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032, potensi pertambangan batubara dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kecamatan Bermani Ulu, Kecamatan Curup Utara Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Selupu Rejang.

#### **2.2.8. Kawasan Industri**

Kegiatan Industri di Kabupaten Rejang Lebong secara umum masih masuk dalam kategori industri kecil rumah tangga. Jenis industri kecil yang berkembang cukup bervariasi, sebagian besar jenis industri yang berkembang industri makanan.

Berdasarkan SK Bupati Rejang Lebong Nomor 180.171.1V Tahun 2018 tentang “Penetapan Sentra Industri Kecil Menengah Gula Aren dan IKM Pengolahan Biji Kopi Menjadi Bubuk Kopi dan Sentra Makanan Ringan di Kabupaten Rejang Lebong”. Sentra Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Rejang Lebong ditetapkan sebagai berikut:

- a) Sentra Industri Kecil dan Menengah Gula Aren di Kecamatan Selupu Rejang
  - b) Sentra Industri Kecil dan Menengah Gula Aren di Kecamatan Sindang Kelingi
  - c) Sentra Industri Kecil dan Menengah Bubuk Kopi di Kecamatan Sindang Dataran
  - d) Sentra Industri Kecil dan Menengah Makanan Ringan di Kecamatan Curup Tengah
- Wilayah pendukung kegiatan industri ini semua kecamatan diluar kecamatan sentra industri. Adapun Arahan Program Pengembangan Perwilayahan Industri di Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten Rejang Lebong.

#### **2.2.9. Kawasan Pariwisata**

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong meliputi :

- a) Kawasan wisata alam  
Kecamatan Bermani Ulu Raya, Bermani Ulu, Curup Utara, Curup Selatan, Sindang Dataran, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Padang Ulak Tanding dan Kota Padang
- b) Kawasan wisata budaya  
Kecamatan Bermani Ulu, Curup Utara, Curup Tengah, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Curup
- c) Kawasan wisata buatan  
Kecamatan Bermani Ulu, Curup Utara, Curup Timur, Selupu Rejang, Sindang Kelingi, Sindang Dataran, Padang Ulak Tanding

#### **2.2.10. Kawasan Permukiman**

Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Rejang Lebong seluas 15.066,51 Ha yang meliputi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Beberapa fasilitas umum yang mendukung kawasan permukiman di Kabupaten Rejang lebong antara lain:

- a) Rumah Sakit Umum di Kecamatan Curup Selatan
- b) Kantor Palang Merah Indonsia (PMI) di Kecamatan Bermnai Ulu
- c) Gedung olah raga (spot centere) di Kecamatan Bermani Ulu Raya
- d) Perguruan Tinggi di Kecamatan Curup dan Curup Tengah

#### **2.2.11. Kawasan Permukiman Perkotaan (PK)**

Kawasan permukiman perkotaan di Kabpaten Rejang Lebong ditetapkan di kawasan Kota Curup. Luas Kawasan 2.800,56 Ha yang meliputi 5 kecamatan yaitu Kecamatan

Curup, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Curup Timur, Kecamatan Curup Selatan dan Kecamatan Curup Utara.

#### **2.2.12. Kawasan Permukiman Perdesaan (PD)**

Kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Rejang Lebong yang terdelineasi dalam peta rencana pola ruang dengan luas total kurang lebih 12.265,95 Ha dengan sebarannya terletak di 10 kecamatan (diluar 5 Kecamatan dalam wilayah Curup).

#### **2.1.13. Kawasan Pertahanan dan Keamanan**

Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi :

- a) Komando Distrik Militer (KODIM) 0409/Rejang Lebong di Kecamatan Curup
- b) Komando Rayon Militer (KORAMIL) yang terdapat di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong
- c) Lapangan Tembak senjata ringan di simpang Bukit Kaba Kecamatan Selupu Rejang
- d) Yonif 144 / Jaya Yudha di Kecamatan Curup Selatan
- e) Daerah latihan di Simpang Bukit Kaba Kecamatan Selupu Rejang
- f) Brigade Infanteri (Brigrif) Kodam II Sri Wijaya yang terletak di Pasar Padang Ulak Tanding Kecamatan Padang Ulak Tanding

#### **3.2.3.6 Arah Kebijakan 2025-2029 - Menuju pertumbuhan daerah yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan.**

Dalam periode pembangunan tahun 2025 hingga 2029, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan arah kebijakan yang terintegrasi dan progresif untuk mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif, berdaya saing, serta berkelanjutan. Lima tahun ke depan menjadi momentum penting bagi Rejang Lebong untuk memperkuat fondasi pembangunan melalui akselerasi infrastruktur, transformasi digital, pemberdayaan ekonomi lokal, serta integrasi pendekatan hijau dan pembangunan manusia.

Melalui tahapan arah kebijakan yang terstruktur dari tahun 2025 hingga 2029, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk membangun daerah yang maju infrastrukturnya, kuat SDM-nya, unggul ekonominya, kreatif inovasinya, dan berkelanjutan lingkungannya. Setiap tahapan kebijakan saling terintegrasi dalam membentuk fondasi pembangunan jangka panjang yang berpihak pada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta menjaga keseimbangan sosial dan ekologis.

Penyusunan arah kebijakan tahunan RPJMD diselaraskan secara langsung dengan misi kepala daerah, guna memastikan konsistensi antara visi kepemimpinan dan langkah strategis pembangunan. Penyandingan ini menjadi dasar integratif agar setiap kebijakan yang dijalankan mampu menjawab tujuan pembangunan secara terarah dan berkelanjutan. Penyandingan misi dengan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun

2025–2029 bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara visi kepemimpinan daerah dan pelaksanaan pembangunan secara terarah, konsisten, dan berkelanjutan. Langkah ini dilakukan agar setiap strategi dan kebijakan yang dirumuskan selaras dengan kebutuhan masyarakat, responsif terhadap tantangan daerah, serta mampu mendorong pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah secara efektif dan menyeluruh. Berikut tabel arah kebijakan untuk setiap misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.

**Tabel 3.7**  
**Arah Kebijakan setiap Misi Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong**  
**Tahun 2025-2029**

<b>NO</b>	<b>MISI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>KET.</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional.	Memperkuat reformasi birokrasi yang berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan tata kelola pemerintahan	
2.	Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah.	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya saing melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan investasi, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja produktif	
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah	Membangun dan mengembangkan infrastruktur dasar secara merata, berkelanjutan, dan terintegrasi untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta aksesibilitas publik.	
4.	Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah	Mendorong penguatan keamanan, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta digitalisasi pelayanan publik secara inklusif dan berkelanjutan.	
5.	Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing	Mewujudkan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan berbasis tata kelola lingkungan dan potensi lokal	

### **3.2.4. PRIORITAS PEMBANGUNAN, PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM UNGGULAN JANJI KAMPANYE BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam periode jangka menengah ke depan dipresentasikan dalam visi dan dijabarkan dalam misi dan selanjutnya dalam sasaran pembangunan daerah. Prioritas pembangunan jangka menengah dimaksud harus sinergis dengan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu dan prioritas pembangunan nasional mengingat bahwa penyelenggaraan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka pembangunan Provinsi dan pembangunan nasional. Demikian pula bahwa perlu adanya sinergitas antara RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2045.

#### **3.2.4.1 Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas**

Program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

##### **1. Prioritas Pembangunan I : Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berkarakter**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang maju, mandiri, berakhlak, dan berkelanjutan. Fokus utama pembangunan SDM adalah menciptakan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual dan keterampilan, tetapi juga berkarakter kuat, beretika, serta memiliki jiwa inklusif yang mampu hidup harmonis dalam keberagaman.

Upaya peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui berbagai program strategis, antara lain: peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dari tingkat dasar hingga menengah, pengembangan pendidikan karakter yang menanamkan nilai-nilai moral dan budaya lokal, serta peningkatan layanan kesehatan terutama bagi ibu dan anak guna menurunkan angka stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, pembangunan SDM inklusif menjadi prioritas dengan memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya, memperoleh kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan layanan sosial yang layak.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan sistem manajemen sumber daya manusia yang profesional. Pengembangan teknologi pendidikan dan digitalisasi layanan juga menjadi bagian integral untuk menjawab tantangan era revolusi industri 4.0.

Bentuk prioritas program sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut diantaranya adalah:

- a. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan
  - 1) Beasiswa pendidikan vokasi dan tinggi
  - 2) Sekolah digital dan pelatihan guru daerah
- b. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat
  - 1) Penurunan stunting dan layanan posyandu aktif
  - 2) Mobil kesehatan desa terpencil
- c. Penguatan Pendidikan Karakter dan Moderasi Beragama
  - 1) Pesantren kilat sekolah, sekolah ramah anak, forum pemuda berakhlak

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan tercipta SDM Kabupaten Rejang Lebong yang mampu bersaing secara nasional dan global, berintegritas, serta mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

## 2. Prioritas Pembangunan II : Penguatan Ekonomi Lokal Mandiri melalui UMKM, Pertanian dan Ekonomi Kreatif

Penguatan ekonomi lokal menjadi prioritas strategis dalam upaya mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang mandiri dan berkelanjutan. Fokus pembangunan diarahkan pada pemberdayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi kreatif sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Pemberdayaan UMKM dilakukan dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap modal usaha, pelatihan kewirausahaan, fasilitasi pemasaran produk, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jaringan bisnis. Hal ini bertujuan agar UMKM dapat tumbuh kuat, inovatif, dan mampu bersaing di pasar regional maupun nasional.

Sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah, dengan fokus pada peningkatan produktivitas, diversifikasi hasil pertanian, dan pengembangan hilirisasi produk. Pengembangan pertanian berkelanjutan juga ditekankan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim.

Pengembangan ekonomi kreatif dilaksanakan sebagai upaya menggali potensi budaya dan sumber daya lokal yang unik. Hal ini tidak hanya memperkaya nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas daerah serta membuka peluang baru bagi pemuda dan pelaku kreatif dalam menciptakan inovasi dan produk unggulan. Hal ini juga didukung dengan sektor pendukung utama yaitu pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, sarana prasarana dan event pariwisata daerah.

Selain itu, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional *Pariwisata Ramah Muslim* (PRM). Urgensi penguatan PRM didasarkan pada data *Global Muslim Tourism Index* (GMTI) tahun 2023 yang menunjukkan posisi Indonesia berada di peringkat ke-5 dunia, menurun dari posisi 1 pada tahun-tahun sebelumnya. Sebagai daerah yang memiliki potensi destinasi wisata alam, budaya, dan kuliner yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, Kabupaten Rejang Lebong memandang penting untuk mengintegrasikan pengembangan PRM dalam dokumen perencanaan daerah. Upaya ini meliputi:

1. Penyediaan fasilitas ibadah yang memadai di destinasi wisata.
2. Pengembangan paket wisata berbasis nilai-nilai halal dan keberlanjutan.
3. Peningkatan kapasitas pelaku usaha wisata dalam layanan ramah muslim.
4. Promosi destinasi wisata Rejang Lebong melalui jejaring pariwisata muslim nasional dan internasional.

Bentuk prioritas program sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut diantaranya adalah:

- a. Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi dan Pasar Digital
  - 1) Pelatihan bisnis digital dan inkubator UMKM
  - 2) Kredit mikro dan fasilitasi sertifikasi produk
- b. Penguatan Pertanian dan Hilirisasi Produk Unggulan
  - 1) Modernisasi alat pertanian dan irigasi mikro
  - 2) Pabrik olahan hasil kebun/pertanian rakyat
- c. Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Muda
  - 1) Festival ekonomi kreatif tahunan, digital art, kerajinan lokal
  - 2) Eduwisata kreatif di desa budaya

Melalui sinergi antara UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi lokal yang mandiri, inklusif, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta pengentasan kemiskinan.

### 3. Prioritas Pembangunan III : Pembangunan Infrastruktur dan Digitalisasi Layanan Publik

Pembangunan infrastruktur dan digitalisasi layanan publik merupakan salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Rejang Lebong menempatkan agenda ini sebagai prioritas strategis guna memperkuat

konektivitas wilayah, menjawab kesenjangan pelayanan dasar, dan mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan efisien.

Di bidang infrastruktur fisik, pembangunan difokuskan pada perbaikan dan pembangunan jalan strategis, jembatan penghubung antar wilayah, irigasi pertanian, serta akses air bersih dan sanitasi. Langkah ini dilakukan untuk mendukung mobilitas barang dan orang, meningkatkan produktivitas pertanian, dan mempercepat akses masyarakat terhadap layanan dasar yang layak.

Sementara itu, di sektor digitalisasi, Pemerintah Daerah mendorong transformasi layanan publik melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan infrastruktur digital hingga ke tingkat desa, serta pengembangan sistem informasi pelayanan yang terintegrasi. Hal ini tidak hanya bertujuan mempercepat layanan, tetapi juga untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Bentuk prioritas program sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut diantaranya adalah:

- a. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan Air
  - 1) Peningkatan jalan usaha tani dan irigasi teknis
  - 2) Air bersih berbasis komunitas dan sanitasi sehat
- b. Program Digitalisasi Layanan Publik Terintegrasi
  - 1) Sistem Pelayanan Terpadu Online (SPTO)
  - 2) Pusat Layanan Digital Kecamatan
- c. Program Infrastruktur Digital dan Komunikasi Desa
  - 1) Penyediaan BTS dan WiFi publik di desa blank spot

Melalui pendekatan terpadu antara pembangunan infrastruktur fisik dan digital, Kabupaten Rejang Lebong diharapkan mampu meningkatkan daya saing wilayah, memperluas inklusi layanan publik, serta membangun sistem pelayanan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

#### 4. Prioritas Pembangunan IV : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Melayani

Reformasi birokrasi merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk membangun birokrasi yang profesional, adaptif terhadap perubahan, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Langkah strategis yang diambil antara lain melalui perbaikan sistem manajemen ASN berbasis meritokrasi, peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, serta penerapan sistem evaluasi kinerja yang objektif dan transparan. Reformasi juga diarahkan pada penguatan integritas dan budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan pelayanan.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi instrumen penting dalam mendukung transformasi birokrasi digital. Dengan integrasi layanan dan data lintas sektor, pemerintah daerah dapat meningkatkan kecepatan pelayanan, menurunkan biaya birokrasi, dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik difokuskan melalui pembentukan layanan yang terintegrasi, seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), serta pengembangan inovasi pelayanan yang ramah pengguna dan menjangkau kelompok rentan.

Bentuk prioritas program sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut diantaranya adalah:

- a. Reformasi Birokrasi dan Penguatan SDM Aparatur
  - 1) Pelatihan ASN berbasis kompetensi & merit system
  - 2) Rotasi dan promosi berbasis kinerja
- b. Pelayanan Publik Prima dan Responsif
  - 1) Mall Pelayanan Publik kabupaten
  - 2) Layanan cepat digital berbasis aduan warga
- c. Program Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan
  - 1) Sistem e-budgeting, e-planning, e-monitoring terintegrasi

Melalui reformasi birokrasi yang menyeluruh dan tata kelola yang baik, diharapkan tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, dan terpercaya, sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

#### 5. Prioritas Pembangunan V : Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau, dan Ketahanan Wilayah

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan landasan penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan ketahanan sosial wilayah. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk mengarahkan pembangunan daerah ke arah yang ramah lingkungan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan tangguh terhadap bencana serta risiko sosial lainnya.

Penguatan ekonomi hijau menjadi salah satu strategi kunci, dengan mendorong penerapan praktik pertanian organik, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pemanfaatan energi terbarukan secara bertahap. Pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan diarahkan agar tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya.

Selain itu, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pelestarian ekosistem, dan pengembangan kawasan konservasi menjadi bagian integral dari strategi pengurangan risiko lingkungan. Program Kampung Iklim (program yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dengan pendekatan berbasis komunitas, terutama di tingkat RT/RW, desa, atau kelurahan), desa mandiri energi, dan penguatan kelembagaan lingkungan lokal terus didorong agar pembangunan tetap berpihak pada daya tahan jangka panjang.

Dalam aspek ketahanan wilayah, fokus diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat dan desa dalam menghadapi bencana alam, perubahan iklim, dan gejolak sosial. Hal ini dilakukan melalui sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, serta integrasi kebijakan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

Bentuk prioritas program sebagai langkah untuk melaksanakan prioritas pembangunan daerah tersebut diantaranya adalah:

- a. Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan
  - 1) Pertanian organik, pengembangan pasar hijau, dan pupuk hayati
- b. Perlindungan Lingkungan dan Penanganan Sampah
  - 1) Bank sampah desa, TPS 3R, edukasi sekolah hijau
- c. Ketahanan Sosial dan Penanggulangan Risiko Bencana
  - 1) Pemetaan risiko desa rawan & pelatihan tanggap bencana berbasis masyarakat
  - 2) Early warning system sederhana di daerah rawan longsor/banjir.

Dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan, Kabupaten Rejang Lebong tidak hanya membangun untuk hari ini, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap memiliki kualitas lingkungan yang layak dan peluang ekonomi yang adil.

Kelima prioritas pembangunan diatas ditetapkan dalam rangka menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi Kabupaten Rejang Lebong. Masing-masing prioritas diturunkan ke dalam program-program prioritas yang bersifat lintas sektor, berbasis data, dan mengedepankan integrasi wilayah. Dengan kerangka ini, diharapkan setiap intervensi pembangunan memiliki daya ungkit yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keterkaitan antara isu strategis, prioritas daerah dan program prioritas daerah dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 8**  
**Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas**

<b>Isu Strategis Daerah</b>	<b>Prioritas Pembangunan Daerah</b>	<b>Program Prioritas</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
Kualitas Sumber Daya Manusia yang Masih Perlu Ditingkatkan	Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</li> <li>3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>5. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> </ol>
Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Penguatan Ekonomi Lokal Mandiri melalui UMKM, Pertanian, dan Ekonomi Kreatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>2. Program Pengembangan UMKM</li> <li>3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>4. Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian</li> <li>5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>6. Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>7. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ol>
Belum optimalnya Pengendalian Pembangunan dan pelestarian lingkungan	Pembangunan Infrastruktur dan Digitalisasi Layanan Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>6. Program Kawasan Permukiman</li> <li>7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>8. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> </ol>
Belum optimalnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Melayani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah</li> <li>3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah</li> <li>4. Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>5. Program Kepegawaian Daerah</li> <li>6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia</li> <li>7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> <li>8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah</li> </ol>
Belum optimalnya Pengendalian Pembangunan dan pelestarian lingkungan	Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau dan Ketahanan Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</li> <li>5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH</li> <li>6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> </ol>

		7. Program Pengelolaan Persampahan 8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 9. Program Penanggulangan Bencana
--	--	--

Kelima prioritas pembangunan daerah Kabupaten Rejang Lebong diatas juga diselaraskan dengan prioritas nasional dan prioritas pembangunan provinsi. Sinkronisasi dan sinergisitas antara agenda pembangunan nasional, prioritas provinsi, prioritas daerah dan program prioritas daerah dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 9**  
**Sinergitas Prioritas Nasional , Prioritas Pembangunan Provinsi dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029**

Prioritas Nasional (Asta Cita)	Prioritas Provinsi Bengkulu	Prioritas Kabupaten Rejang Lebong	Program Prioritas Kabupaten Rejang Lebong
(1)	(2)	(3)	(4)
<p><b>PN 4:</b> Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas</p> <p><b>PN 8:</b> Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur</p>	<p><b>PP 4:</b> Mewujudkan masyarakat madani yang berkeadilan sosial dengan memastikan akses setara dalam kesehatan, Pendidikan berkualitas, pekerjaan inklusif, serta menjamin kesetaraan gender dan hak-hak penyandang disabilitas</p> <p><b>PP 2:</b> Mewujudkan rasa aman dan keseimbangan kehidupan yang harmonis antara lingkungan, alam, dan budaya, serta memperkuat kerukunan antar umat beragama untuk membangun masyarakat yang adil dan Makmur</p>	<p><b>PP 1:</b> Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Berkarakter</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan</li> <li>3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>5. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</li> </ol>

Prioritas Nasional (Asta Cita)	Prioritas Provinsi Bengkulu	Prioritas Kabupaten Rejang Lebong	Program Prioritas Kabupaten Rejang Lebong
(1)	(2)	(3)	(4)
<p><b>PN 5:</b> Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri</p>	<p><b>PP 6:</b> Memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui Hilirisasi dan industrialisasi produk pangan unggulan</p> <p><b>PP 5:</b> Meningkatkan pertumbuhan kewirausahaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dan inovasi yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam jaringan ekonomi lokal</p>	<p><b>PP 2:</b> Penguatan Ekonomi Lokal Mandiri melalui UMKM, Pertanian, dan Ekonomi Kreatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>2. Program Pengembangan UMKM</li> <li>3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>4. Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian</li> <li>5. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>6. Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> </ol>
<p><b>PN 3:</b> Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi</p> <p><b>PN 6:</b> Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi</p>	<p><b>PP 3:</b> Meningkatkan pembangunan wilayah secara berkelanjutan dengan mempercepat pembangunan infrastruktur dasar dan strategis, serta memperkuat konektivitas antar wilayah</p>	<p><b>PP 3:</b> Pembangunan Infrastruktur dan Digitalisasi Layanan Publik</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>6. Program Kawasan Permukiman</li> <li>7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> </ol>
<p><b>PN 1:</b> Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM, dengan sasaran utama yaitu terwujudnya kehidupan</p>	<p><b>PP 1:</b> Mewujudkan pemerintahan yang berpihak pada rakyat, dengan prinsip tata kelola pemerintah yang transparan,</p>	<p><b>PP 4:</b> Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Profesional dan Melayani</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>2. Program Perencanaan, Pengendalian dan</li> </ol>

<b>Prioritas Nasional (Asta Cita)</b>	<b>Prioritas Provinsi Bengkulu</b>	<b>Prioritas Kabupaten Rejang Lebong</b>	<b>Program Prioritas Kabupaten Rejang Lebong</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia  <b>PN 7:</b> Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	bersih, berkeadilan, dan berlandaskan nilai religius		Evaluasi Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Program Perekonomian dan Pembangunan 5. Program Kepegawaian Daerah 6. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 7. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 8. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
<b>PN 2:</b> Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru  <b>PN 5:</b> Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	<b>PP 7:</b> Mendorong pengembangan wisata hijau sebagai langkah strategis dalam pembangunan yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dan berkelanjutan serta berketahanan iklim	<b>PP 5:</b> Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau dan Ketahanan Wilayah	1. Program Penyuluhan Pertanian 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait Dengan PPLH 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 7. Program Pengelolaan Persampahan 8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 9. Program Penanggulangan Bencana

### 3.2.4.2 Program Prioritas Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Rejang Lebong secara terarah, sistematis, dan berdampak nyata bagi masyarakat, telah disusun kerangka strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang terintegrasi. Penyusunan ini berlandaskan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), berbasis data dan bukti (*evidence-based planning*), serta berorientasi pada hasil (*result-based management*).

Setiap strategi yang ditetapkan merupakan penjabaran logis dari misi pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan tantangan struktural dan peluang strategis daerah, baik dalam sektor birokrasi, ekonomi, infrastruktur, pelayanan dasar, sosial budaya, maupun keberlanjutan lingkungan. Arah kebijakan kemudian dirumuskan sebagai langkah-langkah konkret yang menjembatani strategi dengan implementasi teknis di lapangan, memastikan bahwa setiap program prioritas memiliki landasan konseptual yang kuat dan relevan dengan kondisi faktual di masyarakat.

Program prioritas daerah berfungsi sebagai jembatan antara strategi makro RPJMD dengan pelaksanaan operasional di tingkat perangkat daerah, sekaligus sebagai media integrasi kebijakan sektoral dan kewilayahan. Dalam rangka menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dan daerah, program-program prioritas Kabupaten Rejang Lebong telah disusun dengan mengacu pada dokumen RPJMN 2025–2029, khususnya 17 Program Prioritas Nasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Keselarasan ini menjadi kunci untuk memastikan sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Tabel berikut ini menyajikan pemetaan program-program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong. Pemetaan ini dilengkapi dengan outcome, dan indikator terkait kesesuaian maupun kebutuhan penyempurnaan program.

**Tabel 3. 10**  
**Visi, Misi dan Program Prioritas RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025-2029**

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KETERANGAN (7)	
<b>Visi : Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan</b>							
<b>MISI 1</b>							
Membangun Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Kredibel dan efektif didukung Sumber Daya Manusia yang berakhlak dan Profesional.	T1 : Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan yang berkualitas	S1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya tata kelola pemerintah.	Indeks Reformasi Birokrasi	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bagian Organisasi Setda Kab. RL dan Seluruh Perangkat Daerah	
				11 : Nilai SAKIP		5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPDPersentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program Prioritas yang didukung program daerah			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPDP dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KETERANGAN (7)
			<p>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan</p> <p>Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam</p> <p>Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan</p>	<p>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA</p> <p>Efektivitas pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan</p> <p><b>I2 : Indeks Profesionalitas ASN</b></p>	4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. RL
		<p>S1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN</p> <p>Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi</p>	<p>Persentase ASN yang tersertifikasi</p> <p>Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</p> <p><b>I3 : Indeks SPBE</b></p>	<p>5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</p> <p>5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</p>	<p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p>
		<p>S1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah</p>	<p>Persentase Tingkat Keuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)</p>	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KETERANGAN (7)
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Persentase aplikasi yang dikembangkan <b>I4 : Predikat Opini BPK</b>	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		S1.1 : Meningkatkan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya tata kelola anggaran	1.Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD 2.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik 3.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.Persentase Penurunan SILPA 5. Persentase terlaksananya Pelaporan keuangan Tepat Waktu	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		S1.2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan  Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	<b>I1 : Indeks Kepuasan Masyarakat</b>  Cakupan SPM Bidang Rumah Sakit	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rumah Sakit Umum Daerah

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KETERANGAN (7)
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkannya Persentase Akta kelahiran Yang diterbitkan bagi yang melaporkannya Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkannya Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkannya	2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai Ketentuan	2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)	
<b>MISI 2</b> Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian dan daya saing Daerah Berbasis Agrowisata dan Potensi Unggulan Daerah	T2 : Terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah	S2.1 : Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan pariwisata	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	(6)	(7)	
				<b>I1 : Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan</b>			3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
						Peningkatan Produksi tanaman Pangan (padi)	Dinas Pertanian dan Perikanan
						Peningkatan Produksi Hortikultura	
Peningkatan Produksi Perkebunan (kopi, aren, karet, sawit)							
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Peningkatan Produksi Paternakan	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan	
				Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B (luas lahan pertanian yang diperda LP2B/luas lahan pertanian/sawah di RL)			
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	<b>I2: Kontribusi PAD Sektor Pariwisata</b>	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Pertanian dan Perikanan	
		S2.1 : Meningkatkan kontribusi sektor unggulan dan pariwisata					

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KFT. (7)
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan Wisatawan Nusantara	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata
		S2.2 : Meningkatkan investasi daerah		<b>I.1. Nilai Investasi Daerah</b>		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi	2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
		S3.3 : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemberdayaan sosial	I.1. Tingkat Kemiskinan	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial		
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
			Meningkatnya Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Kelurahan/Desa yang melaksanakan Pengelolaan dan pendataan Data Fakir Miskin	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KFT. (7)
		S3.3 : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	I.2. Pendapatan Perkapita	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
		S3.3 : Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat		I.3. Rasio Gini		
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
				Pertumbuhan wirausaha		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan pendataan Data Fakir Miskin	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	1.01.02 - PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPRPKP
		S3.4 : Menurunnya angka pengangguran		<b>I.1. Tingkat Pengangguran Terbuka</b>		
			Meningkatnya pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam Negeri	2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Meningkatnya pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>MISI 3</b> Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui penguatan konektivitas antar wilayah, Pemantapan dan Pemerataan Infrastruktur Daerah	T3.1 : Terwujudnya peningkatan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Dasar			<b>Indeks Pembangunan Manusia</b>		

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
		S3.1 : Meningkatkan Pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan merata	<p>Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah</p> <p>Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI</p> <p>Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS) SMP/MTS</p> <p>Angka Kelulusan SD/MI</p> <p>Angka Kelulusan SMP/MTs</p> <p>Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar</p>	<p><b>I1 : Rata-rata lama sekolah</b></p> <p><b>I2 : Harapan Lama Sekolah</b></p> <p>1. Indeks Distribusi /Pemerataan Guru :</p> <p>2. Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikasi Pendidik:</p>	<p>1.01.02 - PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</p> <p>1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p> <p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
		S3.2 : Meningkatkan Kesehatan yang merata dan berkualitas	<p>Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan</p> <p>Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat</p> <p>Prevalensi Balita Stunting</p> <p>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</p>	<p><b>I1: Umur Harapan Hidup</b></p> <p>Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup</p> <p>Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup</p>	<p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p>	<p>Dinas Kesehatan</p>

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
				<p>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</p> <p>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</p> <p>Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar</p> <p>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</p> <p>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</p>		

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
				<p>Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</p> <p>Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</p> <p>Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan</p> <p>Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)</p> <p>Rasio puskesmas per satuan penduduk</p> <p>Rasio pusku per satu penduduk</p> <p>Persentase puskesmas rawat inap</p> <p>Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Cakupan SPM Bidang Rumah Sakit</p> <p>Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan</p>	<p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</p>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>Rumah Sakit Umum Daerah</p> <p>Dinas Kesehatan</p>

<b>VISI/MISI</b> <b>(1)</b>	<b>TUJUAN</b> <b>(2)</b>	<b>SASARAN</b> <b>(3)</b>	<b>OUTCOME</b> <b>(4)</b>	<b>INDIKATOR</b> <b>(5)</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b> <b>(6)</b>	<b>KET.</b> <b>(7)</b>
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rumah Sakit Umum Daerah
	T3.2 : Terwujudnya Pemerataan Infrastruktur Daerah			<b>Indeks Infrastruktur Wilayah</b>		
		S3.3 : Meningkatkan infrastruktur wilayah yang memadai dan merata		<b>11 : Indeks Infrastruktur Wilayah</b>		
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPRPKP
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multi Komoditas	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPRPKP
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPRPKP

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
			<p>Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah</p> <p>Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan</p> <p>Meningkatnya kualitas kawasan permukiman</p> <p>Meningkatnya Tata Kelola Persampahan</p> <p>Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat</p>	<p>Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)</p> <p>Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik</p> <p>Persentase luas kawasan permukiman kumuh &lt;10 Ha yang ditangani</p> <p>Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah</p> <p>Persentase kelengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal jalan Kabupaten/Kota</p>	<p>1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</p> <p>1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</p> <p>1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</p> <p>2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</p> <p>2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</p>	<p>DPUPRPKP</p> <p>DPUPRPKP</p> <p>DPUPRPKP</p> <p>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>Dinas Perhubungan</p>
<p><b>MISI 4</b></p> <p>Meningkatkan stabilitas keamanan dan daya dukung budaya lokal dengan tetap mengedepankan pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif dengan mengutamakan Transformasi Digital dan Inovasi daerah</p>	<p>T4.1 : Meningkatkan Stabilitas Keamanan daerah</p>			<p><b>T4 : 1. Angka Kriminalitas</b></p>		

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
		S4 1: Menurunnya angka kriminalitas daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	<b>11: Angka Kriminalitas</b>	8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik Sosial yang diselesaikan	8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
				<p>Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta penyelenggaraan Tibumtranmas</p> <p>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan</p> <p>Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar</p> <p>Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan masyarakat</p>		
	T4.2 : Terwujudnya peningkatan daya saing daerah	S4.1 : Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perdagangan melalui UMKM dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	<p><b>T4.2 : Indeks Daya Saing Daerah</b></p> <p><b>I1 : Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB</b></p>		
				<p>Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal</p> <p>Pertumbuhan wirausaha</p>	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjalin Kemitraan Ekspor	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
			Meningkatnya Kemudahan Proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin usaha perdagangan yang difasilitasi	3.30.02. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
			Meningkatnya kualitas sarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian
			Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Dinas Pariwisata
			Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan tervalidasi	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Pariwisata
		S4.2 : Meningkatkan transformasi Digital dan Inovasi Daerah		<b>I2 : Indeks Inovasi Daerah</b>		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibngan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
<p><b>MISI 5</b> Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan lingkungan sehingga terwujudnya ekonomi hijau untuk membangun Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing</p>	<p>T5 : Meningkatkan Ekonomi Hijau dan keseimbangan Lingkungan yang berkelanjutan</p>	<p>S5.1 : Terwujudnya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Kualitas Lingkungan</p>	<p>Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan</p>	<p>Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan</p> <p><b>T5 : Indeks Ekonomi Hijau</b></p> <p><b>I1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b></p>	<p>5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p>
			<p>Menurunnya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan</p>	<p>Indeks Kualitas Udara</p> <p>Indeks Kualitas Air</p> <p>Indeks Kualitas Lahan</p>	<p>2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>
			<p>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman hayati</p> <p>Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</p>	<p>Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)</p> <p>Persentase MHA Yang Ditingkatkan Kapasitasnya</p>	<p>2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</p> <p>2.11.07 - PROGRAM PANGKAHAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
			Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Ligungan Hidup Yang Ditingkatkan Kompetensinya	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
		S5.1 : Terwujudnya pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peningkatan Kualitas Lingkungan		<b>I2 : Persentase Penurunan Emisi GRK</b>		
			Meningkatnya Tata Kelola Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal jalan Kabupaten/Kota	2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi tanaman Pangan (padi) Peningkatan Produksi Hortikultura Peningkatan Produksi Perkebunan (kopi, aren, karet, sawit)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan

VISI/MISI (1)	TUJUAN (2)	SASARAN (3)	OUTCOME (4)	INDIKATOR (5)	PROGRAM PRIORITAS (6)	KET. (7)
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Peningkatan Produksi Peternakan Persentase SDM Penyuluh yang titingkatkan Persentase Kelembagaan Koperasi tani yang dibentuk yang beroperasi	3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Pertanian dan Perikanan

### 3.2.4.3 Program Unggulan Janji Kampanye

Selain program pembangunan daerah, juga terapat 15 janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang merupakan program strategis daerah. Program strategis daerah merupakan program prioritas pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong, 15 program unggulan yang dirancang menjawab tantangan mencakup berbagai sektor yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Penyediaan Ambulans Gratis Setiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa
2. Program Orang Tua Asuh untuk Anak Yatim dan Tidak Mampu
3. Percepatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong
4. Penerangan Jalan Umum dan Median Jalan di Jalan Utama
5. Pembuatan Taman Bermain Anak
6. Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rejang Lebong dan Stadion
7. Alih Fungsi Stadion menjadi Ruang Terbuka Publik
8. Perluasan Lapangan Setia Negara Sebagai Fungsi Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik
9. Penyediaan Rumah Singgah bagi Masyarakat Rejang Lebong yang akan berobat
10. Penertiban Pembuangan Sampah sembarangan
11. Mewujudkan Rejang Lebong sebagai Kabupaten Wisata
12. Pengelolaan Gedung PIC untuk peningkatan PAD
13. Pemanfaatan Mobil BD 1 K dan BD 2 K untuk Mobil Bantu Rakyat
14. Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan penguatan BUMDes, Pariwisata dan Pertanian
15. Revitalisasi BUMD agar sehat dan berdaya saing yang dapat membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan daerah

**Tabel 3. 11**  
**Rumusan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong**  
**Pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2025-2029**

No (1)	Program (2)	Rumusan Program (3)	Sasaran (4)	Metode Pelaksanaan (5)	OPD (6)
1	<p><b>Penyediaan Ambulans Gratis Setiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa</b></p>	<p>Program ini merupakan upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan mempercepat penanganan medis darurat serta wujud komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan ambulans gratis di setiap kecamatan dan kelurahan/desa dengan target 177 ambulans.</p>	<p>Penguatan akses layanan kesehatan darurat serta memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat memperoleh akses cepat terhadap layanan transportasi medis, terutama dalam kondisi gawat darurat. Dengan adanya ambulans gratis di 15 kecamatan, 34 kelurahan dan 122 desa di Kabupaten Rejang Lebong, masyarakat tidak lagi terbebani oleh biaya transportasi medis, serta dapat merasa lebih aman karena ketersediaan sarana pertolongan pertama yang memadai telah disiapkan secara merata.</p>	<p>APBD Kabupaten Rejang Lebong, APBD Provinsi Bengkulu dan Dana CSR (<i>Corporate Social Responsibility</i>)</p>	<p><b>Utama :</b> Dinas Kesehatan  <b>Pendukung :</b>                      Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Sosial, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, Kecamatan, Desa</p>
2	<p><b>Program Orang Tua Asuh untuk Anak Yatim dan Tidak Mampu</b></p>	<p>Program ini untuk membantu meringankan beban kehidupan anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu dan memberikan semangat dan motivasi dalam menjalankan kehidupannya.</p>	<p>Meningkatkan perlindungan bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang berasal dari keluarga kurang mampu dan berdomisili di Kabupaten Rejang Lebong yang merupakan anak usia PAUD sampai dengan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan merupakan anak diluar Lembaga Pengasuhan Anak, Panti Sosial, Panti Asuhan atau sejenisnya.</p>	<p>Santunan dari Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong</p>	<p><b>Utama :</b> Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rejang Lebong  <b>Pendukung :</b>                      Dinas Sosial dan Kecamatan, Baznas Kabupaten Rejang Lebong</p>

No (1)	Program (2)	Rumusan Program (3)	Sasaran (4)	Metode Pelaksanaan (5)	OPD (6)
3	<b>Percepatan Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong</b>	Program ini untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman.	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan sebagai fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar konektivitas antarwilayah, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar.	APBD Kabupaten Rejang Lebong, Dana Alokasi Khusus (DAK)	<b>Utama</b> : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
4	<b>Penerangan Jalan Umum dan Median Jalan di Jalan Utama</b>	Program ini untuk peningkatan Penerangan Jalan Umum di Median Jalan Kabupaten Rejang Lebong dengan target 42 titik pertahun.	Menciptakan lingkungan jalan yang aman, nyaman, dan representatif, terutama pada malam hari, guna mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi, meminimalisir risiko kecelakaan lalu lintas, meningkatkan rasa aman bagi pengguna jalan. Sementara itu, penataan median jalan dilakukan untuk memperbaiki estetika kota serta mengatur arus lalu lintas agar lebih tertib dan efisien.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	<b>Utama</b> : Dinas Perhubungan
5	<b>Pembuatan Taman Bermain Anak</b>	Program ini bertujuan untuk membangun Area Taman Bermain untuk Anak dengan lokasi di samping rumah dinas Bupati Rejang Lebong.	Mewujudkan kabupaten yang ramah anak, dengan lokasi strategis, mudah dijangkau masyarakat, dan berada di pusat kota, sehingga dapat menjadi ruang terbuka yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan. Fasilitas yang disediakan meliputi arena permainan fisik, taman interaktif, serta elemen edukatif yang mendorong perkembangan sosial dan motorik anak.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	<b>Utama</b> : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman <b>Pendukung</b> : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	<b>Relokasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rejang Lebong dan Stadion</b>	Program ini dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendekatkan Rumah Sakit ke lokasi yang lebih	Menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan derajat kesehatan penduduk secara berkelanjutan. Selain itu agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah,	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yaitu kombinasi	<b>Utama</b> : Rumah Sakit Umum Daerah <b>Pendukung</b> : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

No (1)	Program (2)	Rumusan Program (3)	Sasaran (4)	Metode Pelaksanaan (5)	OPD (6)
b	Relokasi Stadion Kabupaten Rejang Lebong	representatif dan strategis yaitu di depan Lapangan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong	sehingga pelayanan kesehatan menjadi lebih merata dan inklusif. Relokasi ini juga memungkinkan pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih modern, lengkap, dan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, guna mendukung peningkatan kapasitas layanan, kenyamanan pasien, serta efisiensi operasional rumah sakit. Mendukung pengembangan sektor olahraga dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta mewujudkan pusat kegiatan olahraga yang representatif, modern, dan multifungsi, yang tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, pembinaan atlet daerah, serta tempat penyelenggaraan kegiatan masyarakat dan kejuaraan berskala lokal maupun regional.	antara APBD/APBN dengan pihak swasta	Pemukiman , Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup
7	<b>Alih Fungsi Stadion menjadi Ruang Terbuka Publik</b>	Program ini untuk memperluas sarana olahraga di Kabupaten Rejang Lebong dengan lokasi di Desa Bandung Marga Kecamatan Bermani Ulu Raya	Mendukung pengembangan sektor olahraga dan peningkatan kualitas sarana prasarana publik serta mewujudkan pusat kegiatan olahraga yang representatif, modern, dan multifungsi, yang tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial, pembinaan atlet daerah, serta tempat penyelenggaraan kegiatan masyarakat dan kejuaraan berskala lokal maupun regional.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	<b>Utama</b> : Dinas Pemuda dan Olaharaga <b>Pendukung</b> : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	Program ini untuk melengkapi sarana prasarana fasilitas umum di Kabupaten Rejang Lebong	Revitalisasi kawasan pusat kota sekaligus mendukung penyediaan ruang publik yang inklusif, ramah keluarga, dan berwawasan lingkungan, terbuka untuk berbagai aktivitas sosial, budaya, ekonomi kreatif, hingga rekreasi warga.	Revitalisasi kawasan pusat kota sekaligus mendukung penyediaan ruang publik yang inklusif, ramah keluarga, dan berwawasan lingkungan, terbuka untuk berbagai aktivitas sosial, budaya, ekonomi kreatif, hingga rekreasi warga.	APBD Kabupaten Rejang Lebong, Dana CSR ( <i>Corporate Social Responsibility</i> )	<b>Utama</b> : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman <b>Pendukung</b> : Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup

No	Program	Rumusan Program	Sasaran	Metode Pelaksanaan	OPD
(1) 8	<b>Perluasan Lapangan Setia Negara Sebagai Fungsi Ruang Terbuka Publik (RTP) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>(3)</b> Program ini untuk menjadikan Lapangan Setia Negara dengan konsep yang betul- betul terbuka dengan jogging track tetap, di tambahkan <i>mini soccer</i> dan <i>food corner</i> serta kedepannya perluasan setianegara menjadi alun - alun kota termasuk pemindahan Balai Agung ke Lapangan Dwi Tunggal	<b>(4)</b> Meningkatkan akses masyarakat terhadap ruang terbuka yang berkualitas, menyediakan tempat berkumpul yang nyaman, aman, dan estetis; memberikan ruang ekspresi dan kreativitas komunitas lokal; mendukung daya tarik wisata kota dan aktivitas ekonomi masyarakat serta menjadikan Ruang Terbuka Hijau melalui penambahan elemen vegetasi, taman tematik, jalur hijau, serta melalui fasilitas ramah lingkungan lainnya, kawasan ini akan menjadi paru-paru kota dan mendukung ketahanan iklim lokal.	<b>(5)</b> APBD Kabupaten Rejang Lebong dan APBN	<b>(6)</b> <b>Utama</b> : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman <b>Pendukung</b> : Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Bagian Umum Setda Kabupaten Rejang Lebong.
9	<b>Penyediaan Rumah Singgah bagi Masyarakat Rejang Lebong yang akan berobat</b>	Program ini untuk membantu masyarakat Rejang Lebong yang akan berobat di Bengkulu, Palembang dan Jakarta	Meningkatkan fasilitas pendukung pasien rujukan, kualitas pelayanan publik serta memperkuat perlindungan sosial, khususnya dalam bidang kesehatan. Fasilitas ini diharapkan dapat meringankan beban biaya masyarakat, meningkatkan kepatuhan kontrol pasien rujukan, serta mempercepat proses pemulihan kesehatan warga.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	<b>Utama</b> : Dinas Sosial <b>Pendukung</b> : Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah
10	<b>Penertiban Pembuangan Sampah sembarangan</b>	Program ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, memperkuat sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, serta menegakkan regulasi terkait kebersihan dan ketertiban umum.	Menurunkan volume timbulan sampah , mengurangi pencemaran lingkungan, serta menumbuhkan budaya hidup bersih di seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi publik, penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan penegakan hukum serta pelibatan masyarakat dan komunitas lokal dalam pengelolaan sampah seperti pelibatan Kelompok Swadaya Masyarakat dan pembentukan Bank Sampah	APBD Kabupaten Rejang Lebong	<b>Utama</b> : Dinas Lingkungan Hidup <b>Pendukung</b> : Kecamatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program	Rumusan Program	Sasaran	Metode Pelaksanaan	OPD
(1) 11	<b>Mewujudkan Rejang Lebong sebagai Kabupaten Wisata</b>	(3) Program ini ditujukan untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pelestarian budaya serta lingkungan.	(4) Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kabupaten wisata melalui penguatan regulasi dibidang kepariwisataan, pengembangan destinasi baru, penguatan destinasi wisata melalui pembangunan dan penataan infrastruktur penunjang (akses jalan, penerangan, toilet, tempat ibadah, papan informasi), Peningkatan promosi dan pemasaran wisata berbasis digital dan kolaboratif serta pemberdayaan masyarakat lokal (ekonomi kreatif, homestay, UMKM, pemandu wisata) agar ikut serta dalam rantai ekonomi wisata serta kolaborasi lintas sektor dan mitra strategis (swasta, BUMDes, investor, komunitas) untuk pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata. Beberapa lokus pengembangan destinasi wisata yang sudah ada diantaranya adalah : 1. Danau Mas Harun Bastari (DMHB) Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang. 2. Bukit Kaba (termasuk pelaksanaan tindak lanjut MOU dengan BKSDA untuk penyelenggaraan, penguatan fungsi kawasan pelestarian alam dalam rangka pengembangan kawasan wisata alam di Taman Wisata Alam Bukit Kaba Kabupaten Rejang Lebong) 3. Suban Air Panas (Desa Cawang Baru Kecamatan Curup Timur) Serta pengembangan destinasi wisata baru diantaranya adalah: 1. View Bukit Basah (Kecamatan Curup Utara) dengan wisata Tobo Leceak ( <i>camping ground</i> Desa Dusun Sawah) 2. Danau Bermanei Talang Kering (Kecamatan Curup Utara) dengan wisata rakit.	(5) APBD Kabupaten Rejang Lebong	(6) <b>Utama</b> : Dinas Pariwisata <b>Pendukung</b> : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

No (1)	Program (2)	Rumusan Program (3)	Sasaran (4)	Metode Pelaksanaan (5)	OPD (6)
12	<b>Pengelolaan Gedung PIC untuk peningkatan PAD</b>	Program ini bertujuan untuk memaksimalkan penggunaan gedung <i>Place Information Centre</i> (PIC) di Jakarta sebagai salah satu alternatif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	3. Air Terjun Curup Lekat (Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah) 4. Arung Jeram (Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang)  Meningkatkan fungsi gedung aset daerah agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dengan menarik investor untuk dapat menyewa dan menggunakan ruang gedung yang ada.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	<b>Utama</b> : Bagian Umum Setda Kabupaten Rejang Lebong <b>Pendukung</b> : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
13	<b>Pemanfaatan Mobil BD 1 K dan BD 2 K untuk Mobil Bantu Rakyat</b>	Program ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah untuk dapat memanfaatkan kendaraan perorangan dinas Bupati dan Wakil Bupati terutama pada hari libur untuk kegiatan pernikahan atau lainnya.	Meningkatkan kecepatan dan kehadiran pelayanan publik di tingkat masyarakat serta membangun pemerintahan yang merakyat, terbuka, dan efisien, dengan prinsip bahwa fasilitas negara harus kembali memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat.	APBD Kabupaten Rejang Lebong	<b>Utama</b> : Bagian Umum Setda Kabupaten Rejang Lebong

No	Program (2)	Rumusan Program (3)	Sasaran (4)	Metode Pelaksanaan (5)	OPD (6)
14	<p><b>Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa dengan penguatan BUMDes, Pariwisata dan Pertanian</b></p>	<p>Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, fasilitasi pemasaran produk lokal melalui promosi daerah, pasar digital dan penguatan kelembagaan koperasi (termasuk penguatan program pusat yaitu koperasi merah putih) dan pelaku usaha kecil serta peningkatan akses UMKM terhadap kebijakan fiskal dan program CSR</p>	<p>Penguatan kerjasama persero daerah dengan pemerintahan desa dilakukan melalui peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi lokal. BUMDes didorong untuk mengembangkan unit usaha strategis yang berbasis pada potensi desa masing-masing, seperti Agrowisata dan desa wisata, untuk menarik wisatawan sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat dan pertanian terpadu dan pengolahan hasil pertanian, guna meningkatkan nilai tambah dan ketahanan pangan lokal;</p>	<p>APBD Kabupaten Rejang Lebong, Dana Desa, CSR</p>	<p><b>Utama</b> : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian <b>Pendukung</b> : Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</p>
15	<p><b>Revitalisasi BUMD agar sehat dan berdaya saing yang dapat membuka lapangan kerja dan sumber pendapatan daerah</b></p>	<p>Pemberdayaan BUMD untuk lapangan kerja seperti dibidang travel, sewa mobil dinas, menampung hasil pertanian dan menyalurkannya</p>	<p>Meningkatkan peran BUMD yang sehat dan profesional dalam penyediaan layanan publik, penggerak ekonomi lokal, serta penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat melalui perbaikan tata kelola dan manajemen keuangan, Penataan kelembagaan dan SDM, Pemetaan ulang lini usaha, Optimalisasi aset daerah yang dapat dikelola BUMD secara produktif dan bernilai ekonomi tinggi dan kemitraan strategis dengan swasta dan investor untuk pengembangan usaha.</p>	<p>APBD Kabupaten Rejang Lebong</p>	<p><b>Utama</b> : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Rejang Lebong <b>Pendukung</b> : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian</p>

## **BAB IV**

### **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

#### **4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Program perangkat daerah merupakan instrumen strategis untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD dan diimplementasikan oleh masing-masing perangkat daerah. Dalam perencanaannya, program-program ini disusun dengan memperhatikan permasalahan daerah, isu-isu strategis, serta visi dan misi kepala daerah terpilih. Visi dan misi Bupati Kabupaten Rejang Lebong, yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan pelayanan publik, menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Setiap program yang dirancang bertujuan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang kesemuanya berakar pada visi misi Bupati. Misalnya, dalam misi peningkatan kesejahteraan masyarakat, program-program akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang merata. Program yang mendukung IKU akan berkontribusi pada pencapaian target pembangunan terkait langsung visi dan misi 2025-2029, sementara IKD dan IKK lebih diarahkan untuk mengukur keberhasilan program daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selama lima tahun ke depan, pembangunan Kabupaten Rejang Lebong akan diarahkan pada program-program prioritas yang mencerminkan visi misi Bupati, seperti peningkatan layanan publik, infrastruktur strategis, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Setiap program dilengkapi dengan estimasi kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja yang jelas untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan. Dengan pendekatan ini, visi misi Bupati dapat diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang terukur, selaras dengan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET (05)	PAGU (06)	TARGET (07)	PAGU (08)	TARGET (09)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	(15)		
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Tujuan: Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
Sasaran: Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA																
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tepat dan tepat waktu (%)	100	100	100	232.211.572,912.28	100	238.882.722,468.98	100	238.422.744,893.58	100	240.935.542,140.82	100	243.386.847,562.02		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Tujuan: Meningkatkan intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Kemampuan Literasi SD Umum	65.04	72.87	72.90		72.92		72.95		73.00		73.10				
	Kemampuan Numerasi SD Umum	63.31	73.00	73.50		73.55		73.60		73.70		73.80				
	Kemampuan Literasi SMP Umum	65.78	69.12	69.50		69.60		69.70		69.80		69.90				
	Kemampuan Numerasi SMP Umum	61.35	68.59	68.80		68.90		68.95		70.00		70.50				
	Harapan Lama Sekolah	8.28	8.28	8.28		8.50		8.60		8.70		8.80				
	Rate-rata Lama Sekolah	13.83	13.83	13.83		13.85		13.87		13.80		13.92				
	APK PAUD	48.85	55	56		57		58		50		50				
Sasaran: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah pertama dan pendidikan non formal	APK SD/MI/Paket A	109.78	100	100		100		100		100		100				
	APM SD/MI/Paket A	113.38	100	100		100		100		100		100				
	APK SMP/MTs/Paket B	84.04	84.53	84.47		84.47		84.47		84.47		84.47				
	APM SMP/MTs/Paket B	81.82	92.31	98.6		98.6		98.6		98.6		98.6			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.02 - PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN																
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase Anak usia 4-15 Tahun Penyandang Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (%)	-	-	100	55.077.157,500.00	100	63.532.394,214.00	100	69.418.000,000.00	100	89.730.000,000.00	100	91.808.000,000.00			
	Angka Putus Sekolah SD/MI (APS) SD/MI	0.56	0.513	0.513		0.515		0.516		0.517		0.518				
	Angka Putus Sekolah SMP/MTS (APS) SMP/MTS	2.2	1.82	1.5		1.4		1.3		1.2		1.1				
	Angka Kelulusan SD/MI	92.46	98.74	100		100		100		100		100				
	Angka Kelulusan SMP/MTs	97.87	100	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	(03) 54.24	(04) 64.85	(05) 66.89	(06)	(07) 70	(08)	(09) 70.1	(10)	(11) 70.1	(12)	(13) 70.2	(14)	(15)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1. Indeks Distribusi /Pemerataan Guru ; 2. Persentase Guru Yang Memiliki Sertifikasi Pendidik	0.23	0.41	0.35	-	0.68	310,000,000.00	0.80	320,000,000.00	0.96	330,000,000.00	1.11	340,000,000.00			
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		26.82	27.66	28.67		30.33		32.00		33.87						
Tujuan: Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB						
Sasaran : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	BB	BB		BB		BB		A						
	Persentase Inovasi yang terealisasi	100	100	100		100		100		100						
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA																
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Dinas Kesehatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	88,041,690,619.70	100	88,878,245,606.80	100	88,788,019,267.00	100	91,131,714,459.07	100	83,380,045,604.27			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA																
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskesmas Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	417,996,349.00	100	393,760,983.90	100	403,862,082.29	100	414,763,290.52	100	426,534,119.57			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA																
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskesmas Perumnas	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	211,609,536.00	100	216,092,354.00	100	217,092,354.00	100	218,092,354.00	100	219,092,354.00			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA																
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskesmas Tunas Harapan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	182,376,700.00	100	154,232,700.00	100	161,332,700.00	100	166,336,700.00	100	172,356,736.00			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA																
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskesmas Sambirejo	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	136,200,000.00	100	106,360,000.00	100	110,360,000.00	100	112,360,000.00	100	114,360,000.00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Talang Rimbo Lama	
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Talang Rimbo Lama	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	154,541,548.00	100	132,457,556.80	100	144,644,322.10	100	156,017,994.22	100	172,896,310.75			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA															Puskesmas Sumber Urip	
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Sumber Urip	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	122,700,785.15	100	134,020,863.66	100	146,447,850.03	100	160,092,745.03	100	175,077,016.53			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA															Puskesmas Watas Marga	
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Watas Marga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	130,525,370.00	100	105,530,427.00	100	114,178,552.00	100	123,507,827.00	100	133,472,776.00			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA															Puskesmas Kampung Melayu	
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Kampung Melayu	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	105,418,068.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA															Puskesmas Bangun Jaya	
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Bangun Jaya	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	147,050,000.00	100	116,850,000.00	100	120,850,000.00	100	125,850,000.00	100	128,850,000.00			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA															Puskesmas Curup Timur	
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Curup Timur	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	216,206,794.50	100	236,693,473.95	100	259,172,121.35	100	283,839,068.48	100	310,910,261.58			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA															Puskesmas Padang Ulak Tanding	
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Padang Ulak Tanding	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	160,633,255.60	100	141,482,667.34	100	155,642,154.07	100	171,206,369.48	100	188,327,006.43			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENENKOTA															Puskesmas Beringin Tiga	
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Puskesmas Beringin Tiga	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	110,659,000.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00	100	71,818,068.00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET (05)	PAGU (06)	TARGET (07)	PAGU (08)	TARGET (09)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)	PAGU (16)	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskasmas Tanjung Agung
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskasmas Tanjung Agung	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	121.360.909.00	100	97.286.999.00	100	106.940.809.00	100	117.559.669.00	100	76.337.445.00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															Puskasmas Kampung Delima
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskasmas Kampung Delima	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	152.993.508.00	100	188.292.858.80	100	185.122.144.98	100	203.834.359.15	100	223.997.795.06		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															Puskasmas Sindang Jati
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskasmas Sindang Jati	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	117.056.899.50	100	127.716.983.20	100	139.414.660.11	100	152.265.296.98	100	186.352.453.82		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															Puskasmas Sindang Dataran
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskasmas Sindang Dataran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	149.644.462.00	100	123.524.908.00	100	131.861.388.00	100	140.932.537.00	100	150.811.064.00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															Puskasmas Kota Padang
Meningkat tata kelola pemerintahan pada Puskasmas Kota Padang	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	138.256.942.00	100	113.209.842.00	100	124.149.492.00	100	132.877.492.00	100	141.805.492.00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															Puskasmas Sindang Belit Ilir
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskasmas Sindang Belit Ilir	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	126.549.107.00	100	97.331.204.00	100	97.331.204.00	100	97.331.204.00	100	97.331.204.00		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															Puskasmas Simpang Nangka
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskasmas Simpang Nangka	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	135.099.200.00	100	114.120.820.00	100	121.240.167.00	100	132.048.854.95	100	144.191.823.21		
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															Puskasmas Kepala Curup
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Puskasmas Kepala Curup	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tabel dan tepat waktu	100	100	100	124.681.312.50	100	135.319.923.75	100	147.022.396.13	100	159.895.115.74	100	174.065.107.31		





BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEWANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puakeemas Perummas			
				95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	1,864.451,128
				85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
				50	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
				84	81	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	
				95	96	100	1,836.459,200,00	100	1,835.351,518	100	1,844.955,033	100	1,854.654,563	100		1,864.451,128	100	1,864.451,128
				95	96	100		100		100		100		100			100	
				83	85	100		100		100		100		100			100	
				100	100	100		100		100		100		100			100	
				80	82	100		100		100		100		100			100	
				100	100	100		100		100		100		100			100	
				60	65	100		100		100		100		100			100	
				100	100	100		100		100		100		100			100	
				100	100	100		100		100		100		100			100	
				100	100	100		100		100		100		100			100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEWANGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	(01)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Tunas Harapan	
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		100		1.857.868,820
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	92	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	1.407.700.000,00	100	1.504.720.000,00	100	1.611.442.000,00	100	1.728.836.200,00	100	1.857.868,820	100		
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	(01)	(03)	100	(05)	1,542,500,000.00	(07)	1,582,500,000	(09)	1,812,500,000	(11)	1,842,500,000	(13)	1,882,500,000	(15)		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100	100	1,542,500,000.00	100	1,582,500,000	100	1,812,500,000	100	1,842,500,000	100	1,882,500,000			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	88.61	95	100		100		100		100		100				
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	90.83	100	100		100		100		100		100				
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	88.16	100	100		100		100		100		100				
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91.49	100	100		100		100		100		100				
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	55.87	100	100		100		100		100		100				
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	32.65	100	100		100		100		100		100				
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	85.57	100	100		100		100		100		100				
	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	856,397,680.00	100	864,775,634	100	873,321,146	100	882,037,569	100	890,926,321		Puskemas Telang Rimbo Lama
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		95	95	100		100		100		100		100				
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		93	93	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	(03) 100	(04) 100	(05) 100	(06) 100	(07) 100	(08) 100	(09) 100	(10) 100	(11) 100	(12) 100	(13) 100	(14) 100	(15) 100	Puskesmas Sumber Urip	
		80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		60	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		83	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					954,955,400.00	100	1,006,700,940	100	1,063,821,034	100	1,128,233,137	100	1,195,106,451			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
				2026		2027		2028		2029		2030					
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	(03)	60	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Prakesmas Watas Marga	
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,086.500.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,046.500.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		1,006.500.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		966.500.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		926.500.000.00
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		900.000.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		880.000.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		860.000.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		840.000.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		820.000.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		800.000.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		780.000.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		760.000.000
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		740.000.000
1,02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	926.500.000.00	100	966.500.000	100	1.006.500.000	100	1.046.500.000	100	1.086.500.000	1.086.500.000			
		95	95	100	900.000.000	100	880.000.000	100	860.000.000	100	840.000.000	100	820.000.000	800.000.000			
		93	93	100	780.000.000	100	760.000.000	100	740.000.000	100	720.000.000	100	700.000.000	680.000.000			
		100	100	100	660.000.000	100	640.000.000	100	620.000.000	100	600.000.000	100	580.000.000	560.000.000			
		80	80	100	540.000.000	100	520.000.000	100	500.000.000	100	480.000.000	100	460.000.000	440.000.000			
		100	100	100	420.000.000	100	400.000.000	100	380.000.000	100	360.000.000	100	340.000.000	320.000.000			
		60	60	100	300.000.000	100	280.000.000	100	260.000.000	100	240.000.000	100	220.000.000	200.000.000			
		100	100	100	180.000.000	100	160.000.000	100	140.000.000	100	120.000.000	100	100.000.000	80.000.000			
		100	100	100	60.000.000	100	40.000.000	100	20.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	0.000.000	0.000.000		
		100	100	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	0.000.000	0.000.000		
		100	100	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	0.000.000	0.000.000		
		100	100	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	0.000.000	0.000.000		
		100	100	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	0.000.000	0.000.000		
		100	100	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	100	0.000.000	0.000.000	0.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	(03) 100	(04) 100	(05) 100	(06) 100	(07) 100	(08) 100	(09) 100	(10) 100	(11) 100	(12) 100	(13) 100	(14) 100	(15) 100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	813.836.214,00	100	823.836.214	100	808.836.824	100	843.836.214	100	853.836.214	100	Puskesmas Kampung Melayu	
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	(01)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Bangun Jaya	
	02	83.66	100	100	1.637.500.000,00	100	1.687.500.000,00	100	1.737.500.000,00	100	1.787.500.000,00	100	1.837.500.000,00			
	03	73.3	85	100		100		100		100		100				
	04	76.9	100	100		100		100		100		100				
	05	85	80	100		100		100		100		100				
	06	100	100	100		100		100		100		100				
	07	55.87	100	100		100		100		100		100				
	08	100	100	100		100		100		100		100				
	09	100	100	100		100		100		100		100				
	10	100	100	100		100		100		100		100				
	11	100	100	100		100		100		100		100				
	12	100	100	100		100		100		100		100				
	13	100	100	100		100		100		100		100				
	14	32.65	100	100		100		100		100		100				
	15	59.2	100	100		100		100		100		100				
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		96.2	100	100	987.500.000,00	100	1.015.000.000,00	100	1.072.750.000,00	100	1.136.275.000,00	100	1.171.213.750,00			
		97.39	100	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Padang Ujak Tanding			
		87,22	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		96,71	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		84	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		
		1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		98	100	100	1.650.800.000,00	100	1.772.130.000,00	100	1.805.593.000,00	100	2.052.402.300,00	100		2.213.892.530,00	100	
				97	100	100		100		100		100		100			100	
				95	100	100		100		100		100		100			100	
				99	100	100		100		100		100		100			100	
		100	100	100		100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEWANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
(01)	(02)	<p>1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</p> <p>Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat</p>	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Beringin Tiga		
			66	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
			74	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
			82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
			98	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	
			82	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
			100	95	100	894.500.000,00	100	851.469.835	100	892.866.818	100	838.403.469	100	988.493.848	100		988.493.848	100
			100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
			100	93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100
80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
60	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan seksual standar	100	(04) 100	(06) 100	(07) 100	(08) 100	(09) 100	(10) 100	(11) 100	(12) 100	(13) 100	(14) 100	(15) 100	Puskesmas Tanjung Agung		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		100	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		95	95	1,140,400,000.00	100	1,210,800,000	100	1,285,000,000	100	1,373,050,035	100	1,466,615,800				
		95	95		100		100		100		100		100			
		93	93		100		100		100		100		100			
		100	100		100		100		100		100		100			
		80	80		100		100		100		100		100			
		100	100		100		100		100		100		100			
		60	60		100		100		100		100		100			
		100	100		100		100		100		100		100			
		100	100		100		100		100		100		100			
100	100		100		100		100		100		100					
85	85		100		100		100		100		100					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	(03) 90	(04) 90	(05) 100	(06) 100	(07) 100	(08) 100	(09) 100	(10) 100	(11) 100	(12) 100	(13) 100	(14) 100	(15) 100		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		96.2	98	100	1.330.674.847,20	100	1.419.992.112	100	1.516.241.323	100	1.626.315.455	100	1.745.187.001	100		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	97.39	98	100		100		100		100		100		100		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97.22	98	100		100		100		100		100		100		
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bilita seksual Standar	96.71	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	88	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan seksual standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan seksual standar	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	93	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan seksual standar	95	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa seksual standar	85	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC seksual standar	50	95	100		100		100		100		100		100		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	84	90	100		100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskemas Sindang Jati		
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	100	913.657.000,00	100	961.272.700	100	1.013.649,970	100	1.077.264,967	100	1.134.041,464						
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	100		100		100		100		100							
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	95	100		100		100		100		100							
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100		100		100		100		100							
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	100		100		100		100		100							
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan seksual standar	100	100		100		100		100		100							
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan seksual standar	60	100		100		100		100		100							
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan seksual standar	100	100		100		100		100		100							
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan seksual standar	100	100		100		100		100		100							
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa seksual standar	100	100		100		100		100		100							
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	100		100		100		100		100							
	Persentase orang dengan infeksi terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	80	100		100		100		100		100							
	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat																	Puskemas Sindang Dabaran
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	100	890.500.000,00	100	910.500.000	100	920.500.000	100	940.500.000	100	960.500.000						
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	100		100		100		100		100								

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEWANGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100	1.037.346.247,00	100	1.237.500.000	100	1.267.500.000	100	1.267.500.000	100	1.327.500.000			
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100				
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	60	60	100		100		100		100		100				
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100		100				
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100				
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat																
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	100	100	1.037.346.247,00	100	1.237.500.000	100	1.267.500.000	100	1.267.500.000	100	1.327.500.000			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	100	100		100		100		100		100				
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	100	100		100		100		100		100				
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100		100				

SIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEWANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan seksual standar	100	100	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Sindang Belit Ilir		
	(03) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan seksual standar	60	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	(04) Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	(05) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	(06) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan/jwa sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	(07) Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	(08) Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	(09) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	100	983.782,140.00	100	1.067.338.559	100	1.098.630.487	100	1.131.887.011	100	1.168.616.862	100		1.199.816.862	
	(10) Persentase ibu breastin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	(11) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	83	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	(12) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	(13) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	80	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
	(14) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan seksual standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
(15) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan seksual standar	60	65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
(16) Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan seksual standar	100	100	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puakernas Simpang Nangjka	
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		85	100	100	932.500.000,00	100	982.000.000	100	1.036.450.000	100	1.096.345.000	100	1.162.229.500	100		1.162.229.500
		95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		93	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		60	80	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		60	60	60	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
95	95	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				

1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PEWANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029			2030			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100		100				
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																
Meningkatnya kualitas kesehatan perorgan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	997.500.000,00	100	1.015.000.000,00	100	1.072.750.000,00	100	1.136.275.000,00	100	1.171.213.750,00			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	108,16	100	100		100		100		100		100				
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	97,22	100	100		100		100		100		100				
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	96,71	100	100		100		100		100		100				Puskemas Kepala Caturap
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95,45	90	100		100		100		100		100				
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	35	100	100		100		100		100		100				
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,3	100	100		100		100		100		100				
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83	100	100		100		100		100		100				
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	85	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	50	100	100		100		100		100		100				
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	84	100	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskemas Bermati Ulu
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	95	95	100	1,143,073,000.00	100	1,213,650,300	100	1,291,243,330	100	1,376,617,663	100	1,470,529,428			
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	95	95	100		100		100		100						
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	93	93	100		100		100		100						
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	100	100	100		100		100		100						
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90	90	100		100		100		100						
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100						
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	80	80	100		100		100		100						
	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100						
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100		100		100		100						
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100		100		100		100						
	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	95	95	100		100		100		100						
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90	90	100		100		100		100						
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	95.28	85	85	175,350,000.00	85	192,885,000.00	85	212,173,500.00	85	235,195,850.00	90	251,204,435.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN																
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00			Puskemas Curup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEWANGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Perummas	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00	100	50,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Sumbirejo	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Watas Mangra	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Talang Rimbo Lama	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Sumber Urip	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Tunas Harapan	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Kampung Melayu	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Bangun Jaya	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Curup Timur	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Padang Ujak Tandling	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Beringin Tiga	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN															Puskesmas Tanjung Agung	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB														
			2025		2026		2027		2028		2029		2030																
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU															
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	(02) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	(14)	(15)	Puskesmas Kampung Delima			
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	(02) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Puskesmas Sindang Jati	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	(02) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Puskesmas Sindang Dataran	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	(02) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Puskesmas Kota Pacidang	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	(02) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Puskesmas Sindang Beliti Ilir	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	(02) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Puskesmas Simpang Nangka	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	(02) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Puskesmas Kepala Curup	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	(02) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kesehatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Puskesmas Bermani Ulu	
Sasaran : Meningkatkan Layanan Fasilitas Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Puskesmas)	85	85,5	86,5	87	87,5	88	88,5	89	89,5	90	90,5	91	91,5	92	92,5	93	93,5	94	94,5	95	95,5	96	96,5	97	97,5	98	98,5	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan desakelurahan universal child immunization (UCI) Rasio puskesmas per satuan penduduk	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18	87,18



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.02.01 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Sumber Urip	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Widias Marga	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Kampung Melayu	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Bangun Jaya	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Curup Timur	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Padang Ujak Tanding	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Beringin Tiga	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00			
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Tanjung Agung	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00	100	37.500.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Puskesmas Kumpang Delina
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																Puskesmas Sindang Jab
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																Puskesmas Sindang Dataran
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																Puskesmas Kota Padang
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																Puskesmas Sindang Belit Ilir
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	12.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																Puskesmas Simpang Nangka
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																Puskesmas Kepala Curup
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT																Puskesmas Bermant Ulu
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100	100	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	100	37.500.000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Dinas Kesehatan	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		15	1	985.763.000.00	1.263.527.300	1	1.469.890.030	1	1.793.628.033	1	1.916.890.836					
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN															Dinas Kesehatan	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman		80	85	340.000.000.00	349.000.000	85	358.900.000	87	466.550.000	100	473.205.000					
		7.42	35	40		40		40		45						
		90.56	92	95		95		95		100						
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		69.42	69.68	69.91		70.14		70.37		70.6		70.83				
Sasaran : Meningkatnya Layanan Fasilitas Kesehatan		76.55	76.55	76.90		76.50		80.00		80.50		81.00				
1.02.02 - PROGRAM PENUHUN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															Rumah Sakit Umum Daerah	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat		84.03		85.00	76.808.280.000.00	86.00	18.479.947.000.00	87.00	16.828.945.000.00	88.00	16.195.391.000.00	89.00	15.590.181.000.00			
Sasaran : Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan		27.64		4.29		19.14		16.29		17.43		21.43				
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN															Rumah Sakit Umum Daerah	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan		27.64		4.29	500.000.000.00	19.14	2.028.000.000.00	16.29	1.986.000.000.00	17.43	1.964.000.000.00	21.43	1.989.000.000.00			
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		B	B	B		B		BB		BB		BB		BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah		BB	BB	BB		BB		BB		A		A		A		
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada PUPRPKP		100	100	100	10.269.927.219.83	100	10.700.454.862.03	100	10.700.478.480.95	100	10.846.723.265.46	100	10.933.905.498.11	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERINGKAT DAERAH PEWANGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
TUJUAN : Meningkatkan akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Indeks Layanan Keypuasan Infrastruktur (IKLI)	N/a	N/a	3.1	3.1	3.15	3.2	3.2	3.25	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3		
SASARAN : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Wilayah	Indeks Layanan Keypuasan Infrastruktur (IKLI)	N/a	N/a	3.1	3.1	3.15	3.2	3.2	3.25	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3		
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)																
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multi Komoditas	79.09	80.50	80.45	7.824.808.660.00	80.56	9.135.197.660.00	80.66	9.285.197.660.00	80.70	9.300.197.660.00	80.75	9.335.197.660.00	80.75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terdinding dan bukan jaringan perpipaan terdinding terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	0.77	0.77	0.89	5.900.000.000.00	0.89	5.600.000.000.00	0.89	5.600.000.000.00	0.89	5.600.000.000.00	0.89	6.500.000.000.00	0.89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik layak dan aman)	4.90	0.46	0.22	3.000.000.000.00	0.22	3.200.000.000.00	0.22	3.000.000.000.00	0.22	3.000.000.000.00	0.22	3.000.000.000.00	0.22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE																
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	58.25	58.54	58.64	6.750.000.000.00	58.75	2.386.700.000.00	58.86	2.203.587.000.00	58.97	2.320.602.670.00	59.07	2.237.808.666.70	59.07	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	50	51	52	5.235.000.000.00	53	5.300.200.000.00	54	5.365.802.000.00	55	5.432.111.020.00	56	5.498.832.130.20	56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																
Meningkatnya bangunan dan lingkungan terbias	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	8	8	17	7.000.000.000.00	50	13.000.000.000.00	67	7.000.000.000.00	63	2.000.000.000.00	100	2.000.000.000.00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2028		2029		TARGET	PAGU	
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kematangan Jalan Kabupaten	47,38	49,44	51,59	56,924,090,000,00	53,74	59,051,024,800,00	55,89	59,712,728,948,00	58,04	60,374,250,137,48	60,19	81,040,636,538,85			
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi/Ahli	N/a	N/a	20	470,000,000,00	40	590,000,000,00	60	610,000,000,00	80	630,000,000,00	100	650,000,000,00			
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten	88,07	86,50	86,70	750,000,000,00	86,90	1,690,000,000,00	87,00	1,730,000,000,00	87,20	1,770,000,000,00	87,40	2,080,000,000,00			
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
TUJUAN : Terpuhinya akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	92,22	92,76	92,84		92,91		92,99		93,06		93,14				
SASARAN : Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman, peningkatan jumlah rumah layak huni, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	92,22	92,76	92,84		92,91		92,99		93,06		93,14				
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Terpuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terdapa terlokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara yang terkena reblokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	480,000,000,00	100	315,000,000,00	100	515,200,000,00	100	315,402,000,00	100	515,606,020,00			
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN															Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh <10 Ha yang ditangani	-	-	15,38	1,675,000,000,00	18,18	4,270,000,000,00	22,22	3,860,000,000,00	28,57	3,880,000,000,00	40,00	4,225,000,000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)	TARGET (14)	PAGU (15)	
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase pemukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, Utilitas Umum)	5.56	5.88	573.500.000,00	6.25	686.500.000,00	6.67	686.500.000,00	7.14	686.500.000,00	7.69	686.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTAMAN DAN KETERTIBAN ULMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT															
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B		B		BB		BB		BB		Satuan Polisi Pamong Praja		
SASARAN : Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	Nilai SAKIP OPD	BB	BB		BB		BB		BB		A				
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkat tata kelola pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu (%)	100	100	5.971.988.080,00	100	6.011.823.772	100	6.084.177.820	100	6.147.055.409	100	6.192.461.774			
TUJUAN : Menciptakan Ketertarikan Masyarakat dan Ketertiban Umum	Persentase Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertaman dan Ketertiban (%)	100	100		100		100		100		100				
SASARAN : Meningkatkan Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah	Persentase Penegakan Penyelesaian Pelanggaran Ketertaman, Ketertiban dan Kelandahan (K3) (%)	20	20		20		20		20		20				
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETERTAMAN DAN KETERTIBAN ULMUM															
Meningkatnya penanganan gangguan ketertaman dan ketertiban umum	Persentase penanganan gangguan ketertaman yang dilaksanakan oleh Saipol (P) (%)	100	100	297.314.200,00	100%	350.412.342	100%	413.616.465	100%	5.756.521.081	100%	348.982.628	Satuan Polisi Pamong Praja		
	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan periode serta penyelenggaraan Tibumtanmas (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Perda dan Perkada yang diagakkan (%)	53.57	60.71		64.29		67.86		71.43		75.00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET (05)	PAGU (06)	TARGET (07)	PAGU (08)	TARGET (09)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	(15)
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	100	100	100	100		100		100		100		100		
Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan kesterminan umum, ketertarikan dan perlindungan masyarakat	100	100	100	100		100		100		100		100		
Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	B	B	B	B		B		BB		BB		BB		
Sasaran: Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	BB	BB	BB	BB		BB		BB		BB		BB		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	100	100	100	3.584.402,643.00	100	3.616.407,863.83	100	3.648.784,789.56	100	3.681.568,470.28	100	3.714.734,031.27	
Tujuan: Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	N/A	N/A	N/A	3.1		3.15		3.2		3.25		3.3		
Sasaran: Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Risiko Bencana	112.35	110.35	110.35	106.35		106.35		104.35		102.35		100.35		
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA														
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat. Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	100	100	100	100	586,088,126.00	100	648,820,088.00	100	681,786,489.00	100	675,032,418.57	100	686,533,067.96	
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB					
				2026		2027		2028			2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Penertase Penanganan Pasca Bencana	100	100	100	100		100		100		100		100			
Penertase Penanganan Pra Bencana	100	100	100	100		100		100		100		100			
Penertase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100	100	100	100		100		100		100		100			
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Mengurangi Risiko Bahaya Kebakaran	B	B	B	B		B		BB		BB		BB			
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pemadam Kebakaran	B	B	B	B		B		BB		BB		BB			
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran	100	100	100	100	8.168.779.201,40	100	8.841.857.861,41	100	9.241.530.820,03	100	8.713.970.188,49	100	8.644.390.001,89		Dinas Pemadam Kebakaran
TUJUAN : Meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan kehidupan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan Non Kebakaran	N/A	N/A	N/A	N/A		80-100		80-100		80-100		80-100			
SASARAN : Meningkatkan Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	100	100	100	100		100		100		100		100			
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN															
Meningkatnya Kesiapsiagaan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100	100	318.954.250,00	100	334.850.000,00	100	334.850.000,00	100	2.134.850.000,00	100	418.850.000,00		Dinas Pemadam Kebakaran
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	B	B	B	B		B		BB		BB		BB			
Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah pada Dinas Sosial	BB	BB	BB	BB		BB		BB		A		A			
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Sosial	100	100	100	100	2.059.507.001,20	100	2.102.195.940,00	100	2.135.945.825,00	100	2.170.510.899,00	100	2.205.918.424,00		Dinas Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01) Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial yang inklusif	(02) Indeks Kesejahteraan Sosial	(03) N/a	(04) N/a	(05) 4	(06) 4,3	(07) 4,3	(08) 4,5	(09) 4,5	(10) 4,7	(11) 4,7	(12) 5	(13) 5	(14) 5	(15) 5		
Sasaran : Meningkatkan penanganan permasalahan kesejahteraan sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tertangani	71,9	71,9	71,9	72	72	72,5	72,5	73	73	74	74	74	74		Dinas Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	N/a	N/a	10	50.000.000,00	10	76.500.000,00	12	76.795.000,00	12	81.158.850,00	13	83.593.616,00			
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	N/a	N/a	10		10		12		12		13				
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGERA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN																Dinas Sosial
Meningkatnya penanganan warga negara migran korban kekerasan	Persentase warga negara migran korban tidak kekerasan yang tertangani	-	-	100	-	100	20.600.000,00	100	21.218.000,00	100	21.854.540,00	100	22.510.176,00			
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																Dinas Sosial
Meningkatnya Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100	288.164.543,00	100	374.796.061,00	100	386.039.943,00	100	397.621.141,00	100	408.549.775,00			
	Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100	100	100		100		100		100		100				
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Kelurahan/ Desa yang melaksanakan Pengelolan dan pendataan Data Fakir Miskin	-	-	19,23	130.906.259,00	36,46	134.833.447,00	57,69	138.878.450,00	76,92	143.044.804,00	100,00	147.336.146,00			Dinas Sosial
Sasaran : Meningkatkan pelayanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	Persentase layanan penanganan korban bencana selama tanggap darurat	100	100	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Dinas Sosial
Meningkatnya layanan penanganan penangan korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100	100	125,163,000.00	187,700,000.00	100	187,700,000.00	100	196,130,830.00	100	196,130,830.00	100	205,104,855.00		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOAAN TAJUAN MAKAM PAHLAWAN															Dinas Sosial
Meningkatnya pengelolaan taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang terkelola dengan baik	-	-	50,359,400.00	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	20,000,000.00	100	21,218,000.00	100	21,854,540.00		
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	2,914,276,853.95	2,951,035,920.00	100	2,951,035,920.00	100	2,971,215,277.00	100	3,007,727,827.00	100	3,045,505,601.00		
Tujuan : Meningkatkan kesempatan dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	40,055,397 Rupiah / Orang	42,210,166 Rupiah/ Orang	44,037,893 Rupiah/Ora ng	45,998,573 Rupiah/O radu	46,783,333 Rupiah/O radu	48,961,111 Rupiah/O radu	50,576,823 Rupiah/O ang							
Sasaran : Meningkatkan kualitas Tenaga Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	97.57	97.43	97.63	97.81	97.98	98.21	98.33							
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA															Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Terususnya dokumen perencanaan tenaga kerja daerah	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80	80	-	-	-	-	-	-	80.8	95,000,000.00	-	-		
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya pelalihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	2.8	-	2.86	90,000,000.00	2.97	95,000,000.00	3.03	95,000,000.00	3.08	95,000,000.00	3.14	95,000,000.00		
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA															Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan di dalam Negeri	7.53	7.55	7.58	20,000,000.00	7.65	62,120,000.00	7.70	62,690,000.00	7.75	63,262,000.00	7.80	63,885,000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET (05)	PAGU (06)	TARGET (07)	PAGU (08)	TARGET (09)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	1.849 Orang	1.849 Orang	1.850 Orang	2.066.758.000.000	1.855 Orang	2.066.808.758.000	1.860 Orang	2.067.000.000.000	1.865 Orang	2.067.510.000.000	1.870 Orang	2.068.025.000.000			
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan kesetaraan Gender dalam pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94.83	94.83	94.83	94.83	94.80	95.10	95.10	95.30	95.30	95.50	95.50	95.50			
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.53	64.53	64.53	64.53	64.75	65.00	65.00	65.50	65.50	66.00	66.00	66.00			
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.392	0.385	0.380	0.380	0.375	0.370	0.365	0.365	0.365	0.360	0.360	0.360			
	Total Fertility Rate (TFR)	2.19	2.18	2.17	2.17	2.16	2.15	2.15	2.14	2.14	2.13	2.13	2.13			
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30.0	28.0	28.0	28.0	24.0	22.0	22.0	20.0	20.0	18.0	18.0	18.0			
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	63.82	64.00	64.50	64.50	65.00	66.00	66.00	66.50	66.50	67.00	67.00	67.00			
Sasaran :Meningkatnya kesetaraan dan keadilan Gender serta Pemberdayaan Perempuan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	63.31	65.5	66	66	66.5	67	67	67.5	67.5	68	68	68			
	Proporsi kursi perempuan di DPRD	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33			
	Persentase perempuan pelaku UNIKM yang mendapatkan fasilitas/pemberdayaan dari PD	-	5	10	10	15	20	20	25	25	30	30	30			
	Jumlah Kecamatan melaksanakan program pencegahan kekerasan berbasis masyarakat	-	3	6	6	9	11	11	13	13	15	15	15			
	Persentase ketersediaan data kasus kekerasan terlah by name by address	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET (05)	PAGU (06)	TARGET (07)	PAGU (08)	TARGET (09)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	TARGET (15)		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan				343.156.000,00	377.470.000		415.215.000	418.988,000		460.887,000						
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG);		14,33(2023)	16	17		18		19		20		21				
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan.		63,72	63,72	65,25		66		66,75		67,5		68				
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		100	100	100	162.385.000,00	100	178.801,000	100	196.481,000	100	198.246,000	100	218.069,000			
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif																
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak			100	100	16.984.000,00	100	18.682,000	100	20.550,000	100	20.737,000	100	22.810,000			
Persentase Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berspektrif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar																
2.08.05 - PROGRAM PENGELUARAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak				25	55.000.000,00	50	60.500.000,00	75	66.550.000,00	90	73.205.000,00	100	80.525.000,00			
Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan																
Sasaran : Meningkatkan Efektivitas Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak		82,57(2023)	93,5	94		94,5		95		95,5		96				
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak (Usia 0-17 tahun)																
Persentase Kecamatan/Desa yang terfasilitasi menuju Layak Anak (KLADLA)			20	40		53		67		73		87				
Persentase lembaga layanan anak yang memenuhi standar			20	25		30		45		50		65				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
2.06.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA).	64,45 (2022)	67,50	68	13.559.000,00	68,50	14.914.000	68,00	16.405.000	69,50	16.554.000	70,00	18.209.000			
2.06.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK															Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tidak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak					156.681.000,00		172.360.000		169.586.000		191.320.000		210.452.000			
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif.	100	100	100		100		100		100		100				
	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).	64,45	65,2	65,2		65,7		65,95		66,4		66,7				
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																
Tujuan: Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah		B	B		B		BB		BB		BB				
Sasaran: Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD		B	B		BB		BB		BB		BB				
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															Dinas Ketahanan Pangan	
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perikentoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	3.813.622.967,00	100	3.900.733.022,00	100	3.861.666.897,00	100	4.011.430.311,00	100	4.075.026.259,00			
Tujuan: Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	73,11	73,2	74,88		76,64		84,7		89,09		93				
Sasaran: Meningkatkan Ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pangan	Rasio Ketersediaan Pangan Pokok	110,40	110,40	112,81		114,8		116,18		118,71		120,3				
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT																
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	86,49	86,7	88,50	575.000.000,00	81,00	2.087.950.000,00	83,25	2.192.000.000,00	85,50	2.287.010.000,00	87,59	2.381.540.000,00		Dinas Ketahanan Pangan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Dinas Ketahanan Pangan	
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	12.82	100	150.000.000.00	100	150.000.000.00	100	150.000.000.00	100	150.000.000.00	100	150.000.000.00	100	150.000.000.00		Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	0	100	125.000.000.00	100	500.000.000.00	100	500.000.000.00	100	500.000.000.00	100	500.000.000.00	100	500.000.000.00		Dinas Ketahanan Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	0	0	3.500.000.000.00	100	3.000.000.000.00	100	3.000.000.000.00	100	3.000.000.000.00	0	0	0	0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Sakip Daerah	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Sakip OPD	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	3.840.892.765.95	100	5.076.801.238.25	100	5.801.926.197.27	100	6.090.028.764.98	100	6.158.347.924.28	100	6.158.347.924.28		Dinas Lingkungan Hidup
Tujuan : Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71.09	72.01	72.22	72.43	72.64	72.86	73.07	73.28	73.49	73.70	73.91	74.12	74.33		
Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71.09	72.01	72.22	72.43	72.64	72.86	73.07	73.28	73.49	73.70	73.91	74.12	74.33		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP																
Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk mitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Yang Dilaksanakan	N/A	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	400.000.000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Dinas Lingkungan Hidup	
Menurunnya Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan		92.76	71.25	71.55	245.616.000.00	71.85	270.616.000.00	72.15	275.616.000.00	72.45	280.616.000.00	72.75	285.616.000.00			
	Indeks Kualitas Udara		74.07	74.27		74.47		74.67		74.87		75.07				
	Indeks Kualitas Air		69.87	69.94		70.01		70.08		70.15		70.22				
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)															Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keaneekaragaman hayati	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	N/A	15.56	20	260.000.000.00	25	950.000.000.00	30	605.000.000.00	35	665.500.000.00	40	1.132.050.000.00			
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)															Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 Yang Terkelola	N/A	8	10	41.996.000.00	20	100.000.000.00	30	100.000.000.00	40	100.000.000.00	50	100.000.000.00			
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)															Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUJULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	70	100	100	60.400.000.00	100	70.000.000.00	100	75.000.000.00	100	75.000.000.00	100	80.000.000.00			
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH															Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA Yang Dilibatkan Kapasitasnya	N/A	-	100	25.000.000.00	100	60.000.000.00	100	60.000.000.00	100	60.000.000.00	100	60.000.000.00			
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															Dinas Lingkungan Hidup	
Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Lingkungan Hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup Yang Dilibatkan Kompetensinya	N/A	-	-	-	100	50.000.000.00	100	50.000.000.00	100	50.000.000.00	100	50.000.000.00			
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT															Dinas Lingkungan Hidup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kinerja Pemangku Kepentingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(01) Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	(03) N/A	(04) -	(05) 100	(06) 30,000,000.00	(07) 100	(08) 50,000,000.00	(09) 100	(10) 50,000,000.00	(11) 100	(12) 50,000,000.00	(13) 100	(14) 50,000,000.00	(15) -	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tidak Pidana	100	100	100	35,000,000.00	100	36,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	20,000,000.00	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	N/A	-	35	6,963,228,000.00	40	8,427,555,000.00	45	8,427,555,000.00	50	8,527,555,000.00	55	8,527,555,000.00	-	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	TUJUAN : Meningkatkan Akutabilitas Penyelenggara Pemerintahan	B	B	B	-	B	-	B	-	B	-	B	-	-	-
SASARAN : meningkatnya kualitas akutabilitas kinerja pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB	-	BB	-	BB	-	BB	-	A	-	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100	100	4,345,424,980.85	100	4,590,647,215.18	100	4,704,118,630.99	100	4,824,051,255.32	100	4,951,057,350	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Tujuan: Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	87	88	89	-	89	-	89	-	89	-	89	-	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sasaran: meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase cakupan persentase dokumen administrasi kependudukan	-	-	90	-	92	-	95	-	97	-	98	-	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	6.85	30	30	761,724,140.38	33	1,082,205,172	35	1,323,925,689	37	1,316,318,258	40	1,520,450,084	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	72.44	72.44	73	-	74	-	75	-	76	-	80	-	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	50,000,000.00	100	135,000,000	100	220,000,000	100	155,000,000	100	235,000,000	-	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	(03) 100	(04) 100	(05) 100	(06) 100	(07) 100	(08) 100	(09) 100	(10) 100	(11) 100	(12) 100	(13) 100	(14) 100	(15)			
	Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan yang dimanfaatkan	-	-	100	50.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	100	105.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	tersedia	tersedia	100	50.000.000,00	100	60.500.000,00	100	66.550.000,00	100	73.205.000,00	100	80.525.500,00			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	B	B	B													
	Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Perangkat daerah	B	B	B													Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	100	100	100	2.887.180.950,30	100	2.915.852.759,80	100	2.945.011.287,40	100	2.974.461.400,28	100	3.004.208.014,28				
	Tujuan : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	0.7089	0.7089	0.7089													
	Sasaran : Meningkatkan Pembangunan Desa	11.48	11.48	11.48													
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya kualitas penataan desa			18.85	-	38.52	50.000.000,00	56.01	50.500.000,00	76.5	51.005.000,00	100	51.515.050,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa			20.49	-	27.86	50.000.000,00	39.34	50.500.000,00	45.08	51.005.000,00	52.45	51.515.050,00			Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			13.55	140.000.000,00	27.1	281.400.000,00	40.65	2.294.314.000,00	54.50	301.802.140,00	67.70	309.819.661,00				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				100		100		100		100		100				
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)			20	519.910.238,00	40	875.106.340,00	80	681.660.433,00	80	693.224.036,00	100	760.156.278,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa			20		40		80		80		100				
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB				
Sasaran : Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	BB	BB		BB		BB		BB		A				
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan (BPK/inspektoret) yang ditindaklanjuti	100	100	100		100		100		100		100				
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan PD		77	78		79		81		82		83				
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada DP-3APPKB	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100%	3.837.325.076,85	100%	3.885.761.438	100%	3.975.882.042	100%	4.015.166.173	100%	4.112.306.144			
Tujuan : Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi, dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang di Kabupaten Rejang Lebong.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,83	94,83	94,83		94,90		95,10		95,30		95,50				
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,53	64,53	64,53		64,75		65,00		65,50		66,00				
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,392	0,385	0,380		0,376		0,370		0,365		0,360				
	Total Fertility Rate (TFR)	2,19	2,18	2,17		2,16		2,15		2,14		2,13				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																															
				2026		2027		2028		2029		2030																																			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU																																		
(01)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19). Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	(03)	30.0	(04)	28.0	(05)	26.0	(06)		(07)	24.0	(08)		(09)	22.0	(10)		(11)	20.0	(12)		(13)	18.0	(14)		(15)																					
		Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	63.82	64.00	64.50	65.00	65.00	66.50	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00																	
				Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	Persentase Pesisir KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18.41	18.88	20.34	20.95	20.95	24.27	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49	25.49														
						Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	Persentase PUS anggota kelompok kegiatan (KB/BKR/BKLU/PPKA)	41.98	44.98	47.98	50.98	50.98	53.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98	56.98												
								Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Berisiko Stunting yang mendapatkan pendampingan (jika relevan dengan program PD)	45.13	50.94	53.44	56.75	56.75	61.75	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56	62.56										
										Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	Persentase PIK-Remaja/Mahasiswa yang aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100								
												Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	Persentase ketersediaan data dasar keluarga by name by address	93.89	94.66	95.73	96.8	96.8	97.87	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94	98.94						
														Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	Jumlah analisis/kajian kebijakan yang memanfaatkan data sektoral	-	1	2	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5				
																Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	754,078,500.00	549,830,000	604,581,000	610,087,000	610,087,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000	671,095,000		
																		Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	Terfundasinya pertambahan jumlah penduduk	2.19	2.18	2.17	2.16	2.16	2.15	2.14	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13	2.13
Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19).																			30	28.0	26	24	24	22	20	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																	6,445,368,400.00	8,406,743,000	9,247,412,000	9,331,478,000	9,331,478,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000	10,264,619,000
				Sasaran : Meningkatnya kesiapan Keluarga Berencana	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana (KB)																																										

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	(03) 77.7	(04) 80.78	(05) 82.22	(06) 83.66	(07) 85.1	(08) 85.4	(09) 85.1	(10) 85.4	(11) 85.4	(12) 88	(13) 88	(14) 88	(15) 88		
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need).	3,8	3,70	3,27	2,84	2,41	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga.	57,1	58,6	60,1	61,8	63,1	64,6	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	3.263.595.000	
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																
Tujuan: Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
Sasaran: Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA																
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Dinas Perhubungan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat/tepat dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	3.488.801.667.14	
Tujuan: Terwujudnya layanan transportasi yang aman, nyaman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	70	75	78	80	83	85	85	85	85	85	85	85	85	90	
Sasaran: Meningkatkan layanan transportasi darat yang aman, nyaman dan terjangkau	Rasio Konektivitas	70	75	78	80	83	85	85	85	85	85	85	85	85	90	
2.15.02 - PROGRAM PENYELANGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal jalan Kabupaten/Kota	25,62	26,38	26,7	27,02	27,34	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	27,85	5.050.000.000.00	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
				2026		2027		2028			2029			
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU		
Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah (02)	B	(04) B	(05) B	(06) B	(07) B	(08) B	(09) BB	(10) BB	(11) BB	(12) BB	(13) BB	(14) BB	(15)
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akutabel dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	3.571.096.375,95	100	3.678.083.821,16	100	3.745.485.840,82	100	3.814.752.751,68	100	3.884.983.060,43	
Tujuan : Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Indeks SPBE	3.24	3.39	3.47		3.55	3.63	3.71	3.79					
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	N/A	N/A	1.5		1.5	1.8	1.9	2.0					
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASIDAN KOMUNIKASIPUBLIK														
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (survei) (%)	80.53	82.00	84.00	1.201.299.479,33	86.00	1.621.482.900,00	86.00	1.833.882.501,00	90.00	1.945.959.561,00	92.00	1.858.266.369,00	
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASIFORMATIKA														
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	3.24	3.39	3.47	450.000.000,00	3.55	665.000.000,00	3.63	730.000.000,00	3.71	795.000.000,00	3.79	860.000.000,00	
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH														
Tujuan : Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	7.15	7.15	7.17		7.18	7.18	7.19	7.2					
Sasaran 2 : Meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian	Persentase data UMKM yang digitalisasi	100	50	60		65	70	75	80					
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI														
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase koperasi aktif	33.64	34.27	34.57	6.000.000,00	34.88	80.000.000,00	35.1	90.000.000,00	35.48	95.000.000,00	35.77	100.000.000,00	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI																
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	39.44	38.4	40	30.000.000.00	40	35.000.000	45	40.000.000	50	45.000.000	60	50.000.000		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)																
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	7.15	7.15	7.17	45.000.000.00	7.18	100.000.000	7.19	110.000.000	7.2	120.000.000	7.21	150.000.000		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM																
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM menjajah Kemitraan Ekspor	1.04	1.2	1.3	7.000.000.00	1.4	75.000.000	1.5	90.000.000	1.6	105.000.000	1.7	120.000.000		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B									BB	
Sasaran: Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		B									B	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA																
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akumulabel dan tepat Waktu	100	100	100	3.801.041.927.75	100	3.931.473.520.03	100	3.997.879.178.23	100	4.019.875.343.01	100	4.072.605.589.44		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
TUJUAN : Terwujudnya Idm Investasi yang kompetitif	Nilai Investasi Daerah (PMA/PMDN)	92.884 Miliar	97.807 Miliar	102.991 Miliar	108.450 Miliar	114.188 Miliar	120.25 Miliar	126.623 Miliar								
SASARAN : Meningkatkan Investasi Bidang Penanaman Modal	Persentase peningkatan Investasi (%)	1.2	4.9	5.2	5.4	5.7	6	6.4								
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKUM PENANAMAN MODAL																
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total Investasi Terhadap Target Investasi	7.14	18.6	19.53	181.000.000.00	20.05	480.000.000.00	21.52	120.000.000.00	22.78	120.000.000.00	23.92	120.000.000.00		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Sasaran : Meningkatkan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet Berprestasi	66	66,8	71,8	74,4	74,4	2.238.431,091.00	77,2	2.238.431,091.00	80	2.238.431,091.00	80	2.238.431,091.00		
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan															
Meningkatnya kebudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet Yang Masuk Pelatda Provinsi	12	14,80	17,20	19,80	19,80	2.238.431,091.00	22,40	2.238.431,091.00	25,00	2.238.431,091.00	25,00	2.238.431,091.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan														
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan															
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase penyelenggaraan pengembangan kapasitas kepramukaan	100	100	100	100	100	200.000.000.00	100	200.000.000.00	100	200.000.000.00	100	200.000.000.00		Dinas Pemuda dan Olahraga
<b>2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>															
Tujuan: Terwujudnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,81	2,82	2,82	2,85	2,85		2,88		2,7		2,72			
Sasaran 3: Meningkatnya Ketersediaan Data Perencanaan sesuai kebutuhan Layanan Data	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	1,81	2,82	2,82	2,85	2,85		2,88		2,7		2,72			
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL															
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi dan Standarisasi dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,82	2,82	2,82	2,85	2,85	80.000.000.00	2,86	133.000.000.00	2,7	134.000.000.00	2,72	135.000.000.00		Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>															
Tujuan : Meningkatkan keamanan informasi	Indeks SPBE (Terkait Keamanan)	2	2	3	4	4		4		4		4			
Sasaran 4 : Meningkatnya sata kelola dan kerangka penyelenggaraan persandian	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	24,86	N/A	27,02	32,68	32,68		38,13		43,57		48,37			
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI															
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI (Keamanan Informasi)	161 (Hasil Penilaian Tahun 2024)	N/A	248	300	300	310.000.000.00	350	432.000.000.00	400	458.000.000.00	444	485.000.000.00		Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
<b>2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>																
Tujuan : Terwujudnya kebudayaan maju (IPK)	Indeks Pengembangan Kebudayaan (IPK)															
Sasaran : Meningkatkan Peranan BMA dan meningkatkannya keikutsertaan seni etnis nusantara yang ditampilkan	Persentase BMA Aktif	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Keikutsertaan seni Etnis Nusantara yang ditampilkan	70	50	70		75		80		85		90				
<b>2.22.02- PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>																
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat partisipasi Masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	123,363	123,372	125,000	1,040,000,000.00	125,000	6,100,000,000	127,000	6,160,000,000	128,000	6,210,000,000	128,000	7,000,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Sasaran : Meningkatkan karya budaya yang dinvitalisasi dan diinventarisasi	Persentase Karya Budaya yang Dinvitalisasi dan Diinventarisasi	-	45	54		68		82		96		100				
<b>2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>																
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tujuan Sejarah Lokal	123,363	123,372	125,000	141,683,000.00	126,000	200,000,000	127,000	250,000,000	128,000	300,000,000	129,000	350,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Sasaran : Meningkatkan benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan																
<b>2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>																
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya Yang Dilestarikan	35	50	50	288,745,200.00	50	200,000,000	50	250,000,000	60	260,000,000	80	200,000,000		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
<b>2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>																
TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB				
SASARAN : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	BB	BB		BB		BB		A		A				
<b>1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Atsip Daerah	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuratbel dan tepat waktu	100	100	100	2,753,810,023.20	100	2,754,066,713	100	2,822,021,393	100	2,893,697,121	100	3,030,435,137		Dinas Perustakaan dan Atsip Daerah	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEWANGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
TUJUAN : Meningkatkan Literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	82.15	82.15	82.16	82.17	82.18	82.19	82.20	82.21	82.22	82.23	82.24	82.25	82.26	Dinas Perpustakaan dan Ansp Daerah	
SASARAN : Meningkatkan Minat Baca Masyarakat	Persentase Kunjungan Perpustakaan	1.58	1.58	1.61	1.63	1.66	1.68	1.70	1.72	1.74	1.76	1.78	1.80	1.82	Dinas Perpustakaan dan Ansp Daerah	
Program Pembinaan Perpustakaan																
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Masyarakat	65.73	67.23	68.72	69.22	70.22	71.22	72.22	73.22	74.22	75.22	76.22	77.22	78.22	Dinas Perpustakaan dan Ansp Daerah	
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																
TUJUAN : Meningkatkan tata kelola arsip	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan daerah	78.36	78.36	77.36	76.36	75.36	74.36	73.36	72.36	71.36	70.36	69.36	68.36	67.36		
SASARAN : Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	Persentase Tingkat Keberadaan dan Keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	75	75	75.1	75.3	75.4	75.5	75.6	75.7	75.8	75.9	76.0	76.1	76.2		
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP																
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan stabil	Tingkat Ketersediaan Arsip	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	Dinas Perpustakaan dan Ansp Daerah	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP																
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	49.80	Dinas Perpustakaan dan Ansp Daerah	
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan nelayan dan Pembudidaya Perikanan	Kontribusi PDRB Sektor Perikanan dan Perikanan	32.48	32.89	33.28	33.63	34	34.37	34.74	35.11	35.48	35.85	36.22	36.59	36.96		
Sasaran : Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	Produktivitas Perikanan	77.45	78.92	80.81	83.16	85.99	89.34	93.27	97.19	101.11	105.03	108.95	112.87	116.79	Dinas Perikanan dan Perikanan	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA																
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5	2	2.4	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4		
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN																
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (menunjukkan konsumsi ikan RT, di luar RT, dan konsumsi ikan yang tidak tercatat)	20.39	20.77	21.27	21.89	22.63	23.52	24.55	25.68	26.97	28.41	29.99	31.71	33.57	Dinas Perikanan dan Perikanan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
<b>3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>															
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP daerah	B	B	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	Dinas Pariwisata
Sasaran : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah pada Dinas Pariwisata	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
<b>3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENIKOTA</b>															
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Pariwisata	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akumulabel dan tepat Waktu	100	100	100	3.909.981.419.40	100	4.036.414.719.00	100	4.434.255.605.00	100	4.819.746.241.00	100	5.234.654.087.00		
Tujuan : Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi PAD Sektor pariwisata	0.35	0.4	0.45		0.5		0.55		0.6		0.65			
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	2.11	2.16	2.19		2.21		2.24		2.26		2.29			
	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel)	6.25	8.8	10.8		12.2		13.0		13.5		13.8			
Sasaran : Meningkatkan Sektor Kepariwisata Daerah	Rata-rata Lama Tinggal (Hari)	2.5	2.5	2.6		2.6		2.6		2.6		2.6			
	Tingkat Hunian Hotel	12.8	12.8	13		13		13		14		15			
	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	33	33	17.65		17.65		17.65		17.65		18.0			
<b>3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>															
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase peningkatan Wisatawan Nusanara	5.82	10	12	4.496.070.000.00	15	4.446.000.000.00	17	4.503.000.000.00	20	5.830.000.000.00	23	10.800.000.000.00		
<b>3.26.03 - PROGRAM PEMAGARAN PARIWISATA</b>															
Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	57.14	57.14	57.14	566.390.861.00	57.14	786.000.000.00	57.14	803.000.000.00	57.14	832.000.000.00	57.14	850.000.000.00		
<b>3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>															
Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	-	-	25	280.000.000.00	35	865.000.000.00	50	637.000.000.00	75	690.000.000.00	100	895.000.000.00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
				17,65	313.039.800,00	17,65	316.500.000,00	17,65	322.000.000,00	17,65	325.000.000,00	18	342.000.000,00		Dinas Pariwisata	
Meningkatnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif tervalidasi		-														
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Nilai Sakip Daerah	B	B	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Pertanian dan Perikanan	Nilai Sakip OPD	B (67,87)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkat tata kelola pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan	Persentase Pelayanan Administrasi Perencanaan Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	12.799.770,473,00	100	12.573.262.528,00	100	12.732.276.618,00	100	12.896.448.776,00	100	13.066.203.374,00	100	Dinas Pertanian dan Perikanan	
Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Pembudidaya Perikanan	Kontribusi PDR Sektor Pertanian dan Perikanan	32,48	32,89	32,26		33,63		34		34,37			34,74			
Sasaran 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Produktivitas tanaman Pangan (padi)	5	6,87	7,01		7,16		7,32		7,49			7,67			
	Produktivitas tanaman Hortikultura (cabe)	5,76	5,81	5,86		5,96		6,05		6,16			6,29			
	Produktivitas tanaman Perkebunan															
	Kopi Robusta	0,76	0,72	0,721		0,722		0,724		0,724			0,729			
	Kopi Arabika	0,81	0,72	0,721		0,722		0,724		0,726			0,729			
	Aren	3,14	2,91	2,912		2,915		2,919		2,925			2,933			
	Karet	0,77	0,76	0,764		0,772		0,783		0,799			0,819			
	Sawit	16,1	12	12,193		12,396		12,608		12,829			13,062			
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi tanaman Pangan (padi)	-11,38	3	5	800.000.000,00	5	860.000.000,00	5	966.000.000,00	5	1.064.800.000,00	5	1.171.280.000,00	5	Dinas Pertanian dan Perikanan	
	Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabe)	2	1,5	2		2		2		2			2			
	Peningkatan Produksi Perkebunan (kopi, aren, karet, sawit)															
	Kopi Robusta	5	-3,77	0,09		0,16		0,25		0,32			0,41			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02) Kopi Arabika	(03) 3.54	(04) 16.99	(05) 0.09	(06) 0.09	(07) 0.16	(08) 0.16	(09) 0.25	(10) 0.25	(11) 0.32	(12) 0.32	(13) 0.41	(14) 0.41	(15) 0.41	
	Aren	0.83	-7.26	0.06	0.06	0.11	0.11	0.15	0.15	0.21	0.21	0.25	0.25		
	Karet	1.88	-14.8	0.51	0.51	1	1	1.5	1.5	2.01	2.01	2.51	2.51		
	Sawit	1.56	-7.34	1.61	1.61	1.66	1.66	1.71	1.71	1.76	1.76	1.81	1.81		Dinas Pertanian dan Perikanan
<b>3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>															
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		83.73	83.73	83.73	2.150.000.000.00	83.73	2.171.500.000.00	83.73	2.183.215.000.00	83.73	2.215.147.150.00	83.73	2.237.298.821.50		
<b>3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>															
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		57.2	82.5	85	575.000.000.00	87.5	652.500.000.00	90	685.750.000.00	92.5	765.325.000.00	95	841.857.500.00		Dinas Pertanian dan Perikanan
	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)														
	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pri NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)		4.55	18.18		32		50.00		72.73		100.00			
	Peningkatan Produksi Peternakan		3	3.1		3.20		3.30		3.40		3.50			
<b>3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>															
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian				20	450.000.000.00	20	485.000.000.00	20	544.500.000.00	20	598.950.000.00	20	653.845.000.00		
	Persentase SDM Penyuluh yang dilibatkan			20		20		20		20		20			
	Persentase Kelembagaan Koperasi Lani yang dibentuk yang beroperasi			20		20		20		20		20			
<b>3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>															
<b>3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>															
<b>3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>															
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan nilai tambah perdagangan, Meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian, Meningkatkan daya saing industri	Nilai Sakip Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB		BB	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian	Nilai Salkip OPD	B	B	B												
1.01.01 - PROGRAM/PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TENKOTA																
Meningkatkan tata kelola pemerintah pada Dinas Perdagangan, koperasi UKM dan Perindustrian	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akutabel dan tepat Waktu	100	100	100	4.407.314,361.00	100	4.894.933.477.05	100	4.867.172.438.30	100	5.049.417.770.49	100	5.140.280.281.39		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
Tujuan : Meningkatkan Akutabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	16.27	17.17	17.25		17.35		17.44		17.54		17.63				
Sasaran 2 : Meningkatkan nilai tambah perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP/Pusat perbelanjaan dan IUTN/UTS/SIUP Toko swelayan)	100	100	100		100		100		100		100				
3.30.02.PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN																
Meningkatnya Kemudahan Proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase izin usaha perdagangan yang difasilitasi	100	100	98	13.000.000.00	98	25.000.000.00	98	30.000.000.00	98	35.000.000.00	98	40.000.000.00		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
3.30.03. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																
Meningkatnya kualitas sarana Perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100	100	21	335.000.000.00	21	500.000.000.00	21	510.000.000.00	21	520.000.000.00	21	550.000.000.00		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING																
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	117	40	100	50.000.000.00	100	80.000.000.00	100	85.000.000.00	100	90.000.000.00	100	95.000.000.00		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR																
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai/Ekspor Dagang	-	-	12	45.000.000.00	12	150.000.000.00	12	160.000.000.00	15	170.000.000.00	22	180.000.000.00		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
3.30.06 STANDARISASI DAN PERLUNDUNGAN KONSUMEN																
Meningkatnya terbit niaga mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan konsumen	100	100	80	35.000.000.00	80	40.000.000.00	80	42.000.000.00	80	45.000.000.00	80	50.000.000.00		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
PROGRAM PENGUNJAMAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																
Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi / dilaksanakan	0	0	3	-	3	50.000.000,00	5	55.000.000,00	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
<b>3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>																
Tujuan : Meningkatkan Daya Saing Industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	3,84	4,41	4,91	5,41	5,91		5,91		6,41		6,91				
Sasaran 2 : Meningkatkan daya saing Industri	Peningkatan kualitas produk IKM	50	50	55	60	60		60		65		70			Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	0	1	1	2	2	400.000.000,00	2	420.000.000,00	2	420.000.000,00	2,5	430.000.000,00			
3.31.04. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL																
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	0	0	2	2	3	75.000.000,00	3	250.000.000,00	3	250.000.000,00	5	250.000.000,00		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	
<b>3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>																
Tujuan : Terwujudnya pengembangan wilayah baru	Persentase kawasan transmigrasi yang dikembangkan	100	100	100	100	100		100		100		100				
Sasaran : Terwujudnya pemukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan berusaha yang layak	Jumlah kawasan transmigrasi yang dikembangkan	1	1	1	1	1		1		1		1				
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI																
Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-	-	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI																
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	100	100	100	100	100	15.150.000,00	100	15.300.000,00	100	15.450.000,00	100	15.600.000,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI																
Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan	100	100	100	100	100	20.000.000,00	100	20.400.000,00	100	20.600.000,00	100	20.800.000,00		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN						PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB					
				2026		2027		2028			2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH															
TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Bagian Perencanaan dan Keuangan
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	17.523.928.034.40	100	18.215.802.217.00	100	20.006.348.272.00	100	22.006.983.088.00	100	24.207.445.684.60		
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	10.45	10.95	11.45		11.95		12.45		12.95		13.45			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	148.028.900.00	100	155.430.345.00	100	163.201.862.00	100	171.361.955.00	100	179.930.053.00		
Meningkatnya tata kelola organisasi	Indeks Kematangan Organisasi	B	B	B		B		B		B		B			Bagian Organisasi
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	93.07	94	94.25		94.5		95		95.5		96			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Akuntabel dan Tepat Waktu	100	100	100	7.425.894.692.00	100	7.758.189.426.80	100	8.108.766.897.83	100	8.475.443.542.83	100	8.860.064.281.87		Bagian Umum
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	286.212.300.00	100	329.144.145.00	100	378.515.766.75	100	435.293.131.78	100	500.587.101.53		Bagian Pradikal dan Komunikasi Pimpinan
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Belum Ada	3.0000	3.0000		3.0000		3.0000		3.0000		3.0000			
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN BAKYAT															
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	227.169.790.00	100	275.000.000.00	100	345.000.000.00	100	395.000.000.00	100	445.000.000.00		Bagian Pemerintahan
	Efektifitas Kerjasama Daerah	100	100	100		100		100		100		100			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya Koordinasi, Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kesagamaan	Persentase Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kesagamaan	100	100	100		100		100		100		100				
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Zakat Nasional	-	0.20	0.23		0.26		0.29		0.32		0.35			Bagian Kesejahteraan Rakyat	
Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100	100	100	3.829.442.515,00	100	11.251.830.098	100	12.273.470.807	100	13.376.831.123	100	14.565.730.118			
	Persentase Perangkat Agama Yang Dibina	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Tempat Ibadah aktif	57,5	80,75	87,5		87,5		87,5		87,5		87,5				
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	76,74	77,24	77,49		77,74		77,99		78,24		78,49				
PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM															Bagian Hukum	
Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	443.360.600,00	100	594.000.000,00	100	605.960.000	100	617.997.600	100	630.357.000			
Sasaran : Meningkatkan Efektivitas Koordinasi, Sinkronisasi dan Perumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Daerah	Tingkat Capaian Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	N/A	85 - 90	88		89		90		91,5		93,5				
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Akses Keuangan Daerah	3,3	3,4	3,44		3,47		3,51		3,54		3,56				
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektifitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan			88	283.628.000,00	89	350.000.000,00	90	350.000.000,00	91,5	350.000.000,00	93,5	350.000.000,00		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
Sasaran : Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PD)	Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	15,56	16,06	16,46		16,86		17,26		17,66		18,06				
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektifitas pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100	100	100	143.253.270	100	150.415.934	100	157.936.732	100	165.933.588	100	174.125.246		Bagian Administrasi Pembangunan	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERINGKAT DAERAH PEWANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Sasaran: Meningkatkan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	(01) (02) Persentase bnyan pengadaan Barang/Jasa yang kredibel dan transparan	85	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
			86	87	88	89	90	91							
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN															
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5	Level 5	Level 5	342,431,271.24	
4.02 - SEKRETARIAT DPRD															
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Nilai Saktip Daerah	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Saktip OPD	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Sekretariat Dewan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	41,812,679,000.00	
Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Sasaran 2 : Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase keterpenuhan atas layanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
1.01.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD															
Meningkatnya kualitas pendanaan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20,700,332,000.00	
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
5.01 - PERENCANAAN	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	-	-	70.00	70.05	70.10	70.15	70.20	70.25	70.30	70.35	70.40	70.45	70.50	
Sasaran : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada BAPPEDA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akutabel dan tepat Waktu	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	22.10	22.18	22.25	22.32	22.39	22.46	22.53	22.60	22.67	22.74	22.81	22.88	22.95	
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH															
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung program daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH															
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada Bidang Perekonomian dan SDA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
<b>5.02 - KEUANGAN</b>															
TUJUAN : Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B											
SASARAN : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB											
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatnya tata kelola pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkenbren Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	37.419.876.930.00	100	38.108.339.683.90	100	38.566.498.413.24	100	39.074.345.705.02	100	39.525.818.804.22		
TUJUAN : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK Terhadap Pelaporan Keuangan	WTP	WTP	WTP											
SASARAN : Meningkatkan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	100	100											
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH															
Meningkatnya tata kelola anggaran	1. Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TRD	73.83	61.25	65	171.711.164.445.00	70	181.221.487.060.76	75	186.868.845.531.30	80	192.765.922.806.02	85	198.987.086.603.79		
	2. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	65.71	76.92	70											
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	3. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	66.01	68.00	66.02											
	4. Persentase Penurunan SILPA	32.39	31.50	30.50											
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	5. Persentase ketepatan Pelaporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	100											
SASARAN : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang diamankan, diterbitkan, dan dimanfaatkan	100	100	100											
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH															
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3.72	4.85	3.8	899.860.618.00	3.72	979.969.321.00	4.5	1.029.967.765.00	4.8	1.128.832.671.00	4.9	1.188.457.791.00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
<b>5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>															
Tujuan : Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah	Persentase kebijakan berbasis bukti	100	100	100		100		100		100		100			
	Indeks Inovasi Daerah	47.67	48.17	48.67		48.17		48.67		50.17		50.67			
Sasaran : Meningkatkan penerapan riset dan inovasi daerah dalam pembangunan daerah	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100	100	100		100		100		100		100			
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					178.000.000,00		235.000.000,00		250.000.000,00		270.000.000,00		290.000.000,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	-	100	100		100		100		100		100			
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH															
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	N/A	18.52	22.22	120.000.000,00	25.93	160.000.000,00	28.63	175.000.000,00	33.33	180.000.000,00	37.04	185.000.000,00		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
<b>6.01 - INSPEKTORAT DAERAH</b>															
Tujuan : Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB			
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB		BB		BB		A		A			
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkat tata kelola pemerintah pada Inspektorat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	5769.146.945,75	100	6.151.760.780,96	100	7.437.217.944,10	100	6.324.227.059,53	100	6.412.845.374,20		Inspektorat
TUJUAN : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.003 Level 3	3.003 Level 3	3.05 Level 3		3.10 Level 3		3.15 Level 3		3.20 Level 3		3.25 Level 3			
SASARAN 1 : Terselenggaranya Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Yang Berkualitas	Persentase Laporan Hasil Pengawasan Yang Terlaksana	N/A	N/A	84.58		85.33		86.08		86.83		87.58			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
6.01.02 - PROGRAM PENGELOMPOKAN PENGAWASAN	(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Inspektorat	
Menurutnya terjadinya penyelesaian atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran maupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	86.17	86.17	86.75	864,125,300.00	87	1,800,070,951.00	87.25	1,854,073,078.53	87.5	1,909,695,271.92	88	1,966,986,130.07			
	Tindaklanjut Rekomendasi APJP Tahun Anggaran N-1	75	76	77		79		81		83		85				
	Persentase Pelaksanaan Pengawasan	90	90	90		90		90		90		90				
Sasaran 2 : Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi yang Berkualitas	Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3				
	Level Manajemen Risiko Indeks (MRI)	Level 2 (2.85)	Level 3	Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3			Inspektorat	
PROGRAM PERUMUSAN KEBLAKAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Seluruh OPD	100	100	100	200,546,000.00	100	258,062,380.00	100	285,804,251.40	100	273,776,378.94	100	281,981,730.31			
	Persentase Pemenuhan Dokumen KAPIP Yang Berkualitas	100	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Pelaksanaan Pendampingan dan Asistensi Manajemen Risiko Indeks (MRI) Seluruh OPD	100	100	100		100		100		100		100				
7.01 - KECAMATAN																
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB				
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		BB		A				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	7,618,338,075.10	100	7,700,110,755	100	7,764,520,151	100	7,828,573,641	100	7,895,277,866		Kecamatan Curup	
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	86.13	89	90		90.5		91		91.5		92				
7.01.02 - PROGRAM PENGELOMPOKAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	(01) Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	(03) 100	(04) 100	(05) 100	(06) 50.000.000,00	(07) 100	(08) 35.150.000,00	(09) 100	(10) 35.501.500,00	(11) 100	(12) 35.856.515,00	(13) 100	(14) 36.215.000,00	(15) Kecamatan Curup	
Sasaran : Meningkatkan Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.400.000,00	100	250.400.000,00	100	250.400.000,00	100	250.400.000,00	100	250.400.000,00	Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.400.000,00	100	250.400.000,00	100	250.400.000,00	100	250.400.000,00	100	250.400.000,00	Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	Kelurahan Adi Rajo Kecamatan Curup	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100	100	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	Kelurahan Timbul Rejo Kecamatan Curup
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100	100	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	239.600.000,00	100	Kelurahan Air Putih Lama Kecamatan Curup
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan															
<b>TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik</b>		B	B	B											
<b>SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah</b>		B	B	B											
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkat teta kabola pemerintah pada Kecamatan		100	100	100	6.843.606.450,34	100	6.913.141.102	100	6.874.837.100	100	7.032.100.058	100	7.089.935.648	100	Kecamatan Curup Tengah
<b>Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Teta Kelola Pemerintahan yang berkualitas</b>		88,83	89	90										92	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan		100	100	100	23.800.000,00	100	37.473.000	100	37.847.730	100	37.824.207	100	38.002.449	100	Kecamatan Curup Tengah
<b>Sasaran : Meningkatkan Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan</b>		100	100	100										100	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	Kelurahan Babu Galing Kecamatan Curup Tengah
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100	100	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	Kelurahan Talang Rimbo Baru Kecamatan Curup Tengah	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	Kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Curup Tengah	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	Kelurahan Banyumas Kecamatan Curup Tengah	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	250.000.000.00	100	Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Tengah	
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB				
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		BB		A				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akutabel dan tepat Waktu	100	100	100	4.334.824.853.19	100	4.341.457.733	100	4.404.276.862	100	4.442.474.182	100	4.481.053.476	100	Kecamatan Curup Timur	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGKUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	91,76	92	92		93		94		95		96				
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemertintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	41.870.200,00	100	42.288.802	100	42.711.791	100	43.138.909	100	43.570.288		Kecamatan Curup Timur	
Sasaran : Meningkatkan Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100				
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00		Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	240.050.000,00	100	240.050.000,00	100	240.050.000,00	100	240.050.000,00	100	240.050.000,00		Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00		Kelurahan Kesambe Batu Kecamatan Curup Timur	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00	100	240.000.000,00		Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur	
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B		B		BB		BB		BB				
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	B		BB		BB		BB		A				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Periktoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	2.841.053.616,32	100	2.888.861,116	100	2.913.835,951	100	2.943.840,334	100	2.989.296,762		Kecamatan Curup Selatan	
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	81	82	83		84		85		86		87				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEWANGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
7.01.02 - PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	85	100	100	38.500.000.00	100	35.501.500	100	35.856.515	100	36.215.080	100	36.215.080	Kecamatan Curup Selatan		
Sasaran : Meningkatkan Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100				
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	260.000.000.00	100	260.000.000.00	100	260.000.000.00	100	260.000.000.00	100	260.000.000.00	Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	260.000.000.00	100	260.000.000.00	100	260.000.000.00	100	260.000.000.00	100	260.000.000.00	Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan		
<b>TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik</b>	<b>Nilai SAKIP Daerah</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>B</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>				
<b>SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>A</b>				
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	2.409.589.230.73	100	2.459.551.760	100	2.481.181.694	100	2.503.048.108	100	2.525.133.186	Kecamatan Curup Utara		
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	84	85	86		87		88		89		90				
7.01.02 - PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	38.000.000.00	100	38.360.000	100	38.763.800	100	39.151.438	100	39.542.852	Kecamatan Curup Utara		
Sasaran : Meningkatkan Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEWANGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	(01)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239.277.356,00	100	239.277.356,00	100	239.277.356,00	100	239.277.356,00	100	239.277.356,00	100	Kelurahan Dusun Curup Kecamatan Curup Utara	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	239.041.934,00	100	239.041.934,00	100	239.041.934,00	100	239.041.934,00	100	239.041.934,00	100	Kelurahan Tunas Harapan Kecamatan Curup Utara	
<b>TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik</b>	<b>Nilai SAKIP Daerah</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>B</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		
<b>SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>A</b>		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat dan tepat waktu	100	100	100	2.833.726.107,00	100	2.861.817.675	100	2.886.003.455	100	2.910.431.063	100	2.935.103.007	100	Kecamatan Selupu Rejang	
<b>Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)</b>	<b>88.23</b>	<b>89</b>	<b>89</b>		<b>90</b>		<b>91</b>		<b>92</b>		<b>93</b>				
7.01.02 - PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	95%	100	100	30.000.000,00	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	Kecamatan Selupu Rejang	
<b>Sasaran : Meningkatkan Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan</b>	<b>Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>				
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	Kelurahan Air Duku Kecamatan Selupu Rejang	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	Kelurahan Cawang Baru Kecamatan Selupu Rejang	

SIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	(01)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	(02)	100	100	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	251.600.000,00	100	Kelurahan Simpang Nangka Kecamatan Selupu Rejang
<b>TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik</b>		B	B	B											
<b>SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah</b>		B	B	BB											
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan		100	100	100	2.378.373.989,48	100	2.393.368.212	100	2.415.723.094	100	2.438.301.525	100	2.461.105.740	100	Kecamatan Sindang Kelingi
<b>Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas</b>		88,48	89	89										93	
7.01.02 - PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan		100	100	100	37.644.000,00	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	Kecamatan Sindang Kelingi
<b>Sasaran : Meningkatkan Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan</b>		100	100	100										100	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN															
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		100	100	100	254.733.000,00	100	254.733.000	100	254.733.000	100	254.733.000	100	254.733.000	100	Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi
<b>TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik</b>		B	B	B											
<b>SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah</b>		B	B	BB											
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan		100	100	100	2.390.785.401,00	100	2.430.756.766	100	2.452.888.834	100	2.475.284.532	100	2.497.852.775	100	Kecamatan Padang Ujak Tandung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	(01) (02) Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	81,13 (03)	88,49 (04)	88,65 (05)	88,87 (06)	88,87 (07)	89 (08)	89,45 (09)	89,45 (10)	89,45 (11)	90 (12)	90 (13)	90 (14)	(15)		
7.01.02 - PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	67.378.000,00	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.804.000	100	41.212.040	Kecamatan Padang Ujak Tanding		
Sasaran : Meningkatkan Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100		100		100		100						
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	259.889.988,00	100	259.889.988	100	259.889.988	100	259.889.988	100	259.889.988	Kelurahan Pasar PUT Kecamatan Padang Ujak Tanding		
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B												
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB												
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akumulabel dan tepat Waktu	100	100	100	2.528.005.319,00	100	2.572.872.848	100	2.595.402.850	100	2.618.156.355	100	2.641.141.414	Kecamatan Kota Padang		
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	86,28	86,28	87		88		89		90		91				
7.01.02 - PROGRAM PENYELANGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	40.880.000,00	100	41.086.000	100	41.487.668	100	41.912.645	100	42.331.771	Kecamatan Kota Padang		
Sasaran : Meningkatkan Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	Persentase Masyarakat Usia Produktif yang diberdayakan	100	100	100												
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.736.000,00	100	250.736.000	100	250.736.000	100	250.736.000	100	250.736.000	Kelurahan Bedeng SS Kecamatan Kota Padang		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.736.000,00	100	250.736.000,00	100	250.736.000,00	100	250.736.000,00	100	250.736.000,00	100	Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dijalankan	100	100	100	250.736.000,00	100	250.736.000,00	100	250.736.000,00	100	250.736.000,00	100	250.736.000,00	100	Kelurahan Dusun Batu Kecamatan Kota Padang	
<b>TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik</b>	<b>Nilai SAKIP Daerah</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>B</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		
<b>SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Periktoran Yang Akumulabel dan tepat Waktu	100	100	100	1.367.815.945,39	100	1.417.608.105	100	1.436.697.196	100	1.450.667.838	100	1.464.809.516	100	Kecamatan Bermani Ulu	
<b>Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)</b>	<b>85,57</b>	<b>86,67</b>	<b>86</b>		<b>87</b>		<b>88</b>		<b>88</b>		<b>89</b>		<b>90</b>		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	53.274.000,00	100	40.000,000	100	40.200,000	100	40.400,000	100	40.600,020	100	Kecamatan Bermani Ulu	
<b>TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik</b>	<b>Nilai SAKIP Daerah</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>		<b>B</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		
<b>SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP OPD</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>		<b>A</b>		<b>A</b>		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Periktoran Yang Akumulabel dan tepat Waktu	100	100	100	1.531.026.075,58	100	1.548.763.920	100	1.559.021.766	100	1.579.411.963	100	1.594.956.103	100	Kecamatan Bermani Ulu Raya	
<b>Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)</b>	<b>97,68</b>	<b>98</b>	<b>98</b>		<b>98</b>		<b>98</b>		<b>98</b>		<b>98</b>		<b>98</b>		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	(01)	100	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Kecamatan Bermani Ulu Raya	
			100	40.529.000,00	100	40.000,000	100	40.200,000	100	40.402,000	100	40.606,020	100		40.810,040
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan BerKualitas	(02)	100	(04)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	Kecamatan Bermani Ulu Raya	
			100	40.529.000,00	100	40.000,000	100	40.200,000	100	40.402,000	100	40.606,020	100		40.810,040
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik		B													
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah		CC	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan		100	100	1.388.492,212,75	100	1.432.858,835	100	1.446.448,721	100	1.460.174,708	100	1.474.037,856	100	Kecamatan Sindang Belit Ulu	
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		83,58	84	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
7.01.02 - PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan		100	100	46.825,188,00	100	30.000,000	100	30.100,000	100	30.201,000	100	30.303,010	100	Kecamatan Sindang Belit Ulu	
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		83,58	84	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93		
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
SASARAN : Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah		CC	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan		100	100	1.288.811,951,84	100	1.163.382,707	100	1.194.487,674	100	1.210.703,690	100	1.197.037,867	100	Kecamatan Sindang Belit Ilir	
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		84,92	85	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94		
7.01.02 - PROGRAM PENYELenggaraAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan		100	100	19.995.000,00	100	40.000,000	100	40.000,000	100	40.000,000	100	40.000,000	100	Kecamatan Sindang Belit Ilir	
Sasaran: Meningkatkan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		84,92	85	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
TUJUAN : Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah (02)	B (03)	B (04)	B (05)	B (06)	B (07)	B (08)	BB (09)	BB (10)	BB (11)	BB (12)	BB (13)	BB (14)	BB (15)	
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	1.220.192.487,25	100	1.241.334.816	100	1.252.860.162	100	1.284.500.964	100	1.278.254.173		Kecamatan Sindang Dataran
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	80	81	82	84	86	88	90							
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	42.994.000,00	100	40.000,000	100	40.000,000	100	40.000,000	100	40.000,000		Kecamatan Sindang Dataran
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
SASARAN : Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkat tata kelola pemerintah pada Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan tepat Waktu	100	100	100	1.333.627.858,87	100	1.357.360.037	100	1.375.115.938	100	1.397.999.367	100	1.401.017.691		Kecamatan Binduring
Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (Kecamatan)	88,09	85	89	90	91	92	93							
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK															
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat tingkat Kecamatan terhadap kinerja Kecamatan	Persentase Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Berkualitas	100	100	100	39.521.000,00	100	40.000,000	100	40.200,000	100	40.402,000	100	40.606,020		Kecamatan Binduring
8.01 - REBATUAN BANGSA DAN POLITIK															
TUJUAN : Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik	Nilai SAKIP Daerah	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030				
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01) : Meningkatkan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan	(02) Nilai SAKIP OPD	BB	BB	(05) BB	(06) BB	(07) BB	(08) BB	(09) BB	(10) BB	(11) BB	(12) BB	(13) A	(14) (15)			
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Meningkat tata kelola pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu (%)	100	100	100	2.677.537,614.00	100	2.757.157.780	100	2.763.236.168	100	2.759.575.330	100	2.836.177.883	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
TUJUAN : Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi, dan HAM	Angka kriminalitas	12.74	10	10		10		10		10		9				
SASARAN : Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	20	20	20		20		20		20		20				
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN																
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan di Kabupaten Rejang Lebong (%)	100	100	100	984.282.150,00	100	987.218.895	100	996.181.084	100	1.005.252.995	100	1.015.305.525	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
SASARAN : Meningkatkan Etika dan Budaya Politik	Persentase Peningkatan Etika dan Budaya Politik (%)	20	20	20		20		20		20		20				
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik yang dilakukan (%)	100	100	100	1.946.102.700,00	100	1.946.867.819	100	15.186.590.800	100	32.839.590.800	100	1.946.867.819	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
SASARAN : Meningkatkan Keterlibatan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar dan terregistrasi di Kabupaten Rejang Lebong (%)	-	-	25		50		76		100		100				
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN																
Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	100	100	100	61.793.800,00	100	62.411.738	100	63.035.855	100	63.666.214	100	64.302.676	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
SASARAN : Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat (%)	20	20	20		20		20		20		20				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
				2026		2027		2028		2029		2030						
				TARGET (05)	PAGU (06)	TARGET (07)	PAGU (08)	TARGET (09)	PAGU (10)	TARGET (11)	PAGU (12)	TARGET (13)	PAGU (14)	(15)				
B.01.05 - PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	(02) Persentase Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencapaian Penyelenggaraan Nirkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan (%)	(03)	100	100	1.080.302.500,00	100	581.105.525	100	581.916.560	100	581.916.560	100	581.916.560	100	581.916.560	100	552.735.748	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SASARAN : Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan	Persentase penurunan Konflik Sosial di Kabupaten Rejang Lebong (%)	-	-	20		20		20		20		20		20				
B.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik Sosial yang diselesaikan (%)	100	100	100	402.083.550,00	100	406.104.368	100	410.165.429	100	414.287.084	100	418.468.754	100	418.468.754	100	418.468.754	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

## 4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 4.2.1 Target Pencapaian Tujuan dan Sasaran Melalui IKU

Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun sebagai alat bantu penting dalam merumuskan, memantau, dan mengevaluasi capaian pembangunan daerah secara terukur. Komponen-komponen dalam tabel, seperti nama indikator, formulasi perhitungan, satuan, dan target tahunan dari tahun 2024 hingga 2030, disajikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur mengenai arah kinerja yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Penyusunan komponen ini tidak hanya untuk kepentingan administratif, tetapi juga bertujuan agar seluruh pihak—baik internal pemerintah maupun masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya—dapat memahami dan menilai proses serta hasil pembangunan dengan cara yang objektif dan transparan.

Dalam konteks pencapaian kinerja pembangunan, kejelasan dan keterpaduan antar komponen tabel menjadi kunci. Indikator yang dirumuskan secara tepat akan mencerminkan tujuan pembangunan yang relevan dan realistis. Target yang disusun secara bertahap dan konsisten mencerminkan proses perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) serta kesiapan daerah dalam menjawab tantangan-tantangan strategis. Dengan menyajikan komponen-komponen ini secara lengkap dan terukur, maka pembangunan daerah dapat diarahkan secara lebih terfokus, berbasis data, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Rejang Lebong**  
**Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (64.18)	B (65.68)	B (66.94)	B (67.57)	B (68.21)	B (69.47)	B (70.10)
2	Nilai SAKIP	Nilai	B (62.47)	B (63.75)	B (66.52)	B (69.29)	BB (72.07)	BB (74.84)	BB (77.61)
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	58.87	61.81	64.9	68.15	71.56	75.14	78.89
4	Indeks SPBE	Indeks	3.24	3.39	3.47	3.55	3.63	3.71	3.79
5	Predikat Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.15	84.68	85.47	86.27	87.06	87.86	88.66
7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.29	4.5-4.8	4.8-5.0	5.0-6.5	5.11-6.8	5.23-7.0	5.3-7.2
8	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	32.48	32.89	33.26	33.63	34.00	34.37	34.74
9	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Persen	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65
10	Nilai Investasi Daerah	Miliar Rupiah	92.884	100.890	106.232	111.858	117.781	124.018	130.586
11	Tingkat Kemiskinan	Persen	14.65	14.14-14.51	13.77-14.14	13.41-13.77	13.04-13.41	12.67-13.04	12.30-12.67

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	45.24	50.66	56.96	59.49	62.15	64.95	68.53
13	Rasio Gini	Angka	0.28	0.279-0.292	0.279-0.291	0.279-0.290	0.279-0.289	0.279-0.288	0.278-0.286
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.43	2.30-2.40	2.28-2.39	2.26-2.38	2.22-2.36	2.20-2.35	2.18-2.33
16	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.04	75.17-76.11	75.69-76.67	76.21-77.24	76.74-77.81	77.26-78.38	77.79-78.94
17	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8.81	8.96-9.14	9.14-9.32	9.32-9.50	9.50-9.68	9.68-9.87	9.87-10.05
18	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.20	14.28-14.40	14.40-14.51	14.51-14.63	14.63-14.74	14.74-14.86	14.86-14.98
19	Umur Harapan Hidup	Tahun	69.42	69.68	69.91	70.14	70.37	70.6	70.83
20	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	16.94	20.94	24.94	28.94	32.94	36.94	40.94
21	Angka Kriminalitas	Angka	10	10	10	10	10	10	9
22	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.63	3.69	3.73	3.78	3.82	3.87	3.91
23	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	16.27	17.17	17.26	17.35	17.44	17.54	17.63
24	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47.67	48.17	48.67	49.17	49.67	50.17	50.67
25	Indeks ekonomi Hijau	Indeks	58.49	58.49	58.93	59.36	59.795	60.23	60.67
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71.09	72.01	72.22	72.43	72.64	72.86	73.07
27	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	20.37	20.37	24.31	28.25	32.19	36.13	40.07

#### 4.2.2 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui IKD

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, terukur, dan berorientasi hasil, penyusunan Indikator Kinerja Daerah (IKD) menjadi instrumen fundamental dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Tabel IKD yang disajikan memuat indikator-indikator utama lintas sektor yang mencerminkan arah, capaian, dan kualitas pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Penyusunan tabel ini bukan semata formalitas administratif, tetapi merupakan bagian integral dari sistem evaluasi kinerja yang berbasis hasil (result-based management) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Komponen-komponen dalam tabel disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang indikator, satuan ukur, baseline, target tahunan hingga tahun 2030, serta perangkat daerah penanggung jawab. Keterpaduan antara indikator dan target tahunannya menciptakan kerangka logis dan progresif yang memungkinkan setiap pemangku kepentingan memahami dinamika capaian pembangunan dari waktu ke waktu. Setiap indikator dirancang untuk dapat diukur secara kuantitatif dan diverifikasi, sehingga memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang objektif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penetapan target tahunan menjadi sangat penting untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Target tersebut berfungsi sebagai rambu-rambu kinerja tahunan bagi perangkat daerah, sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (Renja), penganggaran (RKA dan RKPD), hingga laporan kinerja (LKjIP). Dengan adanya target yang jelas per tahun, setiap OPD penanggung jawab dapat menyusun strategi pelaksanaan, menetapkan prioritas program, dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif.

Peran perangkat daerah penanggung jawab dalam tabel ini sangat strategis, karena mereka menjadi ujung tombak pelaksanaan program-program pembangunan yang relevan dengan masing-masing indikator. Setiap OPD tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis, tetapi juga terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dan kolaboratif dari seluruh OPD sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan RPJMD maupun konsistensi capaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan agenda pembangunan nasional.

Dengan demikian, tabel IKD ini menjadi dokumen penting yang tidak hanya memetakan kinerja, tetapi juga mengikat komitmen seluruh elemen birokrasi dalam satu visi pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan. Narasi pengantar ini diharapkan dapat memberi pemahaman atas pentingnya indikator-indikator tersebut dalam kerangka pengelolaan pembangunan daerah yang modern, adaptif, dan bertanggung jawab.

**Tabel 4.5**  
**Target Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Rejang Lebong**  
**Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>I.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI</b>										
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71.09	72.01	72.22	72.43	72.64	72.86	73.07	
	Persentase Penurunan Emisi GRK	Persen	20.37	20.37	24.31	28.25	32.19	36.13	40.07	
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multi Komoditas	Persen	79.09	80.5	80.45	80.56	80.66	80.7	80.75	
	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	Persen	45.46	0.77	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
	Indeks Resiko Bencana	Persen	112.35	111.35	110.35	108.35	106.35	104.35	102.35	
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	73.11	73.2	74.88	79.64	84.7	89.09	93	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
<b>I.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.29	4.5-4.8	4.8-5.0	5.0-5.5	5.11-5.7	5.23-6.1	5.3-6.3	
	Tingkat Kemiskinan	Persen	14.65	14.14-14.51	13.77-14.14	13.41-13.77	13.04-13.41	12.67-13.04	12.30-12.67	
	Pendapatan Perkapita	Juta Rupiah	45.24	50.66	56.96	59.49	62.15	64.95	68.53	
	Rasio Gini	Angka	0.28	0.279-0.292	0.279-0.291	0.279-0.290	0.279-0.289	0.279-0.288	0.278-0.286	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2.43	2.30-2.40	2.28-2.39	2.26-2.38	2.22-2.36	2.20-2.35	2.18-2.33	
	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75.04	75.17-76.11	75.69-76.67	76.21-77.24	76.74-77.81	77.26-78.38	77.79-78.94	
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.81	8.96-9.14	9.14-9.32	9.32-9.50	9.50-9.68	9.68-9.87	9.87-10.05	
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.20	14.28-14.40	14.40-14.51	14.51-14.63	14.63-14.74	14.74-14.86	14.86-14.98	
	Umur Harapan Hidup	Tahun	69.42	69.68	69.91	70.14	70.37	70.6	70.83	
	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	
	Prevalensi Balita Stunting	Persen	24.7	18.8	17.7	16.6	15.5	14.4	13.3	
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	N/a	N/a	4	4.3	4.5	4.7	5	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.83	94.83	94.83	94.90	95.10	95.30	95.50	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	64.53	64.53	64.53	64.75	65.00	65.50	66.00	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.392	0.385	0.380	0.375	0.370	0.365	0.360	
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.82	64.00	64.50	65.00	66.00	66.50	67.00	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	62.12	62.14	62.15	62.17	62.18	62.20	62.21	
<b>I.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
	Nilai Investasi Daerah	Miliar Rupiah	92.884	100.890	106.232	111.858	117.781	124.018	130.586	
	Indeks Infrastruktur Wilayah	Indeks	16.94	20.94	24.94	28.94	32.94	36.94	40.94	
	Angka Kriminalitas	Angka	10	10	10	10	10	10	9	
	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.63	3.69	3.73	3.78	3.82	3.87	3.91	
	Kontribusi PDRB sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	32.48	32.89	33.26	33.63	34	34.37	34.74	
	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	16.27	17.17	17.26	17.35	17.44	17.54	17.63	
	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persen	3.84	4.41	4.91	5.41	5.91	6.41	6.91	
	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata	Persen	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	
	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	2.11	2.16	2.19	2.21	2.24	2.26	2.29	
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	47.67	48.17	48.67	49.17	49.67	50.17	50.67	
	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	58.49	58.49	58.93	59.36	59.795	60.23	60.67	
	Indeks Layanan Kepuasan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	n/A	n/A	3.1	3.15	3.2	3.25	3.3	
	Indeks Desa Membangun	Indeks	0.7089	0.7089	0.7089	0.7089	0.7100	0.7100	0.7150	
	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3.3	3.4	3.44	3.47	3.51	3.54	3.56	
<b>I.4. ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B (64.18)	B (65.68)	B (66.94)	B (67.57)	B (68.21)	B (69.47)	B (70.10)	
	Nilai SAKIP	Nilai	B (62.47)	B (63.75)	B (66.52)	B (69.29)	BB (72.07)	BB (74.84)	BB (77.61)	
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	58.87	61.81	64.9	68.15	71.56	75.14	78.89	
	Indeks SPBE	Indeks	3.24	3.39	3.47	3.55	3.63	3.71	3.79	
	Predikat Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.15	84.68	85.47	86.27	87.06	87.86	88.66	
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2.62	2.62	2.62	2.65	2.68	2.7	2.72	
	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Nilai	N/a	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	76.74	77.24	77.49	77.74	77.99	78.24	78.49	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	53.57	57.14	60.71	64.29	67.86	71.43	75.00	

#### 4.2.3 Target Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui IKK

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berfungsi untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja pemerintah daerah, baik secara menyeluruh maupun per urusan yang menjadi tanggung jawab daerah. IKK ini terbagi menjadi dua jenis, yang masing-masing memiliki bobot penilaian yang berbeda, yaitu terdiri dari capaian kinerja makro dan capaian kinerja pemerintahan. Target indikator kinerja kunci capaian kinerja urusan pemerintahan dijabarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.6**  
**Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<b>I</b>	<b>Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>									
<b>a</b>	<b>Pendidikan</b>									
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69.04	72.87	72.9	72.92	72.95	73	73.1	
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63.31	73	73.5	73.55	73.6	73.7	73.8	
	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65.78	69.12	69.5	69.6	69.7	69.8	69.9	
	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61.35	68.59	68.8	68.9	68.95	70	70.5	
<b>b</b>	<b>Kesehatan</b>									
	Jumlah Kematian Ibu	Nilai	113.1	115	104	94	85	77	75	
	Prevalensi Stunting	nilai	24.7	18.8	17.7	16.6	15.5	14.4	13.3	
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	96.2	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	97.39	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	97.22	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	96.71	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	88	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	93	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	95	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	85	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	50	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	84	100	100	100	100	100	100	
<b>c</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>									
	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	79.09	80.5	80.45	80.56	80.66	80.7	80.75	
	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	45.46	0.77	0.69	0.69	0.69	0.69	0.69	
	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	76.61	0.46	0.68	0.9	1.12	1.34	1.56	
	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	nilai	47.38	49.44	51.59	53.74	55.89	58.04	60.19	
	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja operator/teknisi/ analis	%	N/a	N/a	20	40	60	80	100	
	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	86.07	86.5	86.7	86.9	87.00	87.2	87.4	
<b>d</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>									
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0.00	0.00	15.38	15.38	15.38	15.38	15.38	
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	5.56	0	7.41	9.26	11.11	12.96	14.81	
<b>e</b>	<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>									
	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	5	5	5	5	5	5	5	
	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
<b>f</b>	<b>Sosial</b>									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
<b>II Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>										
<b>a Tenaga Kerja</b>										
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	80	80	-	-	-	80.8	-	
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2.8	-	2.86	2.97	3.03	3.08	3.14	
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/orang	40.055.397 Rupiah / Orang	42.210.166 Rupiah / Orang	44.037.693 Rupiah / Orang	45.996.573 Rupiah / Orang	46.783.333 Rupiah / Orang	48.961.111 Rupiah / Orang	50.576.923 Rupiah / Orang	
<b>b Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>										
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	94.83	94.83	94.83	94.9	95.1	95.3	95.5	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.392	0.385	0.38	0.375	0.37	0.365	0.36	
	Persentase ARG Daerah	%	14.33 (2023)	16	17	18	19	20	21	
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
<b>c Pangan</b>										
	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	nilai	86.49	86.7	88.50	91.00	93.25	95.50	97.59	
	Persentase Daerah Rentan Pangan	%	12.82	-	100	100	100	100	100	
	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	0	100	100	100	100	100	100	
<b>d Lingkungan Hidup</b>										
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Indeks	71.09	72.01	72.22	72.43	72.64	72.86	73.07	
	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	N/A	29.11	35	37	39	41	43	
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	Nilai	70	100	100	100	100	100	100	
<b>e Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>										
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	-	-	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	-	-	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	-	-	100	100	100	100	100	
	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	-	-	100	100	100	100	100	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	72.44	72.44	73	74	75	76	80	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	Nilai	6.85	30	30	33	35	37	40	
f	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	11.48	11.48	11.48	12.29	13.11	13.93	14.75	
	Persentase Fasilitas Penataan Desa	%			18.85	38.52	59.01	79.5	100	
	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%			20.49	27.86	39.34	45.08	52.45	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Desa	%			20	40	60	80	100	
	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	0	0	20	40	60	80	100	
g	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	nilai	2.19	2.18	2.17	2.16	2.15	2.14	2.13	
	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	nilai	77.7	80.78	82.22	83.66	85.1	86.54	88	
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	3.8	3.70	3.27	2.84	2.41	2	2	
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	nilai	30	28	26	24	22	20	18	
	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63.82	64	64.5	65	66	66.5	67	
h	Perhubungan									
	Konektivitas Kabupaten/Kota	rasio	70	75	78	80	83	85	90	
	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	25.62	26.38	26.7	27.02	27.34	27.65	27.97	
i	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	nilai	7.15	7.15	7.17	7.18	7.19	7.2	7.21	
	Pertumbuhan Wirausaha	nilai	1.04	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	
j	Penanaman Modal									
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1.2	4.9	5.2	5.4	5.7	6	6.4	
	Realisasi Total terhadap Target Investasi	nilai	100	100	100	100	100	100	100	
k	Kepemudaan dan Olahraga									
	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	12	14.6	17.2	19.8	22.4	25	25	
l	Statistik									
	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	1.61	2.62	2.62	2.65	2.68	2.7	2.72	
m	Persandian									
	Tingkat kesiapan pengaman informasi pemerintah daerah	nilai	24.96	N/a	27.02	32.68	38.13	43.57	48.37	
n	Kebudayaan									
	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	35	50	50	50	50	60	80	
o	Perpustakaan									
	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	nilai	65.73	67.23	68.72	70.22	71.72	73.21	74.71	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	62.12	62.14	62.15	62.17	62.18	62.2	62.21	
p	Kearsipan									
	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	75.36	76.36	77.36	78.36	79.36	79.37	80.12	
III	Urusan Pilihan									
a	Kelautan dan Perikanan									
	Produksi Perikanan Budi Daya	nilai	511.035.442	5.888	6.182	6.187	6.192	6.197	6.202	
b	Pariwisata									
	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	-	-	25	35	50	75	100	
c	Pertanian									
	Peningkatan produksi tanaman pangan	ton/th			4 ton/th	4 ton/th	4 ton/th	4 ton/th	4 ton/th	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Peningkatan Produksi Hortikultura	ton/th			1 ton/th	1 ton/th	1 ton/th	1 ton/th	1 ton/th	
	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	kg/th			20 Kg/th	20 Kg/th	20 Kg/th	20 Kg/th	20 Kg/th	
	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	ton/th			1.5 ton/th	15 ton/th	15 ton/th	15 ton/th	15 ton/th	
<b>d</b>	<b>Perindustrian</b>									
	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota	nilai	3.91	4.41	4.91	5.41	5.91	6.41	6.91	
	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	0	1	1	2	2	2	2.5	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	nilai	0	0	2	2	3	3	5	
<b>IV</b>	<b>Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b>									
<b>a</b>	<b>Perencanaan</b>									
	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
<b>b</b>	<b>Keuangan</b>									
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	73.83	61.25	65	70	75	80	85	
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	5.82	8.78	8.79	8.95	9.26	9.65	10.05	
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	98.01	98	98.02	98.04	98.04	98.04	98.04	
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3.72	4.85	3.8	3.72	4.5	4.8	4.9	
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	85.71	76.92	70	75	80	85	90	
	Persentase Penurunan SILPA	%	32.39	31.5	30.5	30	29.5	29	28.5	
<b>c</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>									
	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	
	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	nilai	N/A		29.63%	37.04%	44.44%	51.85%	59.26%	
<b>d</b>	<b>Fungsi Pengawasan</b>									
	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	nilai	3.003 Level 3	3.003 Level 3	3.05 Level 3	3.10 Level 3	3.15 Level 3	3.20 Level 3	3.25 Level 3	
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	nilai	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
	Manajemen Risiko Indeks	nilai	Level 2 (2.85)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	nilai	86.17	86.17	86.75	87	87.25	87.5	88	
<b>e</b>	<b>Fungsi Pengadaan</b>									
	Tingkat Kematangan UKPEJ	nilai	Level 2	Level 2	Level 3	Level 4	Level 4	Level 5	Level 5	
<b>f</b>	<b>Hubungan dengan Perwakilan Daerah</b>									
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjabarkan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2045. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif. RPJMD ini menjadi pedoman utama bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pemangku kepentingan.

### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 dirancang untuk menciptakan koordinasi yang efektif, keberlanjutan program, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah kaidah pelaksanaan yang harus diikuti :

#### **5.1.1 Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan**

Perangkat Daerah wajib melaksanakan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berkolaborasi bersama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, masyarakat, dan dunia usaha. Untuk memastikan koordinasi yang efektif, akan dibentuk Forum Koordinasi Pembangunan Daerah yang melibatkan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan. Forum ini akan bertemu secara berkala untuk memantau progres program dan menyelesaikan hambatan lintas sektor.

#### **5.1.2 Kepemimpinan dan Pengarahan Bupati**

Bupati bertanggung jawab mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya daerah. Bupati juga wajib memastikan bahwa setiap program prioritas memiliki indikator kinerja yang terukur, seperti target penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 0,2% per tahun dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,5 poin per tahun.

#### **5.1.3 Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya.

Renstra dimaksud harus selaras dengan RPJMD dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

#### **5.1.4 Penyebarluasan Informasi dan Partisipasi Publik**

Bupati berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi pemerintah daerah, dan forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Selain itu, pemerintah daerah akan mengembangkan Platform Partisipasi Publik Digital untuk memfasilitasi masukan dan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan program.

### **5.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

1. **Monitoring dan Evaluasi Berbasis Kinerja:** Evaluasi dilakukan melalui pemantauan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
2. **Pelaporan Berkala:** Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong wajib menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta laporan evaluasi pembangunan daerah lainnya.
3. **Forum Evaluasi dan Umpan Balik:** Melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses evaluasi untuk mendapatkan masukan terhadap efektivitas kebijakan dan program Pembangunan.
4. **Rekomendasi dan Perbaikan Berkelanjutan:** Hasil evaluasi harus dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi dan perbaikan terhadap kebijakan dan program yang belum optimal.
5. **Pengawasan oleh DPRD dan Masyarakat:** DPRD dan masyarakat memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan RPJMD guna memastikan pembangunan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

### **5.3 PEDOMAN TRANSISI**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 menjadi pedoman utama bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan dan pemerintahan berikutnya yang akan dipilih pada Pemilu 2024. Selama lima tahun ke depan, diharapkan seluruh program pembangunan yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh perangkat daerah. Hasil pembangunan ini akan menjadi dasar bagi kesinambungan program pembangunan daerah dalam RPJMD berikutnya.

### 5.3.1 Mekanisme Transisi Kepemimpinan

Untuk memastikan keberlanjutan program, pada awal tahun 2029 akan dibentuk Tim Transisi Pembangunan Daerah yang bertugas memastikan bahwa program-program RPJMD tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan. Tim ini akan melibatkan perwakilan dari pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil.

### 5.3.2 Evaluasi dan Pelaporan Berkala

Setiap tahun, pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Pembangunan Daerah yang memuat capaian indikator kinerja, tantangan, dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini akan dipublikasikan secara terbuka untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

### 5.3.3 Penyiapan RKPD Tahun Anggaran 2030

Bupati periode 2025-2030 akan menyerahkan jabatannya kepada Bupati terpilih periode 2030-2035 pada 20 Februari 2030. Oleh karena itu, Tim Transisi Pembangunan diberikan tugas khusus untuk menyiapkan RKPD 2030 dan memastikan program RPJMD tetap berjalan berkesinambungan dengan mempedomani hasil evaluasi Laporan Kinerja Pembangunan Daerah.

## 5.4. KATA AKHIR

RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025–2029 merupakan peta jalan strategis untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi publik. Dengan memperkuat mekanisme koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas, dokumen ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi terwujudnya visi "Mewujudkan Kabupaten Rejang Lebong yang Maju, Mandiri, Berakhlak dan Berkelanjutan".



Bupati Rejang Lebong,

H. MUHAMMAD FIKRI, S.E., M. AP